



SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang akan dicapai. Program kegiatan pada Renja 2023 mengacu pada Program dan Kegiatan Renstra tahun keempat, hal ini sebagai bentuk konsistensi antara Renja dengan Renstra.

Penyusunan Dokumen Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Kerja terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merupakan dokumen Perencanaan untuk periode satu tahun untuk menjamin adanya konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana Kerja merupakan perencanaan yang menjadi dasar kinerja Setda Prov. Kaltim yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun. Disamping itu pula untuk *review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan capaian tahun berjalan. Dokumen Rencana Kerja akan menjadi pedoman umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, Juli 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH



Ir. RIZA INDRA RIADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19641028 199003 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Layanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	77
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	92
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	133
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	181
BAB III Tujuan dan Sasaran	184
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	184
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	188
3.3 Program dan Kegiatan	190
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan	195
BAB V Penutup	228
5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	228
5.2 Rencana Tindak Lanjut	228
Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 2.1.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	10
Tabel 2.1.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006	46
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	77
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur	135
Tabel 2.4	Usulan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	181
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah	189
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur	196

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, 2020 dan 2021
- Lampiran 2 Nota Dinas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Nomor: 050.14/0096-II/B.Kesra tanggal 28 Januari 2022 Hal: Usulan Nomenklatur Sub. Kegiatan Baru pada Renja Sekretariat Daerah 2023
- Lampiran 3 Telaahan Staf Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Nomor: 050/154/Adpim-I tanggal 24 Januari 2022 Perihal: Usulan Penambahan Sub. Kegiatan
- Lampiran 4 Nota Dinas Plh. Kepala Biro Umum Nomor: 910/0858/B.Um.I tanggal 24 Januari 2022 Hal: Usulan Penambahan Kegiatan dan Sub. Kegiatan
- Lampiran 5 Nota Dinas Kepala Biro Organisasi Nomor: 050/456/B.Org-TL tanggal 17 Juni 2022 Perihal: Permohonan Pengusulan Penambahan Sub Kegiatan
- Lampiran 6 Surat Pj. Sekretaris Daerah Nomor: 005/2187/Adpim-I tanggal 25 Maret 2022 Hal: Undangan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Renja Setda Prov. Kaltim Tahun 2023
- Lampiran 7 Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan tema: "Sinergitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur" 2022 Nomor: 060/2239/Adpim-I tanggal 28 Maret

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tak lepas dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan landasan hukum di bidang perencanaan dan pembangunan yang mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, yang saat ini masih berupa Ranwal Renja 2023, disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai amanat tersebut, dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kalimantan Timur tahun 2023, Rencana Kerja memuat program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pencapaian sasaran-sasaran pembangunan pada RPJMD. Lebih luas lagi diharapkan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai gambaran bagaimana mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kalimantan Timur Tahun 2023 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada perubahan Renstra Sekretariat Daerah, hasil evaluasi Renja Sekretariat Daerah tahun sebelumnya, dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, juga akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan di lingkungan Biro-Biro untuk tahun 2023 sesuai prioritas Pembangunan Kalimantan Timur, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan memperhatikan kebijakan dan program dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

Tahapan ini dilakukan dengan:

- a. membentuk Tim Penyusun Renja Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah;
- b. melaksanakan orientasi mengenai Renja untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah;
- c. menyusun tata cara sebagai panduan kerja; dan
- d. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah.

2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

Pada tahap ini dilakukan analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah dan mengevaluasi capaian Renja Sekretariat Daerah tahun yang lalu.

3. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal Renja Sekretariat Daerah setelah dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023, yang mengacu pada rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Penyempurnaan tersebut mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

Tahap ini merupakan koordinasi antar Unit Kerja yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

5. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

Tahap ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam rumusan program, kegiatan dan pagu indikatif. Rancangan akhir Renja Sekretariat Daerah disusun dengan sistematika:

- I. Pendahuluan
 - II. Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu
 - III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - IV. Rencana Kerja dan Pendanaan
 - V. Penutup
6. Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
- Rancangan akhir Rencana Kerja disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan berpedoman pada tahapan dimaksud, maka diharapkan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi komitmen bersama guna meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah, serta menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tetap mempertimbangkan prioritas-prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

- Timur;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
 20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu disusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1. Maksud:

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 dimaksudkan sebagai:

1. Pedoman dalam menentukan arah dan penetapan program dan kegiatan tahun 2023;
2. Pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan Program 2022 dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan yang meliputi kebutuhan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator, dan pagu anggaran.

1.3.2. Tujuan:

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah:

1. Menjadi acuan bagi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, untuk penambahan kegiatan/sub kegiatan, penghapusan kegiatan/sub kegiatan, perubahan indikator kinerja, perubahan target, dan perubahan pagu anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
2. Menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
3. Sebagai alat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan tersusunnya Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Renja Sekretariat Daerah, proses penyusunan Renja Sekretariat dan keterkaitan antara Renja Sekretariat Daerah dengan dokumen RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Sekretariat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Sekretariat Daerah serta susunan garis besar dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun 2021 dan capaian Renstra Sekretariat Daerah

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melakukan *review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun yang lalu, dan/atau realisasi APBD, dengan tujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.2 Analisis Kinerja Layanan Sekretariat Daerah

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan minimal (SPM), maupun terhadap IKK.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Menjelaskan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, meliputi tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi misi, serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Menguraikan proses yang dilakukan yaitu membandingkan antar rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan Dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023

Berisi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Menjelaskan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta kaitannya dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada Tahun 2023.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah

Berisi rencana kerja dan pendanaan biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2023.

BAB V Penutup

Memuat kesimpulan, catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan dan program yang telah disusun, dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan evaluasi yang dijabarkan dalam Bab Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, dimaksudkan sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja tahun lalu.

Evaluasi yang dimaksud untuk mengetahui:

1. Target kinerja yang tidak tercapai, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Agar lebih memudahkan dalam memahaminya evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, dituangkan ke dalam dua tabel. Tabel 2.1.1 berisi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2021, berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dimana Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 tidak terlihat, dikarenakan akan dituangkan pada tabel berikutnya yakni berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016.

Kemudian Tabel 2.1.2 juga merupakan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2021, namun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Hal ini merupakan kebalikan dari tabel sebelumnya, dimana target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan, hanya dapat terlihat pada tabel sebelumnya berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan pencapaian kinerja berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai tahun 2021, dapat dilihat dalam tabel 2.1.1 dan 2.1.2 di bawah ini:

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2021
Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100	0	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2	PERMENDAGRI 13	2	2	100	2	1,14	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	98	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100	50	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan	12	PERMENDAGRI 13	12	12	100	12	6	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100	22	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang telah mengikuti bimtek	6	PERMENDAGRI 13	4	4	100	6	1,32	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100	44,77	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	PERMENDAGRI 13	12	12	100	12	4,8	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	PERMENDAGRI 13	12	12	100	12	4,8	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi SKPD	90	PERMENDAGRI 13	160	160	100	90	49,5	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100	100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang tersedia	350	PERMENDAGRI 13	5	5	100	350	350	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12		12	12	100	12	6,96	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100	5,69	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	12	PERMENDAGRI 13	12	12	100	12	4,05	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah unit jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional	9		9	9	100	9	3	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat EKPPD "tinggi"	80	PERMENDAGRI 13	80	80	100	85	30,65	
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Presentase tapal batas wilayah Kab/Kota yang disepakati	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100	22,72	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	3	PERMENDAGRI 13	3	3	100	3	1,2	
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah laporan fasilitasi penataan wilayah	4	PERMENDAGRI 13	4	4	100	4	1,4	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100	31,78	
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah laporan fasilitasi pejabat negara	3	PERMENDAGRI 13	3	3	100	3	0,9	
	Pengembangan otonomi dan penataan urusan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan	4	PERMENDAGRI 13	4	4	100	4	2,4	
	Evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	3	PERMENDAGRI 13	3	3	100	3	2,1	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Presentase kerjasama yang ditindak lanjuti	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100	45,71	
	Fasilitasi kerjasama antar pemerintah	Jumlah laporan kerjasama antar pemerintah	1	PERMENDAGRI 13	1	1	100	4	1,4	
	Fasilitasi kerjasama badan usaha/swasta	Jumlah laporan kerjasama antar badan usaha/swasta	1	PERMENDAGRI 13	1	1	100	4	2,2	
	Evaluasi pelaksanaan kerjasama	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan kerjasama	1	PERMENDAGRI 13	1	1	100	1	0,8	
BIRO HUKUM										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Hukum	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100	83	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100	100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	PERMENDAGRI 13	2	2	100	2	2	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan baik	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pelaksanaan dan Penatausahaan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan dokumen penatausahaan administrasi keuangan	12	PERMENDAGRI 13	12	12	100	12	12	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan	12	PERMENDAGRI 13	12	12	100	12	12	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD	12	PERMENDAGRI 13	12	12	12	12	12	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100	100	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan hasil pendidikan dan pelatihan	3	PERMENDAGRI 13	4	4	100	4	4	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100	100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	PERMENDAGRI 13	12	12	100	12	12	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12	PERMENDAGRI 13	12	12	100	12	12	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	45	PERMENDAGRI 13						
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang diadakan	700	PERMENDAGRI 13	700	700	100	700	700	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah bulan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100	100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	500	PERMENDAGRI 13	500	500	100	500	500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12	PERMENDAGRI 13	12	12	100	12	12	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100	100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	12	PERMENDAGRI 13	12	12	100	12	12	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100	100	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan pengadaan perlengkapan kantor	1	PERMENDAGRI 13	1	1	100	1	1	
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Rancangan Produk Hukum dan bantuan hukum yang difasilitasi	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100	64,18	
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kab/Kota	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100	63,61	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	80	PERMENDAGRI 13	80	80	100	80	22	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	650	PERMENDAGRI 13	650	650	100	600	430	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	730	PERMENDAGRI 13	730	730	100	680	452	
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	350	PERMENDAGRI 13	350	350	100	300	152	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Hukum Litigasi dan Non Litigasi serta Hak Asasi Manusia (HAM)	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100	58,33	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	10	PERMENDAGRI 13	5	5	100	10	6	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	10	PERMENDAGRI 13	10	10	100	2	1	
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	82,00%	PERMENDAGRI 13	75,00%	75,00%	100,00%	84,00%	0,00%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	100,00%	PERMENDAGRI 13	100,00%	100,00%	100,00%	90%	39%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	2 Dokumen	PERMENDAGRI 13	2	2	100,00%	2	1	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	PERMENDAGRI 13	2	2	100,00%	2	0	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	PERMENDAGRI 13	2	2	100,00%	2	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja SKPD	3 Dokumen	PERMENDAGRI 13	3	3	100,00%	3	2	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	90%	PERMENDAGRI 13	90%	77%	85,57%	90%	39%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Keuangan	12 Laporan	PERMENDAGRI 13	12	12	100,00%	12	6	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan SKPD	1 Laporan	PERMENDAGRI 13	1	1	100,00%	1	1	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	PERMENDAGRI 13	100%	100%	100,00%	90%	39%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	4 Orang	PERMENDAGRI 13	8	0	0,00%	4	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	PERMENDAGRI 13	12	12	100,00%	90%	39%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	PERMENDAGRI 13	12	12	100,00%	12	12	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan barang cetak dan penggandaan	12 Laporan	PERMENDAGRI 13	12	12	100,00%	12	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	12 Laporan	PERMENDAGRI 13	12	12	100,00%	12	12	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang	12 Bulan	PERMENDAGRI 13	12	12	100,00%	12 Bulan	12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat atau dokumen yang dikirim	1000 Lembar	PERMENDAGRI 13	1000	1000	100,00%	1000	392	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dokumen jasa komunikasi	12 Dokumen	PERMENDAGRI 13	12	12	100,00%	12	12	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang Kategori Baik	90%	PERMENDAGRI 13	85%	85%	100,00%	90%	39%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan diperpanjang izinnya	10 Unit	PERMENDAGRI 13	10	10	100,00%	25	10	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan	25 Unit	PERMENDAGRI 13	25	25	100,00%	11	4	
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	90%	PERMENDAGRI 13	85%	85%	100,00%	90%	23%	
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Prosentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti	90%	PERMENDAGRI 13	85%	85%	100,00%	90%	20%	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Sarana dan Prasarana Spiritual	12 Dokumen	PERMENDAGRI 13	1	1	100,00%	10	2	
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	PERMENDAGRI 13	1	1	100,00%	13	4	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Prosentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	90%	PERMENDAGRI 13	85%	85%	100,00%	90%	12,50%	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	12 Dokumen	PERMENDAGRI 13	2	2	100,00%	15	4	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	12 Dokumen	PERMENDAGRI 13	1	1	100,00%	16	2	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	12 Dokumen	PERMENDAGRI 13	2	2	100,00%	10	2	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Prosentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	90%	PERMENDAGRI 13	85%	85%	100,00%	90%	27,27%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	12 Dokumen	PERMENDAGRI 13	3	3	100,00%	11	3	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12 Dokumen	PERMENDAGRI 13	3	3	100,00%	13	2	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	12 Dokumen	PERMENDAGRI 13	3	3	100,00%	10	2	
4.01.0.00.0.00.03.0007	BIRO PEREKONOMIAN									
4.01.001	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase Laporan Yang Disusun Sesuai Ketentuan	100%	PERMENDAGRI 13	100	100	100%	100%	0	
4.01.001.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	PERMENDAGRI 13	100	100	100%	100%	0	
4.01.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	4 Dokumen	PERMENDAGRI 13	4	4	100%	4 Dokumen	0	
4.01.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi	4 Dokumen	PERMENDAGRI 13	4	4	100%	4 Dokumen	0	
4.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	92%	PERMENDAGRI 13	90	73	81%	92%	0	
4.01.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan	-	PERMENDAGRI 13	0	0	0%	-	-	-
4.01.001.1.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	12 Laporan	PERMENDAGRI 13	12	12	100%	12 Laporan	6	50
4.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	0%	PERMENDAGRI 13	0	0	0	100%	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan dan/atau bimtek	14 Orang	PERMENDAGRI 13	0	0	0%	14 Orang	3	21,43
4.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	PERMENDAGRI 13	100	100	100%	100%	0	
4.01.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	PERMENDAGRI 13	12	12	100%	12	6	50
		Jumlah Perlengkapan Kantor yang disediakan		PERMENDAGRI 13	7	7	100%			
4.01.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 Laporan	PERMENDAGRI 13	16000	16000	100%	12 Laporan	6	50
4.01.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/surat kabar	12 Laporan	PERMENDAGRI 13	4	4	100%	12 Laporan	6	50
4.01.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	120 OT	PERMENDAGRI 13	60	60	100%	120 OT	54	45
4.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	PERMENDAGRI 13	100	100	100%	100%	0	
4.01.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos	120 Lembar	PERMENDAGRI 13	200	120	60%	120 Lembar	60	50
4.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100%	PERMENDAGRI 13	100	100	100%	100%	0	
4.01.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	1 Unit	PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Unit	1	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Operasional atau Lapangan									
4.01.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	12 Laporan	PERMENDAGRI 13	12	12	100%	12 Laporan	6	50
4.01.006	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian	100%	PERMENDAGRI 13	100	100	100%	100%	0	
4.01.006.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1 Laporan	PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Laporan	0	
4.01.006.1.01.001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Laporan	PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Laporan	0	
4.01.006.1.01.002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Laporan	PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Dokumen	0	
4.01.006.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1 Laporan	PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Dokumen	0	
4.01.006.1.02.001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	3 Laporan	PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Laporan	0	
4.01.006.1.02.002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan	2 Laporan	PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Laporan	0	
4.01.006.1.02.003	Koordinasi, Sinkronisasi dan	Jumlah laporan hasil koordinasi, sinkronisasi	2 Laporan	PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Laporan	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	dan evaluasi kebijakan energi dan air								
4.01.006.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1 Laporan	PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Laporan	0	
4.01.006.1.03.001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Laporan	PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Laporan	0	
4.01.006.1.03.002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Laporan	PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Laporan	0	
4.01.006.1.03.004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD	Jumlah laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BLUD	1 Laporan	PERMENDAGRI 13	1	0	0	1 Laporan	0	
4.01.006.1.03.005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi BLUD	1 Laporan		-	-	-	-	-	-
4.01.0.00.0.00.03.0008	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
4.01.001	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	PERMENDAGRI 13				100	10	10
4.01.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	4 Dokumen	PERMENDAGRI 13				4	2	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	PERMENDAGRI 13				1	1	100
4.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen keuangan daerah	1 Dokumen	PERMENDAGRI 13				1	1	100
4.01.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	25 Orang	PERMENDAGRI 13				25	25	100
4.01.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Tugas	5 Laporan	PERMENDAGRI 13				5	1	20
4.01.001.1.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	12 Laporan	PERMENDAGRI 13				12	6	50
4.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian	2 Dokumen	PERMENDAGRI 13				2	2	100
4.01.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan	8 Laporan	PERMENDAGRI 13				8	8	100
4.01.001.1.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Sosialisasi	12 Laporan	PERMENDAGRI 13				12	12	100
4.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum	3 Dokumen	PERMENDAGRI 13				3	3	100
4.01.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor untuk meningkatkan kinerja Pegawai	57 Unit	PERMENDAGRI 13				57	57	100
4.01.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan dan Kebijakan	100 Buku	PERMENDAGRI 13				100	10	10
4.01.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	40 Laporan	PERMENDAGRI 13				40	40	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen penyediaan jasa penunjang	2 Dokumen	PERMENDAGRI 13				2	2	100
4.01.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat	12 Laporan	PERMENDAGRI 13				12	12	100
4.01.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	PERMENDAGRI 13				12	12	100
4.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	PERMENDAGRI 13				3	3	100
4.01.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	8 Unit	PERMENDAGRI 13				8	8	100
4.01.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	PERMENDAGRI 13				4	4	100
4.01.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Kelengkapan Kerja	30 Unit	PERMENDAGRI 13				30	30	100
4.01.003	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Terlaksananya Koordinasi dalam Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	PERMENDAGRI 13				100	100	100
4.01.003.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersusunnya Dokumen LPPD	1 Dokumen	PERMENDAGRI 13				1	1	100
4.01.003.1.02.003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah	1 Dokumen	PERMENDAGRI 13				1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.007	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	PERMENDAGRI 13				100	85	85
4.01.007.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	PERMENDAGRI 13				3	3	100
4.01.007.1.01.001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan strategis pengadaan yang barang dan jasa yang dilaksanakan	12 Laporan	PERMENDAGRI 13				12	12	100
4.01.007.1.01.002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket yang di tender	650 Paket	PERMENDAGRI 13				650	650	100
		Jumlah sanggah lelang melalui LPSE	5 Sanggah	PERMENDAGRI 13				5	5	100
		laporan Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	PERMENDAGRI 13				12	12	100
4.01.007.1.01.003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	laporan pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	PERMENDAGRI 13				12	12	100
4.01.007.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3 Dokumen	PERMENDAGRI 13				3	3	100
4.01.007.1.02.001	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	12 Laporan	PERMENDAGRI 13				12	12	100
4.01.007.1.02.002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	laporan pelaksanaan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa (3 Sistem)	12 Laporan	PERMENDAGRI 13				12	12	100
4.01.007.1.02.003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pengadaan elektronik yang dilayani	700 Pengadaan	PERMENDAGRI 13				700	700	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah User yang dilayani	700 User	PERMENDAGRI 13				700	700	100
		Laporan pelaksanaan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	PERMENDAGRI 13				12	12	100
4.01.007.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tersusunnya Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	PERMENDAGRI 13				3	3	100
4.01.007.1.03.001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM yang diberi Pembinaan	100 Orang	PERMENDAGRI 13				100	100	100
4.01.007.1.03.002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan	12 Laporan	PERMENDAGRI 13				12	12	100
4.01.007.1.03.003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	laporan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan	12 Laporan	PERMENDAGRI 13				12	12	100
4.01.008	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Infrastruktur Fisik, Administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	75%	PERMENDAGRI 13				75	75	100
4.01.008.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	PERMENDAGRI 13				3		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.008.1.01.001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	dokumen evaluasi dan pelaporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	12 Laporan	PERMENDAGRI 13				12	6	
4.01.008.1.01.002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12 Laporan	PERMENDAGRI 13				12	6	50
4.01.008.1.01.003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III	6 Laporan	PERMENDAGRI 13				6	4	66,67
4.01.008.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Dokumen	PERMENDAGRI 13				3		
4.01.008.1.02.001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan Analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan	12 Laporan	PERMENDAGRI 13				4	0	
4.01.008.1.02.002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Pelaksanaan pembangunan daerah	12 Laporan	PERMENDAGRI 13				12	6	50
		Pengendalian Operasional Kegiatan Yang Bersumber Dana APBD	2 Dokumen	PERMENDAGRI 13				2		
		Pengendalian Operasional Kegiatan Yang Bersumber Dana Bantuan Keuangan	2 Dokumen	PERMENDAGRI 13				2		
4.01.008.1.02.003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Laporan Fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembanguan yang telah dilaksanakan	12 Laporan	PERMENDAGRI 13				1	0	
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase kualitas Pemerintahan Daerah	90					90	90	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya laporan keuangan yang akuntabel	90					90	90	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	12					12	12	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas pegawai	80					80	80	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas untuk ASN	50					70	70	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan	10					34	34	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Sosialisasi	12					12	12	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Administarsi Umum	90					90	90	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor untuk meningkatkan kinerja Pegawai	20					36	36	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan dan Kebijakan	50					50	50	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	40					40	40	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	meningkatnya pelayanan kantor	85					85	85	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kerja	10					96	96	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan Administarsi Umum	85					85	85	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat	1					1	1	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi/Internet yang tersedia	12					12	12	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12					12	12	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	85					85	85	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	3					1	3	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	6					1	6	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharannya Peralatan dan Kelengkapan Kerja	50					22	50	
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PERSENTASE PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	100					100	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	98					98	98	
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan strategis pengadaan yang barang dan jasa yang dilaksanakan	12					12	12	
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengadaan Barang dan Jasa Tender dan NonTender	2					2	2	
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	laporan pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	2					2	2	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	95					95	95	
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Layanan LPSE	700					700	700	
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (3 sistem)	3					3	2	
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Informasi yang Dilayani	12					12	4	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan kepada pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	80					80	80	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM yang diberi Pembinaan	50					200	50	
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan	11					11	11	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan	8					8	8	
BIRO ORGANISASI										
4.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Organisasi		PERMENDAGRI 13	82	82	100%	83%		
4.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan		PERMENDAGRI 13	90	90	100%	92	32,91	
4.01.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Tenaga Teknis/Non Teknis		PERMENDAGRI 13	6	6	100%			
4.01.001.1.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Administrasi Keuangan		PERMENDAGRI 13	12	12	100%	12 Laporan	6	
4.01.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan		PERMENDAGRI 13	100	100	100%	100%	50	
4.01.001.1.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan BMD		PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Laporan	0	
4.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah		PERMENDAGRI 13	0	0	0%	100%		
4.01.001.1.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Setda		PERMENDAGRI 13	1	1	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat		PERMENDAGRI 13	10	10	100%	7 Orang	0	
4.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah		PERMENDAGRI 13	100	100	100%	100%	50	
4.01.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		PERMENDAGRI 13	0	0	100%	12 Laporan	6	
4.01.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan						1580 Porsi	500	
4.01.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan		PERMENDAGRI 13	12	12	100%	12 Bulan	6	
4.01.001.1.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu		PERMENDAGRI 13	95	95	100%	95 Orang	60	
4.01.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi		PERMENDAGRI 13	0	0	100%	164 OT	80	
4.01.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		PERMENDAGRI 13	100	100	100%	100%	50	
4.01.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		PERMENDAGRI	0	0	100%	10 Unit	3	
4.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		PERMENDAGRI 13	100	100	100%	100%	50	
4.01.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Surat Masuk dan Keluar		PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Dokumen	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		PERMENDAGRI 13	1	1	100%			
4.01.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis		PERMENDAGRI 13	1	1	100%	12 Dokumen	6	
4.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik		PERMENDAGRI 13	100	100	100%	100%	50	
4.01.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2		PERMENDAGRI 13	16	16	100%	12 Unit	4	
4.01.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor		PERMENDAGRI 13	10	10	100%	20 Unit	5	
4.01.002	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)		PERMENDAGRI 13	92	92	100%	95%	0	
		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (Baik)		PERMENDAGRI 13	77	77	100%	79%	0	
4.01.002.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Indeks Kematangan Organisasi		PERMENDAGRI 13	42	42	100%	42 Indeks		
4.01.002.1.01.001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Kelembagaannya		PERMENDAGRI 13	37	37	100%	37 PD	10	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyampaikan Hasil Evaluasi Kematangan Organisasi		PERMENDAGRI 13	37	37	100%	37 PD	10	
4.01.002.1.01.002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelembagaannya		PERMENDAGRI 13	10	10	100%	10 Kab/Kota	5	
		Persentase Usulan Fasilitasi Kelembagaan Kab / Kota yang ditindaklanjuti		PERMENDAGRI 13	100	100	100%	50%	25%	
4.01.002.1.01.003	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja		PERMENDAGRI 13	37 PD	37 PD	100%	37 PD	10	
		Laporan Evaluasi Jabatan		PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Dokumen	0	
		Dokumen Standar Kompetensi Jabatan		PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Dokumen	0	
		Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Anjab dan ABK nya		PERMENDAGRI 13	10	10	100%	10 Kab/Kota	0	
		Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Standar Kompetensi		PERMENDAGRI 13	10	10	100%	10 Kab/Kota	0	
		Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Penyusunan Formasi Pegawai		PERMENDAGRI 13	10	10	100%	10 Kab/Kota	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase Usulan Anjab dan ABK Kab Kota yang dilakukan Validasi		PERMENDAGRI 13	100 %	100 %	100%	50 %	0	
4.01.002.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Rata - rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah		PERMENDAGRI 13	65	65	0%	65 Nilai		
4.01.002.1.02.001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019 - 2023		PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Dokumen	0	
		Laporan Fasilitasi Evaluasi Reformasi Birokrasi		PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Dokumen	0	
4.01.002.1.02.002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim		PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Dokumen	0	
		Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penyusunan LKjIP		PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Dokumen	0	
		Jumlah PD yang difasilitasi Evaluasi AKIP		PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Dokumen	0	
		Jumlah PD yang difasilitasi Penerapan / Penguatan SAKIP		PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Dokumen	0	
		Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur		PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Dokumen	0	
		Jumlah Kab / Kota yg dilakukan Monitoring dan Pembinaan SAKIP		PERMENDAGRI 13	10	10	100%	10 Kab/Kota	0	
4.01.002.1.02.003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan penerapan Budaya Kerja		PERMENDAGRI 13	37	37	100%	37 PD	0	
		Jumlah Perangkat Daerah yang membentuk Kelompok Budaya Kerja		PERMENDAGRI 13	37	37	100%	37 PD	0	
4.01.002.1.02.004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Laporan Fasilitasi Evaluasi SOP Perangkat Daerah		PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Dokumen	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Dokumen peta Proses Bisnis		PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Dokumen	0	
		Laporan Fasilitas Tata Naskah Dinas		PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Dokumen	0	
		Laporan Fasilitas Pakaian Dinas		PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Dokumen	0	
4.01.002.1.02.005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Fasilitasi dan Evaluasi standar pelayanan terhadap Perangkat Daerah		PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Dokumen	0	
		Fasilitasi dan evaluasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat		PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Dokumen	0	
		Fasilitasi Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik		PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Dokumen	0	
		Fasilitasi Evaluasi Unit Pelayanan Publik		PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Dokumen	0	
		Laporan Binwas dan Monitoring terhadap Kab/Kota penyelenggaraan Pelayanan Publik		PERMENDAGRI 13	1	1	100%	1 Dokumen	0	
BIRO UMUM										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	76	75	75	75	75	75		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	PERMENDAGRI 13						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	PERMENDAGRI 13					2	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan baik	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	PERMENDAGRI 13	14	14	100	14	14	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	PERMENDAGRI 13	12	12	100	1	1	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Biro Umum	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100		
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	PERMENDAGRI 13	1	1	100	1	1	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		PERMENDAGRI 13						
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Biro Umum	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut	400	PERMENDAGRI 13	400	400	100	400	400	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	PERMENDAGRI 13	1	1	100	1	1	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	PERMENDAGRI 13	3	3	100	9	9	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	PERMENDAGRI 13	15	15	100	15	15	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	PERMENDAGRI 13	12	12	100	12	12	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	261600	PERMENDAGRI 13	261.600	261600	100	50	50	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	5	PERMENDAGRI 13	5	5	100	5	5	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750	PERMENDAGRI 13	1.500	1500	100	1500	1500	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	PERMENDAGRI 13	1	1	100	2	2	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	PERMENDAGRI 13	3	3	100	3	3	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	15	PERMENDAGRI 13	25	25	100	25	25	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	PERMENDAGRI 13	10	10	100	10	10	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700	PERMENDAGRI 13	2.100	2100	100	2100	2100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	PERMENDAGRI 13	12	12	100	12	12	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	PERMENDAGRI 13						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	PERMENDAGRI 13	12	12	100	12	12	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150	PERMENDAGRI 13	150	150	100	150	150	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	PERMENDAGRI 13						
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Banugnan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13	PERMENDAGRI 13	13	12	92,307692	13	13	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banungan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150	PERMENDAGRI 13	150	75	50	150	150	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan baik	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	PERMENDAGRI 13	2	2	100	2	2	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4	PERMENDAGRI 13						
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	PERMENDAGRI 13						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH	12	PERMENDAGRI 13						
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1	PERMENDAGRI 13	1	1	100	1	1	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	PERMENDAGRI 13	1	1	100	1	1	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1	PERMENDAGRI 13	1	1	100	1	1	
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan	85	PERMENDAGRI 13	83	83	100	84	31	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	PERMENDAGRI 13	2	2	100	2	1	
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja lingkup Setda	2	PERMENDAGRI 13	4	4	100	4	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan baik	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan ASN	12	PERMENDAGRI 13	12	12	100	12	4	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan hasil pendidikan dan pelatihan	4	PERMENDAGRI 13	4	4	100	4	1	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Setda	2	PERMENDAGRI 13	2	2	100	2	1	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan peralatan Alat tulis kantor	12	PERMENDAGRI 13	12	12	100	12	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	12	PERMENDAGRI 13	12	12	100	12	2	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	160	PERMENDAGRI 13	160	160	100	160	40	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang diadakan	1000	PERMENDAGRI 13	1000	1000	100	1000	250	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	5	PERMENDAGRI 13	5	5	100	5	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya (STNK) dan dipelihara	15	PERMENDAGRI 13	15	15	100	15	2	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	12	PERMENDAGRI 13	12	12	100	12	4	
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100		
	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah dokumen naskah pidato dan presentasi	12	PERMENDAGRI 13	12	12	100	12	4	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah dokumen yang terpublikasi	12	PERMENDAGRI 13	12	12	100	12	4	
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah dokumen penyediaan data yang terdokumentasi	12	PERMENDAGRI 13	12	12	100	12	4	
	Fasilitasi Keprotokolan	Tersedianya Fasilitas Keprotokolan Sekretariat Daerah	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah dokumen koordinasi acara kegiatan Pemda	4	PERMENDAGRI 13	4	4	100	4	1	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dokumen kunjungan tamu yang terlayani	2	PERMENDAGRI 13	2	2	100	2	0	
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah dokumen administrasi keprotokolan	2	PERMENDAGRI 13	2	2	100	2	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	PERMENDAGRI 13	100	100	100	100		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12	PERMENDAGRI 13	12	12	100	12	4	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Listrik, dan Sumber Daya Air yang terbayarkan	12	PERMENDAGRI 13	12	12	100	12	4	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah	(BIRO POD)	PERMENDAGRI 13	(BIRO POD)	(BIRO POD)	(BIRO POD)	(BIRO POD)	(BIRO POD)	(BIRO POD)
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	(BIRO POD)	PERMENDAGRI 13	(BIRO POD)	(BIRO POD)	(BIRO POD)	(BIRO POD)	(BIRO POD)	(BIRO POD)
	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Lol, MoU antara Pemerintah Daerah, pemerintah Daerah/Pusat/lembaga diluar negeri	(BIRO POD)	PERMENDAGRI 13	(BIRO POD)	(BIRO POD)	(BIRO POD)	(BIRO POD)	(BIRO POD)	(BIRO POD)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Lol, PKS yang terbit antara Pemprov dengan Perseorangan, Badan Usaha maupun Ormas (pihak ketiga) dan Lembaga non Pemerintah	(BIRO POD)	PERMENDAGRI 13	(BIRO POD)	(BIRO POD)	(BIRO POD)	(BIRO POD)	(BIRO POD)	(BIRO POD)
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Administrasi Kerja Sama yang Terdokumentasi	(BIRO POD)	PERMENDAGRI 13	(BIRO POD)	(BIRO POD)	(BIRO POD)	(BIRO POD)	(BIRO POD)	(BIRO POD)

Sumber: kompilasi data biro-biro di lingkup Setda Prov. Kaltim

Tabel 2.1.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2021
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	100	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	2	2	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	98	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	98	98	100
	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan pengelola keuangan	12	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	12	12	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	100	100	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang telah mengikuti bimtek	6	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	6	6	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	100	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	12	12	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	12	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	12	12	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi SKPD	90	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	90	90	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	100	100	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang tersedia	350	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	350	350	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah dok. Gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	12	12	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	100	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	100	100	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan Peralatan/Perlengkapan Kantor yang dipelihara	12	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	12	12	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, biaya pemeliharaan,	Jumlah unit jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	9	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	9	9	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	dinas atau kendaraan dinas operasional								
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	100	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	100	100	100
	Pengaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	12	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	12	12	100
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat EKPPD "tinggi"	80	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	80	80	100
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Tapal Batas Wilayah Kab/Kota yang disepakati	90	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	90	90	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah laporan kerjasama antar pemerintah	3	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	3	3	100
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah laporan fasilitasi penataan wilayah	4	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	4	4	100
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi di bidang pelaksanaan otonomi daerah	85	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	85	85	100
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah laporan fasilitasi pejabat negara	3	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	3	3	100
	Pengembangan otonomi dan penataan urusan	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan	4	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	4	4	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	3	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	3	3	100
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Yang ditindaklanjuti	100	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	100	100	100
	Fasilitasi kerjasama antar pemerintah	Jumlah laporan kerjasama antar pemerintah	1	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	1	1	100
	Fasilitasi kerjasama badan usaha/swasta	Jumlah laporan kerjasama antar badan usaha/swasta	1	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	1	1	100
	Evaluasi pelaksanaan kerjasama	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan kerjasama	1	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	1	1	100
BIRO HUKUM										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	PERMENDAGRI 90	12	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan / Kelengkapan Kantor yang diadakan	PERMENDAGRI 90	0	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana	PERMENDAGRI 90	12	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	PERMENDAGRI 90	15	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur	PERMENDAGRI 90	5	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	100	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran	PERMENDAGRI 90	4	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Anggaran	PERMENDAGRI 90	10	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Program Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah	Tercapainya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	100	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Perda Provinsi	Jumlah Perda yang di tetapkan	PERMENDAGRI 90	10	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Program Peningkatan Produk Hukum Daerah Provinsi	Persentase rancangan peraturan yang menjadi produk hukum	100	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur	Jumlah Hukum (Pergub/Keppub) Provinsi Yang ditetapkan	PERMENDAGRI 90	20	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase Informasi Hukum yang terdokumentasi dengan baik	100	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Peningkatan Jaringan Informasi Hukum dan Publikasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang di Publikasikan melalui website/JDIH	PERMENDAGRI 90	600	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang selaras dengan produk Daerah	100	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	Jumlah Produk hukum Kab/Kota yang di Fasilitasi, Evaluasi dan Klarifikasi/ Pengkajian	PERMENDAGRI 90	250	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Pelayanan Bantuan Hukum	Persentase Perkara/Kasus Sengketa Pemerintah Provinsi yang terselesaikan tepat waktu	100	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Peningkatan Palayanan Bantuan Hukum	Advice dan pertimbangan hukum Penyelesaian Sengketa yang diberikan kepada OPD/Masyarakat dengan cepat dan sesuai aturan yang berlaku	PERMENDAGRI 90	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Peningkatan Penyelesaian Sengketa	Terpenuhinya Kepuasan masyarakat terhadap Kepastian Hukum, penyelesaian Perkara dengan cepat	PERMENDAGRI 90	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Program Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM	Terwujudnya sadar hukum Aparatur dan Masyarakat	100	100	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM	Pembinaan Kab/Kota Peduli HAM dan Sadar akan Hukum dan HAM	PERMENDAGRI 90	10	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu		70,00%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu		100,00%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD		2	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD		2	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD		2	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja SKPD		2	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan		90%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Keuangan		12	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan SKPD		1	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu		100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek		4	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Administrasi Umum		12	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah laporan barang cetakan dan penggandaan		12	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi		12	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang		12	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat atau dokumen yang dikirim		1000	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dokumen jasa komunikasi		12	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Kategori Baik			PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan diperpanjang izinnya		10	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan		25	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti		80%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Prosentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti		80%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Sarana dan Prasarana Spiritual		1	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Bina Mental Spiritual		1	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Prosentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti		80%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		2	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan		1	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan									
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial		2	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Prosentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti		80%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata		3	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,		3	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Transmigrasi dan Tenaga Kerja								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan		3	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90			
BIRO PEREKONOMIAN										
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	60 Unit	24 Unit	12 Bulan	12 Bulan	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan / Kelengkapan Kantor yang dipelihara	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200 Kegiatan	80 Kegiatan	40 Kegiatan	40 Kegiatan	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
		jumlah kegiatan rapat koordinasi dan	200 Kegiatan	80 Kegiatan	40 Kegiatan	40 Kegiatan	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		konsultasi ke dalam daerah								
		jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	20 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Pertanian	Jumlah koordinasi pengembangan potensi ekonomi pertanian dalam arti luas	15 Kali	6 Kali	3 Kali	3 Kali	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Jumlah koordinasi pengembangan potensi ekonomi kelautan dan perikanan	5 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
	Koordinasi Peningkatan Ekonomi Kehutanan dan Perkebunan	jumlah koordinasi pengembangan potensi kehutanan dan perkebunan	5 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
			5 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
	Koordinasi Kebijakan Penanaman Modal, Perijinan dan Non Perijinan Daerah	Dokumen Kebijakan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Tata Kelola dan Kinerja BUMD	Jumlah koordinasi perusda dan lembaga keuangan	15 Kali	6 Kali	3 Kali	3 Kali	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
	Koordinasi Promosi Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah	Bahan Promosi Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
	Peningkatan Sinergi Kebijakan Perekonomian Daerah	Hasil Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	15 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Pariwisata dan Perhotelan	Koordinasi bidang pariwisata dan perhotelan	5 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
	Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Bidang Koperasi dan UKM	jumlah koordinasi dan pembinaan koperasi	10 Kali	4 Kali	2 Kali	2 Kali	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN										
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	25 Unit	10 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Kendaraan, alat kantor	75 Unit	30 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Belanja makanan dan minuman, Publikasi, Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah, Bimtek	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kontribusi BIMTEK	100 Kegiatan	40 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran	45 Dokumen	18 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	30 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
	Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah pengadaan langsung yang dilayani	3500 Pengadaan	1400 Pengadaan	700 Pengadaan	700 Pengadaan	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
		Jumlah pengadaan yang dilayani	2105 Pengadaan	842 Pengadaan	421 Pengadaan	421 Pengadaan	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
	Evaluasi dan Pembinaan SDM Pengadaan	Jumlah SDM Pokja yang mengikuti pembinaan/peningkatan kapasitas aparatur	25 Orang	10 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
	Pengembangan dan Layanan Sistem Informasi Pengadaan	Jumlah pengadaan elektronik yang dilayani	2105 Paket	842 Paket	421 Paket	421 Paket	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
	Monitoring dan Evaluasi APBD	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	60 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
	Monitoring dan Evaluasi Sektoral	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	15 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program/Kegiatan Sektoral								
	Administrasi dan Evaluasi Pembangunan	jumlah dokumen evaluasi pelaporan pembangunan	15 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan	Dokumen Rakor Administrasi Pembangunan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
	Perencanaan dan Pengendalian Program	Rencana Kerja Anggaran yang diasistensi dalam 1 tahun	230 RKA	92 RKA	46 RKA	46 RKA	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
		Dokumen Pelaksanaan Anggaran pergeseran yang difasilitasi	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
		Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Rencana Kerja Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Yang Disusun	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
	Pengembangan Kebijakan Program Pembangunan	Dokumen Laporan Setda	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase kualitas Pemerintahan Daerah	90					90	90	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya laporan keuangan yang akuntabel	90					90	90	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	12		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	12	12	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas pegawai	80		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	80	80	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas untuk ASN	50		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	50	50	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan	10		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	10	10	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Sosialisasi	12		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	12	12	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Administarsi Umum	90		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	90	90	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor untuk meningkatkan kinerja Pegawai	20		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	20	20	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan dan Kebijakan	50		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	50	50	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	40		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	40	40	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	meningkatnya pelayanan kantor	85		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	85	85	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kerja	10		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	10	10	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningatnya pelayanan Administarsi Umum	85		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	85	85	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat	1		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	1	1	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi/Internet yang tersedia	12		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	12	12	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	12	12	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	85		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	85	85	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	3		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	3	3	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	6		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	6	6	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Operasional atau Lapangan									
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Kelengkapan Kerja	50		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	50	50	
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa	100		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	100	100	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	98		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	98	98	
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan strategi pengadaan yang barang dan jasa yang dilaksanakan	12		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	12	12	
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa tender dan non tender	2		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	2	2	
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan monitoring pengadaan barang dan jasa	2		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	2	2	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	95		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	95	95	
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Layanan LPSE	700		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	700	700	
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa (3 Sistem)	3		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	3	3	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah informasi yang dilayani	12		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	12	12	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan kepada Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	80		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	80	80	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM yang diberi Pembinaan	50		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	50	50	
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan	11		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	11	11	
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan	8		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	8	8	
BIRO ORGANISASI										
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	PERMENDAGRI 90	90%						
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Laporan Administrasi Perkantoran	PERMENDAGRI 90	23	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	PERMENDAGRI 90	3 Unit	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	PERMENDAGRI 90	2	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan / Kelengkapan Kantor yang dipelihara	PERMENDAGRI 90	2	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	PERMENDAGRI 90	85%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi yang telah dilakukan	PERMENDAGRI 90	1	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang telah mengikuti bimbingan teknis/diklat	PERMENDAGRI 90	5	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase PD yang telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	PERMENDAGRI 90	61%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Penerapan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Survey	PERMENDAGRI 90	1	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
		Jumlah Laporan Hasil Survey yang direviu	PERMENDAGRI 90	1	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Peningkatan Tata Laksana Pelayanan Publik	Jumlah Nominasi	PERMENDAGRI 90	3	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN SETDA	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan sesuai aturan	PERMENDAGRI 90	100%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Penataan Administrasi Kepegawaian Setda	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Setda	PERMENDAGRI 90	1	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	PROGRAM PENINGKATAN REFORMASI BIROKRASI	Nilai Reformasi Birokrasi	PERMENDAGRI 90	68,10	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	PERMENDAGRI 90	1	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
		Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	PERMENDAGRI 90	1	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang difasilitasi pembentukan kelompok Budaya Kerja	PERMENDAGRI 90	38	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
		Laporan hasil evaluasi dan penilaian penerapan budaya kerja	PERMENDAGRI 90	1	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
		Dokumen Hasil Evaluasi dan Penilaian Penerapan Budaya Kerja	PERMENDAGRI 90	1	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang memperoleh predikat minimal B (BAIK)	PERMENDAGRI 90	78,38%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim	PERMENDAGRI 90	1	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Laporan Kinerja Setda Prov. Kaltim	PERMENDAGRI 90	0	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
		Laporan Fasilitas Evaluasi AKIP	PERMENDAGRI 90	1	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
		Pergub Penyusunan Indikator Kinerja Utama	PERMENDAGRI 90	1	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
		Pergub Penyusunan Petunjuk Teknis PK dan LKJP	PERMENDAGRI 90	1	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
		Laporan Capaian Kinerja berdasarkan PK	PERMENDAGRI 90	1	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
		Jumlah PD yang terfasilitasi pelaksanaan SAKIP	PERMENDAGRI 90	38	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	Prosentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan NSPK	PERMENDAGRI 90	90%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
		Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi kelembagaan	PERMENDAGRI 90	38	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
		Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi kelembagaan	PERMENDAGRI 90	38	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
		Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi/evaluasi kelembagaan	PERMENDAGRI 90	38	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Penguatan Kelembagaan	Kab/Kota yang dilakukan Fasilitas kelembagaanya	PERMENDAGRI 90	10	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perangkat Daerah Kab/Kota									
		Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penguatan kelembagaan	PERMENDAGRI 90	10	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Laporan Analisis Jabatan	PERMENDAGRI 90	0	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
		Laporan Analisis Beban Kerja	PERMENDAGRI 90	0	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
		Dokumen Analisis Jabatan yang disusun	PERMENDAGRI 90	1	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
		Dokumen Analisis Beban Kerja yang disusun	PERMENDAGRI 90	1	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA PEMERINTAHAN	Persentase Perangkat Daerah yg telah Menyusun SOP Sesuai Ketentuan / Aturan	PERMENDAGRI 90	63,04%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
	Peningkatan Tata Laksana Pemerintahan	Laporan SOP	PERMENDAGRI 90	1	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
		Laporan Evaluasi	PERMENDAGRI 90	1	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		
		Jumlah SOP Perangkat Daerah yang diverifikasi	PERMENDAGRI 90	1840	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BIRO UMUM										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PERMENDAGRI 90	81	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90				
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	PERMENDAGRI 90	24	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Keterpenuhan Sarana & Prasarana	PERMENDAGRI 90	81	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90				
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana & Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang memadai	PERMENDAGRI 90	2	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90				
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang terpelihara	PERMENDAGRI 90	24	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90				
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Biro Umum	PERMENDAGRI 90	70	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90				
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat dan Koordinasi dalam dan luar daerah	PERMENDAGRI 90	90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90				
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi	PERMENDAGRI 90	380	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun	PERMENDAGRI 90	95	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	PERMENDAGRI 90	20	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90				
	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen pengendalian dan Evaluasi penyelenggaraan kegiatan	PERMENDAGRI 90	36	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90				
	Program Pelayanan Tata Usaha Umum	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum	PERMENDAGRI 90	81	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90				
	Pelayanan Administrasi Biro	Jumlah PNS	PERMENDAGRI 90	380	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90				
	Pengelolaan Arsip dan Dokumen Setda	Jumlah Arsip/Dokumen Evaluasi Inaktif yang telah ditata dengan baik	PERMENDAGRI 90	6000	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90				
	Pelayanan Tata Usaha Pimpinan	Jumlah Surat Pimpinan yang terdistribusi dengan Baik	PERMENDAGRI 90	3000	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90				
	Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda	Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda	PERMENDAGRI 90	12	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90				

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelayanan Verifikasi dan Pelaporan Keuangan Setda	Jumlah Bulan Verifikasi dan Pelaporan Keuangan Setda	PERMENDAGRI 90	12	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90				
	Program Pelayanan Sarana Prasarana Rumah Tangga Setda	Persentase Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Rumah Tangga Setda	PERMENDAGRI 90	81	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90				
	Pengelolaan Barang Aset Setda	Jumlah Gedung yang Terpelihara dengan Baik	PERMENDAGRI 90	12	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90				
	Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pimpinan yang terlaksana dengan Baik	PERMENDAGRI 90	190	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90				
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN										
	Meningkatnya kualitas koordinasi Peembangunan	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	PERMENDAGRI 90	90%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90	90%	100
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan PD (SKM)	PERMENDAGRI 90	90%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90	90%	100
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkkantoran	PERMENDAGRI 90	12 Bulan	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90	12 Bulan	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	PERMENDAGRI 90	3 Unit	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90	3 Unit	100
	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan yang dipelihara	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90		
	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	PERMENDAGRI 90	85%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90	85%	100
	koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi yang telah dilakukan	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90		
	Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang telah mengikuti bimbingan Teknis/diklat	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90		
		Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis keuangan di lingkungan setda	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90		
	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas kinerja PD	PERMENDAGRI 90	74%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90	74%	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90		

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Peningkatan dan Pembinaan Kerjasama	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	PERMENDAGRI 90	90%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90	90%	100
	Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah	laporan kerjasama dengan lembaga non pemerintah	PERMENDAGRI 90	22 Laporan	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90	22 Laporan	100
	Peningkatan dan Pembinaan Administrasi Kerjasama	Jumlah Administrasi kerjasama yang terdokumentasi	PERMENDAGRI 90	22 Laporan	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90	22 Laporan	100
	Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	laporan kerjasama antar pemerintah	PERMENDAGRI 90	22 Laporan	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90	22 Laporan	100
	Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan	Persentase Penurunan Berita Negatif	PERMENDAGRI 90	5%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90	5%	100
	Kerjasama Media	Jumlah jaringan kehumasan yang dilaksanakan	PERMENDAGRI 90	20 Media Massa	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90	20 Media Massa	100
	Penyelenggaraan Peliputan dan Publikasi	Jumlah Berita Positif yang terpublikasi	PERMENDAGRI 90	1000 Berita	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90	1000 Berita	100
	Penyediaan data dan informasi	Jumlah pengumpulan dan penyediaan data dan informasi	PERMENDAGRI 90	22 sistem	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90	22 sistem	100
	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Persentase pelayanan Keprotokolan sesuai dengan SOP Keprotokolan	PERMENDAGRI 90	90%	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90	90%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelayanan Tamu dan Pimpinan Keprotokolan	Jumlah Tamu Pemda	PERMENDAGRI 90	90 Instansi	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90	90 Instansi	100
	Penatacaraan kegiatan Pemda	Jumlah Kepenatacaraan kegiatan pemda yang terjadwalkan	PERMENDAGRI 90	100 Kegiatan	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90		PERMENDAGRI 90	100 Kegiatan	100
BIRO INFRASTRUKTUR										
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%			
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	70 Kegiatan	28 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100%			
	Koordinasi Pengembangan Bidang Perhubungan	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Perhubungan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
	Koordinasi Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Pekerjaan umum	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
	Koordinasi Pengembangan Bidang Perumahan dan Permukiman	Jumlah Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Permukiman	20 Kali	8 Kali	4 Kali	4 Kali	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Permukiman	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
	Koordinasi Kebijakan Kawasan Industri	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Kawasan Industri	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
	Koordinasi Pengembangan Kawasan	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
	Koordinasi Kebijakan Perencanaan Daerah	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Perencanaan Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Energi	Data Infrastruktur Energi Kalimantan Timur	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Dokumen hasil koordinasi kebijakan pengembangan energi	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Mineral	Data Pengembangan Sumber Daya Mineral	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Dokumen hasil koordinasi kebijakan Pengembangan Sumber Daya Mineral	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			

Sumber: kompilasi data biro-biro di lingkup Setda Prov. Kaltim

2.2 Analisis Kinerja Layanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilihat berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan, pembinaan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah, dan dapat digambarkan dengan indikator-indikator sebagai ukuran.

Secara sederhana untuk mengukur Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut, dapat diidentifikasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur seperti Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP-nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK)					77	79	81	74	75,67	79	81	
2	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)					92	95	97	87	92	95	97	
3	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)					71	79	89	61	86,67	79	89	
4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%)					78,95	89,47	90,00	63,04	63,04	88,88	90,00	

Sumber: P-RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 dan Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim

Analisis terhadap pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Perangkat Daerah nilai SAKIPnya memperoleh predikat minimal Baik

Realisasi capaian tahun 2021 adalah 75,67 dengan perhitungan bahwa dari 37 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 28 Perangkat Daerah minimal mendapat nilai SAKIP memperoleh predikat minimal B, dengan 18 Perangkat Daerah memperoleh predikat BB dan 10 Perangkat Daerah memperoleh Nilai B. Perangkat Daerah tersebut sebagaimana terlampir.

Pencapaian ini meningkat dari pencapaian tahun 2020 yaitu 74 sehingga untuk tahun 2021 terjadi peningkatan 1,67 %, meskipun pencapaian masih dibawah target Renstra yaitu 77.

Adapun penyebab pencapaian dibawah target Renstra, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Lemahnya perencanaan pada Perangkat Daerah yang berbasis data kinerja yang benar-benar akurat dan valid.
2. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran belum benar-benar optimal.
3. Adanya COVID-19.
4. Penerapan Permendagri 56 Tahun 2019 sehingga ada perubahan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berjalan dipertengahan tahun.

Terhadap beberapa hal tersebut telah dilakukan reuiu Renstra oleh sejumlah Perangkat Daerah namun tidak serta merta dapat mengubah perencanaan, terlebih yang berkaitan dengan RPJMD.

2. Indikator Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)

Target RPJMD untuk Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Pedoman dari Kementerian Teknisnya tahun 2021 adalah sebesar 92%. Jika dilihat dari capaian realisasinya, dapat dikatakan telah sesuai dan telah mencapai target yaitu 92%.

Dari 37 Perangkat Daerah yang ada, 34 Perangkat Daerah yang telah sesuai NSPKnya, khususnya terkait dengan penataan kelembagaan badan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Indikator Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

- Hasil Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan SKM Tahun 2021 sebesar:

$$\frac{86,67}{71} \times 100 = 122,07\%$$
- Dari jumlah 45 Perangkat Daerah yang mengumpulkan SKM berjumlah 39 Perangkat Daerah.
- Jika dibandingkan dengan tahun 2020, Perangkat Daerah yang melaksanakan SKM berjumlah 24 Perangkat Daerah dari 45 Perangkat Daerah dengan capaian

$$\frac{24}{45} \times 100 = 53,33 \%$$
- Peningkatan Persentase capaian tahun 2020 sebesar 53,33% dan tahun 2021 sebesar 122,07%, sehingga terjadi peningkatan sebesar 68,74%.
- Adapun kegiatan yang dilakukan terhadap pembinaan SKM tahun 2021 adalah:
 - Kegiatan peningkatan kapasitas SKM;
 - Kegiatan fasilitasi dan asistensi SKM;
 - Kegiatan evaluasi/reviu SKM.

4. Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%)

Pada tahun 2020 ditargetkan terdapat 31 dari 46 perangkat daerah termasuk biro-biro di lingkungan Setda telah menyusun SOP sesuai ketentuan, jika dipersentasekan adalah sebesar 68,42%. Namun, setelah dilakukan evaluasi terdapat sebanyak 29 dari 46 perangkat daerah termasuk biro-biro di lingkungan Setda yang telah menyusun SOP sesuai ketentuan, jika dipersentasekan adalah sebesar 63,04%.

Terdapat selisih kurang antara realisasi capaian dengan target yaitu sebesar 5,38%.

Pada tahun 2021 ditargetkan terdapat 35 dari 45 perangkat daerah termasuk biro-biro di lingkungan Setda telah menyusun SOP sesuai ketentuan, jika dipersentasekan adalah sebesar 78,95%. Namun, setelah dilakukan evaluasi terdapat sebanyak 28 dari 45 perangkat daerah termasuk biro-biro di lingkungan Setda yang telah menyusun SOP sesuai ketentuan, jika dipersentasekan adalah sebesar 63,04%.

Terdapat selisih kurang antara realisasi capaian dengan target yaitu sebesar 15,91%.

Pada tahun 2022 ditargetkan terdapat 40 dari 45 perangkat daerah termasuk biro-biro di lingkungan Setda telah menyusun SOP sesuai ketentuan, jika

dipersentasekan adalah sebesar 89,47%. Diproyeksikan untuk realisasi capaian pada tahun 2022 adalah sebanyak 39 dari 45 perangkat daerah termasuk biro-biro di lingkungan Setda telah menyusun SOP sesuai ketentuan, atau jika dipersentasekan adalah sebesar 88,88%.

Agar dapat mencapai target dan realisasi sesuai proyeksi, maka akan dilakukan paparan terhadap hasil evaluasi SOP perangkat daerah pada tahun 2021, agar perangkat daerah dapat memperbaiki dokumen SOP yang telah disusun sesuai dengan ketentuan.

Uraian dibawah ini merupakan tambahan analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan biro-biro pemangku:

A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

➤ Permasalahan yang dihadapi:

- Terkait pengumpulan data dukung dari Perangkat Daerah, masih banyak yang belum maksimal dan terlambat mengumpulkan data dukung yang diperlukan dalam pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Provinsi kaltim;
- Terkait pengumpulan data dukung dari Kabupaten/Kota, masih banyak yang belum maksimal dan terlambat mengumpulkan data dukung yang diperlukan dalam pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Kabupaten/Kota;
- Kurangnya pengetahuan terhadap berkas-berkas yang dipersyaratkan;
- Berkas usulan PAW yang disampaikan kepada Gubernur tidak lengkap dan tidak sesuai yang dipersyaratkan;
- Lemahnya pembinaan, pengawasan dan inovasi terhadap penyelenggara pemerintahan;
- Kurangnya koordinasi antar lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Adanya kepentingan-kepentingan politik terhadap usulan pemekaran wilayah;
- Kurangnya perhatian dari pemangku kepentingan/pengambil kebijakan di daerah tentang pentingnya pembakuan nama rupabumi;
- Perbedaan dasar-dasar yang digunakan dalam penarikan batas;
- Petunjuk teknis pengganti PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang pembentukan DOB sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 sampai saat ini masih dalam

pembahasan di pusat. Sehingga sebagai tindaklanjut untuk kelengkapan syarat masih menggu pengganti PP tersebut;

- Keterbatasannya anggaran baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - Terbatasnya informasi dan narasumber dari penduduk setempat serta jauhnya lokasi;
 - Beberapa Kabupaten/Kota meminta pembahasan kembali kesepakatan batas yang telah disepakati;
 - Belum tercapainya kesepakatan batas dikarenakan menunggu kesepakatan antara kampung yang berbatasan langsung;
 - Beratnya medan yang harus dilalui untuk penarikan batas;
 - Penanganan konflik dan tuntutan yang belum maksimal;
 - Masalah konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten/Kota antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan perusahaan, pemerintah dengan masyarakat, perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat. Pemerintah, perusahaan dan masyarakat;
 - Penanganan trantibmas belum optimal seperti penanganan unjuk rasa dan penanganan konflik sosial dan belum adanya protap yang bersinergi.
- Solusi atas permasalahan yang di hadapi:
- Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah pengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk meningkatkan pemahaman terkait pengisian IKK LPPD Provinsi Kaltim dalam rangka percepatan penyampaian data dukung dan penunjang IKK LPPD;
 - Melakukan pendampingan melalui monitoring dalam penyusunan LPPD Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pemagaman terkait dengan pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK);
 - Koordinasi dengan Tim Nasional (Kemendagri) terkait pelaksanaan Bimtek Penyusunan LPPD sesuai Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan oleh Kemendagri berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - Untuk meningkatkan pelayanan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait usulan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD telah dibuat Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (SIKAD);

- Mensosialisasikan terkait pemenuhan persyaratan usulan kelengkapan dokumen administrasi Kepala Daerah dan DPRD sebagai berikut:
 - Usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - Usulan pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota;
 - Usulan lainnya untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD dalam aplikasi system informasi administrasi kepala daerah dan DPRD (SIKAD).
- Melaksanakan koordinasi pemenuhan persyaratan usulan kelengkapan dokumen administrasi Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD yang belum lengkap dan *upload* dokumen kembali pada SIKAD;
- Mengirim pdf kekurangan berkas melalui email dengan catatan menyerahkan berkas asli pada saat mengambil salinan SK Gubernur tentang PAW, persyaratan berkas dibuat SOP sebagai landasan pengusulan diperlukan tindaklanjut untuk memenuhi dengan mengkoordinasikan kepada Bupati/Walikota untuk melengkapi dan memperbaiki;
- Meningkatkan kompetensi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta melakukan komunikasi antarsubstansi agar dapat terwujud dengan baik;
- Meningkatkan koordinasi antar lembaga dan membangun komunikasi yang baik;
- Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota terhadap usulan pemekaran, pentingnya pembakuan nama rupabumi dan dasar-dasar yang digunakan dalam penarikan batas;
- Daerah yang sudah diusulkan untuk pemekaran diminta untuk membenahi tata batas;
- Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pembakuan nama rupabumi kepada pemangku kepentingan/pengambil kebijakan di daerah;
- Melakukan komunikasi yang intensif antara Tim Kerja PNR Provinsi dengan Tim Kerja PNR Kab/Kota;
- Melakukan fasilitasi pertemuan Tim PBD Kabupaten/Kota dengan membawa kajian masing masing;
- Melakukan peninjauan langsung kelapangan terkait dengan kesepakatan antar kampung bersama dengan Tim PBD Kabupaten/Kota;
- Melakukan koordinasi yang rutin ke Tim PBD Kabupaten/Kota;

- Melakukan metode penarikan batas secara kartometrik;
- Berkoordinasi dengan instansi terkait penanganan konflik dan tuntutan dari masyarakat serta memberikan arahan kepada kab/kota tentang SOP penanganan konflik;
- Mengacu pada aturan penanganan masalah pertanahan sesuai PP No. 38/2007 pada Kabupaten/Kota, sedangkan provinsi hanya menangani jika permasalahan Kabupaten/Kota, namun kenyataannya permasalahan yang ditangani Provinsi sebagian besar ada didalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- Melakukan koordinasi dengan aparaturnya antar instansi terkait.

2. Biro Kesejahteraan Rakyat

- Permasalahan yang dihadapi:

Permasalahan dari sisi Sasaran

- Belum maksimalnya koordinasi dalam rangka pencapaian sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat baik dilingkungan SKPD Pemprov. Kaltim dan Kabupaten/Kota;
- Belum tersedianya kesatuan data dan informasi bidang kesejahteraan rakyat dengan baik;
- Belum optimalnya peran Biro Kesra dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah dibidang kesejahteraan rakyat;
- Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya.

Permasalahan dari sisi Kegiatan/Sub Kegiatan

- Belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi dalam rangka penyiapan bahan kebijakan Bina Mental dan Spiritual Pemprov. Kaltim dan Kabupaten/Kota;
- Belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi dalam rangka penyiapan bahan kebijakan Sarana dan Prasarana Spiritual;
- Belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi dalam rangka penyiapan bahan kebijakan Kelembagaan Bina Spiritual;
- Belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi dalam rangka penyiapan bahan kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Pemprov. Kaltim dan Kabupaten/Kota;
- Belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi dalam rangka penyiapan bahan kebijakan Pendidikan;
- Belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi

- dalam rangka penyiapan bahan kebijakan Kesehatan;
- Belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi dalam rangka penyiapan bahan kebijakan Sosial;
 - Belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi dalam rangka penyiapan bahan kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Pemprov. Kaltim dan Kabupaten/Kota;
 - Belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi dalam rangka penyiapan bahan kebijakan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
 - Belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi dalam rangka penyiapan bahan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - Belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi dalam rangka penyiapan bahan kebijakan Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan.
- Solusi atas permasalahan yang di hadapi:
- Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dalam rangka pencapaian sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat baik dilingkungan SKPD Pemprov. Kaltim dan Kabupaten/Kota;
 - Mengupayakan kesatuan data dan informasi bidang kesejahteraan rakyat dengan baik;
 - Mengoptimalkan peran Biro Kesra dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah dibidang kesejahteraan rakyat;
 - Meningkatkan ekektifitas sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya;
 - Meningkatkan pelaksanaan koordinasi, Pengendalian dan evaluasi dalam rangka penyiapan bahan kebijakan Bina Mental dan Spiritual Pemprov. Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota;
 - Meningkatkan pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi dalam rangka penyiapan bahan kebijakan Sarana dan Prasarana Spiritual;
 - Meningkatkan Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi dalam rangka penyiapan bahan kebijakan Kelembagaan Bina Spiritual;
 - Meningkatkan pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi dalam rangka penyiapan bahan kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan

- Dasar Pemprov. Kaltim dan Kabupaten/Kota;
- Meningkatkan pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi dalam rangka penyiapan bahan kebijakan Pendidikan;
 - Meningkatkan pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi dalam rangka penyiapan bahan kebijakan Kesehatan;
 - Meningkatkan pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi dalam rangka pencapaian sasaran Bidang Perpustakaan dan Kearsipan baik dilingkungan SKPD Pemprov. Kaltim dan Kabupaten/Kota;
 - Meningkatkan pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi dalam rangka penyiapan bahan kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Pemprov. Kaltim dan Kabupaten/Kota;
 - Meningkatkan pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi dalam rangka penyiapan bahan kebijakan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
 - Meningkatkan pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi dalam rangka penyiapan bahan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - Meningkatkan pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi dalam rangka penyiapan bahan kebijakan Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan.

3. Biro Hukum

- Permasalahan yang dihadapi:
 - Penyusunan Peraturan dan Keputusan Gubernur memerlukan proses atau waktu yang sangat panjang dikarenakan perlu harmonisasi antar instansi terkait dalam rangka pematangan materi dan pemahaman;
 - Perangkat Daerah Kurang Memahami Prosedur Pembentukan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
 - Penyusunan Peraturan Daerah memerlukan waktu yang sangat panjang dan perlu Kajian Naskah Akademik;
 - Perangkat Daerah kurang memahami tatacara penyusunan Peraturan Daerah;
 - Kurangnya Koordinasi dari Instansi terhadap Penyelesaian Perkara/Kasus yang dihadapi sehingga penyelesaian hukum tidak maksimal;

- Penyelesaian bantuan hukum memerlukan waktu yang cukup panjang terkait Pencarian data sebagai bukti yang sah di pengadilan;
 - Banyaknya laporan perkara sengketa hukum kabupaten/kota atau masyarakat yang masuk ke biro hukum;
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RANHAM Kabupaten/Kota belum maksimal;
 - Penyuluhan Hukum belum terlaksana dengan maksimal;
 - Belum Optimalnya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah;
 - Belum Optimalnya Pendokumentasian dan Jaringan Informasi Hukum yang baik;
 - Penyusunan Produk Hukum Daerah Khususnya di kabupaten/Kota belum terlaksana dengan baik;
 - Belum Optimalnya Pengawasan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah Kab/Kota.
- Solusi atas permasalahan yang di hadapi:
- Menodorong pemprakarsa untuk memprioritaskan penyusunan Peraturan dan Keputusan Gubernur;
 - Perlunya Bimbingan Teknis tentang penyusunan Peraturan dan Keputusan Gubernur;
 - Perlunya Sosialisasi Tata cara Penyusunan Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Perlunya Bimbingan Teknis legal drafting tentang penyusunan Peraturan Daerah;
 - Laporan seluruh unit Perangkat Daerah yang mempunyai permasalahan Perkara/sengketa dapat diselakan dengan baik;
 - Koordinasi yang optimal dengan instansi terkait bukti-bukti Perkara/Kasus untuk di persidangan;
 - Melakukan Koordinasi dengan Bagian Hukum Kab/Kota untuk diselesaikan di masing-masing kab/kota;
 - Perlu adanya peranan panitia RANHAM Provinsi Kalimantan Timur untuk memonitoring pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat dengan melibatkan instansi/aparat penegak hukum;
 - Diperlukan peningkatan dan pengembangan metode teknis penyuluhan hukum sesuai dengan dengan kondisi sosial masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat;

- Melakukan Koordinasi terhadap Jaringan dan Informasi Hukum dengan instansi terkait;
- Membentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Membentuk Tim Pengkajian dan Pengawasan kebijakan dan Tim Pengawasan Produk Hukum Daerah;
- Melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Kab/Kota.

B. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

1. Biro Perekonomian

- Permasalahan yang dihadapi:
 - Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah adalah melakukan upaya pengendalian inflasi agar tetap rendah dan stabil, sehingga perekonomian daerah tetap tumbuh melalui; menjaga ketersediaan pasokan barang strategis (bahan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya), menjaga keterjangkauan harga, menjaga kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian inflasi adalah; Belum tersedianya data stok/pasokan yang akurat antara provinsi dan kabupaten kota khususnya untuk komoditas penyumbang inflasi di Kaltim, Kurang memadainya infrastruktur di beberapa Kabupaten di Kaltim mengakibatkan distribusi barang terkendala, Belum terjalinnya komunikasi yang efektif antar pihak terkait dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - Belum sinkronnya data antara provinsi dengan kabupaten/kota terkait dengan koperasi (aktif/tidak aktif), data UMKM produktif di Kaltim yang dapat berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - Untuk pengembangan industri di Kaltim masih mengalami kendala antara lain; belum memadainya infrastruktur, belum tersedianya data pasokan komoditi unggulan masing-masing daerah Kabupaten/Kota yang merupakan bahan baku industry;
 - Untuk sektor pertambangan; mengingat kewenangan sektor pertambangan berada di Pemerintah Pusat mengakibatkan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalami kendala dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
 - Terkait dengan kegiatan FCPF telah berjalan namun masih diperlukan koordinasi yang lebih baik/intensif baik antar SKPD serta keterlibatan masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian hutan;
 - Dalam pengembangan BUMD di Kalimantan Timur masih menghadapi kendala antara lain; belum validnya data tentang potensi perekonomian,

- dukungan regulasi peraturan, data analisis finansial untuk para investor serta masih rendahnya keterlibatan/peran BUMD dalam event promosi;
- Untuk hal perkembangan bisnis, Manajemen BUMD di Kalimantan Timur dianggap masih lemah dibandingkan dengan pihak swasta, selain itu masih terkendala dari sisi modal untuk pengembangan usaha yang bersifat komersial di berbagai sektor termasuk sektor perbankan/PT. BPD Kaltimara yang pangsa pasar;
 - Adanya perubahan nomenklatur, khususnya di program/kegiatan Subbag. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Subbag. Energi dan Sumber Daya Air sehingga belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar pihak terkait.
- Solusi atas permasalahan yang di hadapi:
- Pengendalikan inflasi daerah agar tetap rendah dan stabil, diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 sehingga perlu dilakukan identifikasi potensi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi melalui Local Value Chain (LVC) dan menyusun Peta Jalan/Roadmap Pengendalian Inflasi yang menjadi pedoman dalam pengendalian inflasi daerah;
 - Optimalisasi koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas baik antar Pemerintah Pusat/TPIP, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak-pihak terkait/*stakeholder* melalui integrasi program yang berkaitan dengan upaya pengendalian inflasi;
 - Menggali potensi Kerjasama Antar Daerah khususnya daerah penghasil komoditi penyangga inflasi di Kaltim melalui komunikasi efektif guna pemenuhan kebutuhan bahan pokok masyarakat;
 - Diperlukan optimalisasi koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak-pihak terkait (Koperasi dan Pelaku UMKM);
 - Diperlukan optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendorong pembangunan kawasan industri di daerah;
 - Perlu ditingkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal pengawasan kegiatan pertambangan di Kalimantan Timur sehingga Pemerintah Daerah dapat melaksanakan tugas fungsinya, pengawasan di bidang pertambangan;
 - Dalam rangka percepatan program PCPF, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas serta sinergitas antar Lembaga pemangku kepentingan dalam rangka mendukung program PCPF;

- Dalam rangka upaya peningkatan kinerja BUMD guna mencapai hasil sesuai dengan perencanaan dan target maka telah dilaksanakan Penjaringan Badan Pengawas/Komisaris dan Direksi BUMD Tahun Anggaran 2020;
- Percepatan dukungan regulasi melalui Penetapan Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah terkait dengan pengembangan BUMD Kalimantan Timur di berbagai sektor;
- Optimalisasi koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas berbagai pihak melalui rapat koordinasi, sosialisasi baik di jajaran Pemerintah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun himpunan/asosiasi terkait dengan pengembangan BUMD;
- Diperlukan koordinasi yang intensif antar pihak terkait baik dilingkungan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka fasilitasi kebijakan pemerintah tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan kebijakan pemerintah tentang pengelolaan Energi dan Sumber Daya Air di Kalimantan Timur.

2. Biro Administrasi Pembangunan

- Permasalahan yang dihadapi:
 - Keterbatasan SDM;
 - Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung;
 - Belum optimalnya koordinasi administrasi pembangunan antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
 - Belum optimalnya kompetensi di bidang monev/pengendalian administrasi dan evaluasi pembangunan.
- Solusi atas permasalahan yang di hadapi:
 - Pengusulan penambahan SDM yang berkompeten melalui penempatan SDM oleh Badan Kepegawaian Daerah;
 - Penambahan prasarana dan sarana pendukung;
 - Mengoptimalkan rapat koordinasi administrasi pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Perlu peningkatan SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

- Permasalahan yang dihadapi:

- Proses pengadaan barang dan jasa memakan waktu yang lama dikarenakan kurangnya tata kelola pengadaan dan perubahan peraturan yang sangat cepat atau dinamis;
 - Terbatasnya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa yang memiliki kompetensi pengelolaan PBJ;
 - Terbatasnya jumlah ASN sebagai *sporting* Administrasi Non Kelompok Kerja yang mempunyai kompetensi sesuai tupoksi bagian Advokasi dan PSDM BJP;
 - Tidak adanya Kasubbag yang membidangi keTatausahaan sehingga beban kerja menumpuk pada Kasubbag Pembinaan SDM.
- Solusi atas permasalahan yang di hadapi:
- Perlu disusun rencana oprasional koordinasi yang efektif, efisien dan terukur;
 - Perlu dilakukan penambahan SDM Pengadaan Barang dan Jasa yang sesuai tupoksi pada PBJ.

C. Asisten Administrasi Umum

1. Biro Organisasi

- Permasalahan yang dihadapi:
- Perangkat Daerah belum sepenuhnya memahami secara baik tentang pelaksanaan Evaluasi Kematangan organisasi;
 - Rekomendasi yang dikeluarkan terhadap Kab/Kota belum tepat waktu;
 - Belum memahami tentang Anjab dan ABK;
 - Tidak terimplementasinya SOP di Perangkat Daerah;
 - Belum optimalnya Laporan Kinerja sesuai ketentuan;
 - Belum memahami substansi tentang RB;
 - Belum memahami substansi tentang Budaya Kerja;
 - Kurangnya koordinasi;
 - Sebagian besar UPP belum menerapkan Standar Pelayanan;
 - Belum seluruhnya Unit Layanan melakukan survey;
 - Belum seluruhnya Unit Layanan mengikuti inovasi pelayanan.
- Solusi atas permasalahan yang di hadapi:
- Melakukan Fasilitasi/Sosialisasi/Asistensi pelaksanaan Evaluasi penataan Kelembagaan dan Kematangan Organisasi Perangkat Daerah;
 - Data Pendukung dari Kab/Kota harus lengkap;
 - Melakukan Bimtek secara intensif;

- Melakukan monitoring dan evaluasi SOP;
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja terhadap Perangkat Daerah dan Kab/Kota;
- Penguatan Reformasi Birokrasi;
- Melakukan Monitoring dan evaluasi Budaya Kerja;
- Perlunya koordinasi yang lebih intens;
- Sosialisasi Standar Pelayanan;
- Monitoring dan evaluasi terhadap survey;
- Fasilitasi terhadap pengembangan inovasi pelayanan.

2. Biro Administrasi Pimpinan

➤ Permasalahan yang dihadapi:

- Perubahan nomenklatur dalam rangka penerapan Permendagri 56 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 sehingga ada perubahan tugas dan fungsi pada Biro Adpim yang dilaksanakan pada dipertengahan tahun, yang tidak diikuti dengan kesiapan anggarannya;
- Staf Perencanaan dan Staf Kepegawaian yang belum memiliki wawasan tentang Sub Bidang yang baru digelutinya;
- Kurangnya tehnikal skill bagian MKP untuk menepis isu berita negatif;
- Disparitasitas regional Kaltim yang berdampak terhadap News values;
- Belum idealnya sarana dan prasarana penunjang;
- Kualitas SDM yang belum ideal di beberapa Subbagian;
- Banyaknya audiensi, kunjungan, pendampingan ke Ibu Kota Negara Baru;
- Banyaknya kegiatan dalam dan luar daerah yang di luar jam kerja;
- Pembiayaan pengawalan patroli pengawalan pejabat pusat dan kendaraan pejabat VIP;
- Banyaknya permohonan MC dan keprotokolan.

➤ Solusi atas permasalahan yang di hadapi:

- Perlu peningkatan SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
- Perlu penambahan anggaran Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
- Perlu dibuatkan link/aplikasi Kepegawaian yang memudahkan dalam percepatan Kenaikan Pangkat, Berkala dan urusan Kepegawaian lainnya.
- Peningkatan interaksi positif ke media massa;
- Mengadakan Sarana dan Prasana penunjang yang ideal;
- Diadakannya bimtek keprotokolan, MKP, serta penambahan anggaran kegiatan keprotokolan dan MKP untuk mendukung pendampingan kunjungan ke IKN;

- Support dan pembiayaan pengawalan patroli pengawalan pejabat pusat dan kendaraan pejabat VIP;
- Perlu dilaksanakan FGD secara rutin terhadap pengguna pelayanan Administrasi pimpinan.

3. Biro Umum

- Permasalahan yang dihadapi:
 - Kurangnya kualitas SDM yang melaksanakan pelayanan pada Biro Umum;
 - Kegiatan-kegiatan Pimpinan yang tidak terprediksi, yang sifatnya insidental sehingga memerlukan banyak revisi terhadap penganggaran;
 - Masih terdapat aset setda yang belum terinventarisir dengan baik;
 - Belum optimalnya penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada berbagai unit pelayanan;
 - Sistem regulasi Perencanaan dan Penganggaran yang sering berubah-ubah;
 - Kurangnya Pemahaman Pelaksana terkait Pelaksanaan Anggaran.
- Solusi atas permasalahan yang di hadapi:
 - Komitmen Pimpinan terhadap peningkatan Pelayanan di Biro Umum;
 - Pemberian Pendidikan Pelatihan tentang perencanaan, dan terkait dengan pelayanan pada Biro Umum;
 - Perlunya ruang Record Center untuk menyimpan arsip in aktif dalam jumlah besar;
 - Fleksibilitas anggaran untuk mengcover kebutuhan yang tidak dapat diprediksi.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Dalam menyelenggarakan tugas sesuai Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten yang masing-masing membawahi 3 (tiga) biro yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok Penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan hukum, pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum; dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, dan hukum;
- b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, dan hukum;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

1.1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok Penyiapan Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan kerja sama.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan kerja sama;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan kerja sama; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha.

Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pemerintahan, membawahkan:

- a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;

- b. Subbagian Pemerintahan Umum; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Sub Bagian sebagaimana di maksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.

- (1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan administrasi pemerintahan dan fasilitas penataan wilayah.
- (2) Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pemerintahan umum.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.

Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi Gubernur dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Otonomi Daerah, mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi Gubernur dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi Gubernur dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi Gubernur dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;

- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi Gubernur dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Otonomi Daerah, membawahi:

- a. Subbagian Administrasi Gubernur dan DPRD;
- b. Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Otonomi Daerah.

- (1) Subbagian Administrasi Gubernur dan DPRD mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan administrasi Gubernur dan DPRD.
- (2) Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan. Subbagian Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan kebijakan pengembangan wilayah.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kerjasama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Kerja Sama mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kerja Sama membawahi:

- a. Subbagian Kerja Sama antar Pemerintah;
- b. Subbagian Kerja Sama Badan Usaha/Swasta; dan
- c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja Sama.

- (1) Subbagian Kerja Sama antar Pemerintah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kerja sama antar Daerah.
- (2) Subbagian Kerja Sama Badan Usaha/Swasta mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan badan usaha/swasta maupun pihak ketiga.
- (3) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta.

1.2. Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di

bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan dibidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang agama dan kesehatan;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang kependudukan dan kesejahteraan sosial;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

- a. Bagian Bina Mental Spiritual;
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar; dan
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual serta kelembagaan bina spiritual.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual;

- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya, penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan biro.

Bagian Bina Mental Spiritual, membawahkan:

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Subbagian Sarana dan Prasarana Spiritual; dan
- c. Subbagian Kelembagaan Bina Spiritual.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Bina Mental Spiritual.

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.
- (2) Subbagian Sarana dan Prasarana Spiritual mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana spiritual.
- (3) Subbagian Kelembagaan Bina Spiritual mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kelembagaan bina spiritual.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar membawahi:

- a. Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I;
- b. Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II; dan
- c. Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.

- (1) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan.
- (2) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja.
- (3) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan

kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, statistik, perpustakaan, arsip dan perhubungan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan kebijakan Daerah di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, membawahkan:

- a. Subbagian Kesehatan;
- b. Subbagian Sosial; dan
- c. Subbagian Pendidikan.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.

- (1) Subbagian Kesehatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan.
- (2) Subbagian Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang sosial.
- (3) Subbagian Pendidikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan.

1.3. Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Hukum mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Hukum, membawahkan:

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi;
- b. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota; dan
- c. Bagian Bantuan Hukum.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum.

Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;

- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, membawahkan:

- a. Subbagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
- b. Subbagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan
- c. Subbagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi.

- (1) Subbagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyusunan produk hukum pengaturan.
- (2) Subbagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyusunan produk hukum penetapan.
- (3) Subbagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dokumentasi dan naskah hukum lainnya.

Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah wilayah I, produk hukum Daerah wilayah II dan produk hukum Daerah wilayah III.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah wilayah I, produk hukum Daerah wilayah II, dan produk hukum Daerah wilayah III;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah wilayah I, produk hukum Daerah wilayah II, dan produk hukum Daerah wilayah III;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang produk hukum Daerah wilayah I, produk hukum Daerah wilayah II, dan produk hukum Daerah wilayah III;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah wilayah I, produk hukum Daerah wilayah II dan produk hukum Daerah wilayah III; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, membawahkan:

- a. Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah I;
- b. Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah II; dan
- c. Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah III.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota.

- (1) Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan produk hukum Daerah wilayah I.
- (2) Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan produk hukum Daerah wilayah II.
- (3) Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah III mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan produk hukum Daerah wilayah III.

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan

Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, litigasi dan non litigasi dan hak asasi manusia.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, litigasi dan non litigasi dan hak asasi manusia;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, litigasi dan non litigasi dan hak asasi manusia;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, litigasi dan non litigasi dan hak asasi manusia;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Bantuan Hukum, membawahi:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Litigasi; dan
- c. Subbagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Bantuan Hukum.

- a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.
- b. Subbagian Litigasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan litigasi.
- c. Subbagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan non litigasi dan hak asasi manusia.

2. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah, penyusunan kebijakan Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta administrasi pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa dan administrasi pembangunan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa dan administrasi pembangunan;
- c. Penyusunan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, dan administrasi pembangunan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1. Biro Perekonomian

Biro Perekonomian mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, sumberdaya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Perekonomian, membawahi:

- a. Bagian Kebijakan Perekonomian;
 - b. Bagian Sumber Daya Alam; dan
 - c. Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.
- Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Perekonomian.

Bagian Kebijakan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Kebijakan Perekonomian mempunyai tugas:

- (1) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;
- (2) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;
- (3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha; dan
- (4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kebijakan Perekonomian, membawahkan:

- a. Subbagian Analisis Ekonomi Makro;
- b. Subbagian Analisis Ekonomi Mikro; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian.

- (1) Subbagian Analisis Ekonomi Makro mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan analisis ekonomi makro.

- (2) Subbagian Analisis Ekonomi Mikro mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan analisis ekonomi mikro.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.

Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air serta pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air.
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air.
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Sumber Daya Alam, membawahi:

- a. Sub Subbagian Sumber Daya Alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- b. Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup; dan
- c. Subbagian Sumber Daya Alam Energi dan Air.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sumber Daya Alam.

- (1) Sub Subbagian Sumber Daya Alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautanan dan perikanan.
- (2) Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pertambangan dan lingkungan hidup.
- (3) Subbagian Sumber Daya Alam Energi dan Air mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan sumber daya alam energi dan air.

Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi, dan Badan Layanan Umum Daerah serta pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, mempunyai tugas:

- a. penyiapan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi dan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi dan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi dan Badan Layanan Umum Daerah;

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian BUMD dan BLUD, membawahi:

- a. Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
- b. Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi; dan
- c. Subbagian Badan Layanan Umum Daerah.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

- (1) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha.
- (2) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Air, Minum, Limbah dan Sanitasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi.
- (3) Subbagian Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan badan layanan umum Daerah.

2.2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:

- a. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- c. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan pemantauan serta evaluasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa,

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa, membawahkan:

- a. Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- c. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa.

- (1) Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- (3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;

- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahkan:

- a. Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- b. Subbagian Pengembangan Sistem Informasi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

- (1) Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan sistem pengadaan secara elektronik.
- (2) Subbagian Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengembangan sistem informasi.
- (3) Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian

pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan sumber daya manusia dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa, serta tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan Sumber Daya Manusia dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan serta tata usaha;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan Sumber Daya Manusia dan pendampingan, konsultasi, dan/ataubimbingan teknis pengadaan barang dan serta tata usaha;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan Sumber Daya Manusia dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan serta tata usaha;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan Sumber Daya Manusia dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan serta tata usaha; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:

- a. Subbagian Pembinaan Sumber Daya Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Subbagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

- a. Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan,

pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan tata usaha.

- b. Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa.
- c. Subbagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pendampingan, konsultasi atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

2.3. Biro Administrasi Pembangunan

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Administrasi Pembangunan, membawahi:

- a. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- b. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; dan
- c. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara dan tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara dan tata usaha;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara dan tata usaha;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara dan tata usaha;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, membawahkan:

- a. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah;
- b. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara; dan
- c. Subagian Tata Usaha.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

- (1) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah.
- (2) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III.

Untuk Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I,

- pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
- (2) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
 - (3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III; dan
 - (4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, membawahkan:

- a. Subbagian Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I;
- b. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II; dan
- c. Subbagian Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah.

- (1) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I.
- (2) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II.

- (3) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III.

Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan Daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan kebijakan pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan Daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan kebijakan pembangunan Daerah;
- (2) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan Daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan kebijakan pembangunan Daerah;
- (3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis capaian kinerja pembangunan Daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan kebijakan pembangunan Daerah; dan
- (4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, membawahi:

- a. Subbagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah;
- b. Subbagian Pelaporan Pelaksanan Pembangunan Daerah; dan
- c. Subbagian Kebijakan Pembangunan Daerah.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

- (1) Subbagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan analisis capaian kinerja pembangunan.
- (2) Subbagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (3) Subbagian Kebijakan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembangunan Daerah.

3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan Daerah di bidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang, organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- e. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

3.1. Biro Organisasi

Biro Organisasi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja tatalaksana.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Organisasi mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tata laksana;
- (2) Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tata laksana;
- (3) Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- (4) Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tata laksana; dan
- (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Organisasi, membawahi:

- a. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja; dan
- c. Bagian Tata Laksana.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Organisasi.

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
- (2) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
- (3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;

- (4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan; dan
- (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahi:

- a. Sub Subbagian Kelembagaan Provinsi;
- b. Subbagian Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan
- c. Subbagian Analisis Jabatan.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan.

- (1) Sub Subbagian Kelembagaan Provinsi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kelembagaan provinsi.
- (2) Subbagian Kelembagaan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan Perumusan Kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kelembagaan kabupaten/kota.
- (3) Subbagian Analisis Jabatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan analisis jabatan.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- (2) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;

- (3) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- (4) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; dan
- (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, membawahi:

- a. Subbagian Reformasi Birokrasi;
- b. Subbagian Akuntabilitas Kinerja; dan
- c. Subbagian Budaya Kerja

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

- (1) Subbagian Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan reformasi birokrasi;
- (2) Subbagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja; dan;
- (3) Subbagian Budaya Kerja mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan budaya kerja.

Bagian Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik.

Bagian Tata Laksana mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik;

- (2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik;
- (3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik;
- (4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik; dan
- (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tata Laksana, membawahi:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Tata Laksana Pemerintahan; dan
- c. Subbagian Pelayanan Publik.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Laksana.

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.
- (2) Subbagian Tata Laksana Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata laksana pemerintahan.
- (3) Subbagian Pelayanan Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelayanan publik.

3.2. Biro Administrasi Pimpinan

Biro Administrasi Pimpinan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Biro Administrasi Pimpinan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol;

- b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Administrasi Pimpinan, membawahi:

- a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
- b. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan; dan
- c. Bagian Protokol.

Bagian sebagaimana masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, dan tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud, Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaporan, kepegawaian dan tata usaha;
- (2) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pelaporan, kepegawaian dan tatausaha; dan
- (3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, membawahi:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah.

- (1) Subbagian perencanaan dan pelaporan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pelaporan.
- (2) Subbagian kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan

koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kepegawaian.

- (3) Subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.

Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyiapan materi pimpinan, komunikasi pimpinan, publikasi dan dokumentasi pimpinan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 138, Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan materi pimpinan, komunikasi pimpinan, publikasi dan dokumentasi pimpinan;
- (2) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyiapan materi pimpinan, komunikasi pimpinan, publikasi dan dokumentasi pimpinan; dan
- (3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh biro administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:

- a. Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan;
- b. Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
- c. Subbagian Dokumentasi Pimpinan.

Sub Bagian sebagaimana di maksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan.

- (1) Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyiapan materi pimpinan.
- (2) Subbagian Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan komunikasi pimpinan.
- (3) Subbagian Dokumentasi Pimpinan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta

pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dokumentasi pimpinan.

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pemantauan dan evaluasi bidang acara, tamu dan hubungan keprotokolan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 142, Bagian Protokol, mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang acara, tamu, dan hubungan keprotokolan;
- (2) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang acara, tamu, dan hubungan keprotokolan; dan
- (3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh biro administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Protokol, membawahi:

- a. Subbagian Acara;
- b. Subbagian Tamu; dan
- c. Subbagian Hubungan Keprotokolan.

Sub Bagian sebagaimana di maksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol.

- (1) Subbagian Acara mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan acara.
- (2) Subbagian Tamu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporantamu.
- (3) Subbagian Hubungan Keprotokolan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan hubungan keprotokolan.

3.3. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset serta tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud Biro Umum mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset serta tatausaha;
- (2) penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset serta tata usaha; dan
- (3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Umum, membawahi:

- a. Bagian Rumah Tangga;
- b. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset; dan
- c. Bagian Tata Usaha.

Bagian-bagian sebagaimana di maksud dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum.

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur dan urusan dalam.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Bagian Rumah Tangga fungsi:

- (1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang urusanrumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur, dan urusan dalam;
- (2) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur dan urusan dalam; dan
- (3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Rumah Tangga, membawahi:

- a. Subbagian Urusan Rumah Tangga Gubernur;
- b. Subbagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan
- c. Subbagian Urusan Dalam.

Sub Bagian sebagaimana di maksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Rumah Tangga.

- (1) Subbagian Urusan Rumah Tangga Gubernur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan rumah tangga gubernur.

- (2) Subbagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan rumah tangga wakil gubernur.
- (3) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan dalam.

Bagian Administrasi Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keuangan dan verifikasi sekretariat Daerah, akuntansi dan penatausahaan aset Sekretariat Daerah, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset sekretariat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud Bagian Administrasi Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan verifikasi Sekretariat Daerah, akuntansi dan penatausahaan aset dan penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keuangan dan verifikasi Sekretariat Daerah, akuntansi dan penatausahaan aset, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, membawahi:

- a. Subbagian Kuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah;
- b. Subbagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah; dan
- c. Subbagian Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah.

Sub Bagian sebagaimana di maksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset.

- (1) Subbagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan verifikasi sekretariat Daerah.

- (2) Subbagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan akuntansi dan penatausahaan aset sekretariat Daerah.
- (3) Subbagian Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset sekretariat Daerah.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, pengelolaan kendaraan dan persuratan dan arsip.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakandi bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, pengelolaan kendaraan, dan persuratan dan arsip;
- (2) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan danstafahli, pengelolaan kendaraan dan persuratan dan arsip; dan
- (3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh biro umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tata Usaha, membawahi:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
- b. Subbagian Pengelolaan Kendaraan; dan
- c. Subbagian Persuratan dan Arsip.

Sub Bagian sebagaimana di maksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf ahli mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha pimpinan dan staf ahli.
- (2) Subbagian Pengelolaan Kendaraan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta

pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kendaraan.

- (3) Subbagian Persuratan dan Arsip mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan persuratan dan arsip.

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, telaah visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dibagi menjadi 3 (tiga) isu utama, yaitu:

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan
 - a. Belum adanya regulasi teknis terkait pelaksanaan tugas di Biro Pemerintahan dan Biro Kesejahteraan Rakyat dan supporting data untuk penyusunan laporan serta belum optimalnya penanganan permasalahan perbatasan.
 - b. Belum terpenuhi kebutuhan produk hukum yang mencakup kuantitas, kualitas dan kejelasan objek hukum.
2. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan
 - a. Tingkat inflasi daerah yang harus terus dijaga kestabilannya.
 - b. Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan.
 - c. Pengendalian pembangunan bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.
 - d. Pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar kinerja pengadaan. *E-procurement* bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Isu terkait pelayanan publik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang mengharapkan agar Pemerintah Daerah memberikan pelayanan prima
 - a. Kelembagaan yang belum selaras dengan RPJMD.
 - b. Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Sekretariat Daerah masih belum dijadikan Budaya/Dasar Budaya Kinerja.
 - c. Kualitas layanan keprotokolan yang masih perlu ditingkatkan.
 - d. Kualitas pelayanan administrasi umum, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan dan penatausahaan masi perlu ditingkatkan.

Berikut ini isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
 - Permasalahan

- Masalah persamaan persepsi terkait isian data IKK dan ketersediaan data dukung yang kadang masih terdapat perbedaan antara tim daerah dan tim nasional LPPD, utamanya terkait data dukung yang bisa diterima dan tidak bisa diterima;
 - Lemahnya pengetahuan SKPD dalam penyusunan draft produk hukum yang tidak sesuai dengan tata naskah hukum;
 - Belum terdokumentasinya dokumen pendukung evaluasi kematangan Organisasi dengan baik;
 - Perangkat Daerah belum sepenuhnya memahami secara baik tentang pelaksanaan Evaluasi Kematangan organisasi;
 - Kurangnya Kualitas SDM pada sehingga berdampak pada Kualitas Pelayanan pada Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan.
 - Masih banyaknya kegiatan Pimpinan/Setda yang tidak terprediksi sehingga kegiatan pemberian layanan tidak maksimal.
- Alternatif Solusi
- Kemendagri melakukan pembekalan kepada tim daerah sebelum melakukan EKKPD kepada Kab/Kota dalam rangka persamaan persepsi terkait pengisian IKK beserta data dukung IKK yang memenuhi syarat untuk bisa diterima sebagai data dukung;
 - Melakukan pra evaluasi kinerja melalui asistensi kepada perangkat daerah untuk pemahaman IKK;
 - Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan produk hukum kepada SKPD;
 - Melakukan Fasilitasi/ Sosialisasi/Asistensi pelaksanaan Evaluasi penataan Kelembagaan dan Kematangan Organisasi Perangkat Daerah;
 - Memberikan Bimtek/Pelatihan untuk peningkatan SDM dalam rangka peningkatan Pelayanan;
 - Komitmen Pimpinan terhadap peningkatan Pelayanan di Biro Umum dan Biro Adminsitrasi Pimpinan.
2. Meningkatnya kualitas koordinasi pembangunan
- Permasalahan
- Belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi, Pengendalian dan evaluasi dalam rangka pencapaian sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat baik dilingkungan SKPD Pemprov. Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota;
 - Belum adanya kesatuan data untuk dibidang kesejahteraan rakyat;
 - Tidak meratanya kualitas SDM aparatur pemerintah di Biro kesejahteraan rakyat;

- Belum optimalnya peran lembaga dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah dibidang kesejahteraan rakyat;
 - Rendahnya inflasi tahun ini dinilai positif karena penyebab inflasi tidak berasal dari turunya daya beli masyarakat;
 - Belum optimalnya koordinasi bidang infrastruktur fisik dan bangunan;
 - Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dibidang pengadaan barang/jasa;
 - Belum maksimalnya sosialisasi pedoman penyusunan anggaran;
 - Belum adanya Database pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kaltim;
 - Belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan di Kaltim;
 - Kualitas dan Kuantitas SDM serta sarana prasana yang masih belum memadai.
- Alternatif Solusi
- Meningkatkan pelaksanaan koordinasi, Pengendalian dan evaluasi dalam rangka pencapaian sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat baik dilingkungan SKPD Pemprov. Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota;
 - Mengupayakan kesatuan data untuk dibidang kesejahteraan rakyat;
 - Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
 - Mengoptimalkan peran lembaga dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah dibidang kesejahteraan rakyat;
 - Melakukan intervensi pasar seperti gelar monitoring, operasi pasar mengatur tata kelola distribusi pada beberapa komoditas yang peningkatan harganya dapat mempengaruhi tingkat inflasi;
 - Perlu disusun rencana oprasional koordinasi yang efektif, efisien dan terukur;
 - Meningkatkan kapasitas SDM dengan mengikuti diklat/bimtek pengadaan;
 - Melaksanakan sosialisasi pedoman penyusunan di awal tahun anggaran belanja;
 - Membuat sistem informasi database pelaksanaan pembangunan;
 - Membuat Juknis tentang tata cara pelaksanaan pembangunan;
 - Menambah SDM yang berkualitas dan melaksanakan pelatihan untuk peningkatan SDM.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tujuan meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan berkualitas, meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas, dan meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu didukung dengan program dan kegiatan yang mendukung.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah membandingkan antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam Ranwal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Data tersebut sedianya, dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					5.603.269.000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					7.424.249.700
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	84%	1.996.594.528	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	84%	2.217.575.228	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	5.725.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	5.725.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.725.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.725.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Keuangan Biro POD	100%	153.780.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Keuangan Biro POD	100%	153.780.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	153.780.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	153.780.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Biro POD	100%	13.365.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Biro POD	100%	13.365.000	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	13.365.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	13.365.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro POD	100%	942.208.850	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro POD	100%	942.208.850	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	82.524.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	82.524.200	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.244.650	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.244.650	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	814.440.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	814.440.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro POD)	100%	199.685.090	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro POD)	100%	400.665.790	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	199.685.090	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	400.665.790	Pengadaan GPS Geodetic dan Drone Untuk Kegiatan Penarikan Batas dan Pertanahan

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro POD)	100%	603.500.188	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro POD)	100%	603.500.188	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	599.650.188	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	599.650.188	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro POD)	100%	78.329.900	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro POD)	100%	98.329.900	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9.900.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	68.429.900	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	88.429.900	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3150 Skor	3.606.674.472	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3150 Skor	5.206.674.472	

No	Rancangan Awal RKPDP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		Persentase meningkatnya kualitas Pemerintahan Daerah	90%	1.056.674.472	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		Persentase meningkatnya kualitas Pemerintahan Daerah	90%	1.606.674.472	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	606.674.472	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	1.106.674.472	Pelaksanaan HUT RI secara normal
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	4 Dokumen	450.000.000	Fasilitasi Penataan Wilayah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	4 Dokumen	500.000.000	
	Pelaksanaan Otonomi Daerah		Persentase terlaksananya koordinasi dalam bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	90%	1.550.000.000	Pelaksanaan Otonomi Daerah		Persentase terlaksananya koordinasi dalam bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	90%	2.200.000.000	
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	450.000.000	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	500.000.000	Pelantikan Pelaksanaan Jabatan Bupati Penajam Paser Utara
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	600.000.000	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	1.100.000.000	Pelaksanaan HUT Provinsi secara normal
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	500.000.000	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	600.000.000	Penambahan Kegiatan Penyusunan LKPJ -Rapat Persiapan -Rapat Asistensi Capaian Program

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Kegiatan Perangkat Daerah -Finalisasi LKPJ
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase dokumen kerja sama dan laporan evaluasi kerja sama	100%	1.000.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase dokumen kerja sama dan laporan evaluasi kerja sama	100%	1.400.000.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	400.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	600.000.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	250.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	350.000.000	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	350.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	450.000.000	
	BIRO HUKUM				6.000.000.000	BIRO HUKUM				5.555.666.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kalimantan Timur	Persentase pelayanan publik pada tugas Sekretariat Daerah	100%	1.505.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kalimantan Timur	Persentase pelayanan publik pada tugas Sekretariat Daerah	100%	1.555.666.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	4.410.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	5.540.000	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	2	4.410.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	2	5.540.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100%	103.920.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100%	103.920.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kalimantan Timur	Jumlah dokumen penatausahaan administrasi keuangan	12	103.920.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kalimantan Timur	Jumlah dokumen penatausahaan administrasi keuangan	12	103.920.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	7.680.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	7.680.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kalimantan Timur	Jumlah laporan penatausahaan BMD	12	7.680.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kalimantan Timur	Jumlah laporan penatausahaan BMD	12	7.680.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100	72.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100	72.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kalimantan Timur	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	3	72.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kalimantan Timur	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	3	72.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	664.721.551	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	732.054.656	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan pengadaan ATK	12	83.709.351	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan pengadaan ATK	12	101.906.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kalimantan Timur	Jumlah dan Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	701	20.060.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kalimantan Timur	Jumlah dan Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	701	66.920.000	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kalimantan Timur	Jumlah laporan barang cetakan dan penggandaan	12	60.952.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kalimantan Timur	Jumlah laporan barang cetakan dan penggandaan	12	27.428.656	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kalimantan Timur	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	40	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kalimantan Timur	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	40	535.800.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	458.762.944	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	500.009.344	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kalimantan Timur	Jumlah benda pos yang disediakan	300	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kalimantan Timur	Jumlah benda pos yang disediakan	300	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kalimantan Timur	jumlah laporan gaji non ASN	12	453.762.944	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kalimantan Timur	jumlah laporan gaji non ASN	12	495.009.344	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	24.750.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	25.550.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kalimantan Timur	jumlah laporan pemeliharaan peralatan kantor	12	24.750.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kalimantan Timur	jumlah laporan pemeliharaan peralatan kantor	12	25.550.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	169.255.505	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	108.912.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kalimantan Timur	Jumlah laporan pengadaan perlengkapan kantor	1	169.255.505	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kalimantan Timur	Jumlah laporan pengadaan perlengkapan kantor	1	108.912.000	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi, Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non litigasi dan HAM	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi, Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non litigasi dan HAM	100%	4.494.500.000	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi, Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non litigasi dan HAM	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi, Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non litigasi dan HAM	100%	4.000.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase rancangan Produk Hukum dan bantuan hukum yang difasilitasi	Persentase rancangan Produk Hukum dan bantuan hukum yang difasilitasi	100%	2.850.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase rancangan Produk Hukum dan bantuan hukum yang difasilitasi	Persentase rancangan Produk Hukum dan bantuan hukum yang difasilitasi	100%	2.600.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah dokumen rancangan produk hukum pengaturan yang diharmonisasi	Jumlah dokumen rancangan produk hukum pengaturan yang diharmonisasi	80	900.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah dokumen rancangan produk hukum pengaturan yang diharmonisasi	Jumlah dokumen rancangan produk hukum pengaturan yang diharmonisasi	80	900.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah dokumen surat keputusan yg ditetapkan	Jumlah dokumen surat keputusan yg ditetapkan	600	400.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah dokumen surat keputusan yg ditetapkan	Jumlah dokumen surat keputusan yg ditetapkan	600	300.000.000	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah dokumen produk hukum yang dipublikasikan	Jumlah dokumen produk hukum yang dipublikasikan	680	600.000.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah dokumen produk hukum yang dipublikasikan	Jumlah dokumen produk hukum yang dipublikasikan	680	600.000.000	
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen fasilitasi dan evaluasi produk hukum kab/kota	Jumlah dokumen fasilitasi dan evaluasi produk hukum kab/kota	300	950.000.000	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen fasilitasi dan evaluasi produk hukum kab/kota	Jumlah dokumen fasilitasi dan evaluasi produk hukum kab/kota	300	800.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100%	1.644.500.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100%	1.400.000.000	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah dokumen penanganan perkara/sengketa hukum	Jumlah dokumen penanganan perkara/sengketa hukum	10	1.000.000.000	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah dokumen penanganan perkara/sengketa hukum	Jumlah dokumen penanganan perkara/sengketa hukum	10	900.000.000	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah laporan Non Litigasi dan HAM	Jumlah laporan Non Litigasi dan HAM	2	644.500.000	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah laporan Non Litigasi dan HAM	Jumlah laporan Non Litigasi dan HAM	2	500.000.000	
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT					8.629.985.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT					57.629.985.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat	84%	2.353.392.301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat	84%	2.762.112.264	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	100%	116.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	100%	149.934.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	26.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	26.724.000	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	52.116.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	22.178.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	40.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	3 Laporan	48.916.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Keuangan	92%	335.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Keuangan	92%	277.960.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	320.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	259.262.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	18.698.000	

No	Rancangan Awal RKPД Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	30.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	31.260.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	30.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	31.260.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Palaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	960.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Palaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	1.415.893.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	53 Paket	607.725.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	750.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	60.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	748.168.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang	12 Bulan	771.392.301	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan & Luar Negeri	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang	12 Bulan	776.340.264	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi.Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi.Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	44.880.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	736.392.301	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	711.460.264	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Barang Milik Daerah yang Kategori Baik	90%	141.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Barang Milik Daerah yang Kategori Baik	90%	110.725.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	120.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	89.705.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	21.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	21.020.000	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan dan Luar Negeri	Persentase Penyelesaian Bahan kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat	90%	6.276.592.699	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyelesaian Bahan kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat	90%	#####	
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan dan Luar Negeri	Persentase Penyelesaian Bahan kebijakan bidang bina mental spiritual	100%	1.876.592.699	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyelesaian Bahan kebijakan bidang bina mental spiritual	100%	#####	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	12 Dokumen	1.076.592.699	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	25.344.021.861	
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	12 Dokumen	800.000.000	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	7.681.886.000	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyelesaian Bahan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar	100%	2.300.000.000	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyelesaian Bahan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar	100%	#####	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	12 Dokumen	800.000.000	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	13 Dokumen	1.366.242.000	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	12 Dokumen	750.000.000	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	12 Dokumen	749.910.000	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	12 Dokumen	750.000.000	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	13 Dokumen	15.826.122.000	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyelesaian Bahan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Non Pelayanan Dasar	100%	2.100.000.000	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyelesaian Bahan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Non Pelayanan Dasar	100%	3.899.690.875	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	13 Dokumen	700.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	13 Dokumen	1.896.502.875	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	20 Dokumen	700.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	20 Dokumen	1.332.084.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	12 Dokumen	700.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	12 Dokumen	671.104.000	
BIRO PEREKONOMIAN					4.806.955.884	BIRO PEREKONOMIAN					4.228.717.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kaltim dan Luar Daerah	Persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan		1.906.955.884	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kaltim dan Luar Daerah	Persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan		1.668.717.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	54.853.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	45.322.000	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	4 dokumen	43.993.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	4 dokumen	34.462.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	10.860.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	10.860.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Realisasi Keuangan	92%	119.250.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Realisasi Keuangan	95%	112.650.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	119.250.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	112.650.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan	100%	13.440.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan	100%	13.440.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	13.440.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	13.440.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100%	24.139.884	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100%	30.900.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	24 Dokumen	1.200.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	24 Dokumen	1.200.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 orang	22.939.884	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	29.700.000	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	880.376.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	728.296.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	47.080.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	39 paket	39.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600 paket	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1250 paket	30.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	18.016.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	18.016.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.680.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Eksemplar	7.680.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	777.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	633.600.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Samarinda	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	635.549.680	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Samarinda	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	632.930.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 Lembar	1.320.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.200.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	634.229.680	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	628.730.000	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	125.332.320	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	51.164.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	125.332.320	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	51.164.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100%	54.015.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100%	54.015.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	35.765.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	35.765.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	18.250.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	18.250.000	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kaltim dan Luar Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian	100%	2.900.000.000	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kaltim dan Luar Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian	100%	2.560.000.000	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1 dokumen	725.000.000	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1 dokumen	640.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 dokumen	362.500.000	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 dokumen	320.000.000	s

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 dokumen	362.500.000	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 dokumen	320.000.000	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1 dokumen	1.087.500.000	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1 dokumen	960.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	3 dokumen	362.500.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	3 dokumen	320.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 dokumen	362.500.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 dokumen	320.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 dokumen	362.500.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 dokumen	320.000.000	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1 dokumen	1.087.500.000	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1 dokumen	960.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 dokumen	362.500.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 dokumen	320.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 dokumen	362.500.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 dokumen	320.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 dokumen	362.500.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 dokumen	320.000.000	
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					7.411.495.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					8.024.988.184
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaltim	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan	84%	2.629.907.464	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaltim	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan	84%	2.414.988.184	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	Terpenuhinya Administrasi Keuangan pada Biro Administrasi Pembangunan	90%	195.000.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	Terpenuhinya Administrasi Keuangan pada Biro Administrasi Pembangunan	90%	213.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	195.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	213.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Administrasi Pembangunan	85%	84.200.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Administrasi Pembangunan	85%	135.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	33 Paket	15.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	33 Paket	15.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	14.400.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	20.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	54.800.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	100.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Administrasi Pembangunan	2 Dokumen	816.231.180	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Administrasi Pembangunan	2 Dokumen	865.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	6.781.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	15.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	809.449.380	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	850.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	85%	175.351.900,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	85%	200.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	175.351.900	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	200.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85%	1.181.332.384	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85%	1.196.988.184	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000	

No	Rancangan Awal RKPDP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	47.344.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	1.131.988.184	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	1.131.988.184	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Terpeliharanya BMD dalam kondisi Baik	85%	177.792.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Terpeliharanya BMD dalam kondisi Baik	85%	340.562.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	17.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.562.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	121.482.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	250.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	39.310.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	50.000.000	
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Kaltim	Persentase koordinasi penyusunan kebijakandaerah bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	100%	3.488.787.536	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Kaltim	Persentase koordinasi penyusunan kebijakandaerah bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	100%	4.110.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kaltim	Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan	80%	1.292.800.000		Kaltim	Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan	80%	1.500.000.000	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	Persentase Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	85%	3.488.787.536	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	Persentase Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	85%	4.110.000.000	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	12 Laporan	528.234.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	12 Laporan	610.000.000	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12 Laporan	456.500.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12 Laporan	500.000.000	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III	6 Laporan	2.504.053.536	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III	6 Laporan	3.000.000.000	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	Persentase Meningkatnya hasil Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80%	#####	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	Persentase Meningkatnya hasil Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80%	#####	
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	346.200.000	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	634.000.000	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	600.000.000	
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Kaltim	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	312.600.000	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Kaltim	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	400.000.000	
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA					7.557.107.708	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA					7.563.981.000
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	PKP-PB Pro Aktif Level	4.255.000.000	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	PKP-PB Pro Aktif Level	5.201.142.900	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa	90%	1.347.256.600	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa	90%	1.462.430.000	
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	354.634.600	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	356.640.000	
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	607.830.000	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	725.990.000	
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	384.792.000	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	379.800.000	

No	Rancangan Awal RKPД Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		kelurahan di kaltim					kelurahan di kaltim				
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Persentase layanan Pengadaan secara elektronik	95%	1.388.528.400	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Persentase layanan Pengadaan secara elektronik	95%	1.604.340.400	
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	2 Laporan	700.040.400	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	2 Laporan	808.640.400	
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	330.300.000	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	312.600.000	
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan	358.188.000	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	483.100.000	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Persentase Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	87,5 %	1.519.215.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Persentase Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	87,5 %	2.134.372.500	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	200 Orang	421.440.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	200 Orang	776.140.000	
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	629.815.000	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	677.215.000	
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	467.960.000	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	681.017.500	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pengadaan Barang & Jasa	84%	3.302.107.708	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pengadaan Barang & Jasa	84%	2.362.838.100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Tercapainya laporan keuangan yang akuntabel (Biro PBJ)	90%	134.278.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Tercapainya laporan keuangan yang akuntabel (Biro PBJ)	90%	134.278.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	134.278.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	134.278.000	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Meningkatnya kapasitas pegawai (Biro PBJ)	80%	514.680.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Meningkatnya kapasitas pegawai (Biro PBJ)	80%	217.600.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	31.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	56.800.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	420.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	85.800.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	100 Orang	63.180.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	5 Orang	75.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Meningatnya pelayanan Administarsi Umum (Biro PBJ)	90%	566.460.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di kaltim	Meningatnya pelayanan Administarsi Umum (Biro PBJ)	90%	565.061.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	176.988.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	140.890.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.902.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	55.799.500	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di Indonesia	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	372.570.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, semua kecamatan, semua kelurahan di Indonesia	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	368.372.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya pelayanan kantor (Biro PBJ)	85%	851.251.651	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya pelayanan kantor (Biro PBJ)	85%	243.300.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	851.251.651	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	68 Unit	243.300.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Meningkatnya pelayanan Administarsi Umum (Biro PBJ)	85%	1.131.521.557	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Meningkatnya pelayanan Administarsi Umum (Biro PBJ)	85%	1.141.399.600	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5.250.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5.250.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	77.013.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	82.767.200	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	1.049.257.757	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	1.053.382.400	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase BMD dalam kondisi baik (Biro PBJ)	85%	103.916.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase BMD dalam kondisi baik (Biro PBJ)	85%	61.199.000	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	14.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	32.216.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	13.499.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	33.700.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	33.700.000	
BIRO ORGANISASI					11.198.175.147	BIRO ORGANISASI					6.472.183.000
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	81%	6.546.595.000	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	81%	4.555.000.000	
		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	97%			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	97%		
		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	89%			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	89%		

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kalimantan Timur	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaan Organisasinya sesuai ketentuan	100%	2.520.336.500	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kalimantan Timur	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaan Organisasinya sesuai ketentuan	100%	1.605.000.000	
		Kalimantan Timur	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	96%			Kalimantan Timur	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	96%		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	1 Dokumen	1.145.703.125	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	1 Dokumen	750.000.000	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	631.548.440	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	425.000.000	
	Penataan Analisis Jabatan	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	743.084.935	Penataan Analisis Jabatan	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	430.000.000	
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kab/Kota	Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan sesuai aturan / Ketentuan	100%	4.026.258.500	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kab/Kota	Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan sesuai aturan / Ketentuan	100%	2.950.000.000	
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1.301.825.000	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1.000.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	1.101.825.000	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	900.000.000	
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	250.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	250.000.000	
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	487.948.500	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	300.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	884.660.000	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	500.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Organisasi	84%	4.651.580.147	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Organisasi	84%	1.917.183.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kab/Kota	Persentase Realisasi Keuangan Biro Organisasi	95%	216.990.310	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kab/Kota	Persentase Realisasi Keuangan Biro Organisasi	95%	110.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	216.990.310	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	110.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kab/Kota	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan	100%	41.400.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kab/Kota	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan	100%	10.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	41.400.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kab/Kota	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Biro Organisasi	100%	234.450.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kab/Kota	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Biro Organisasi	100%	108.960.000	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kalimantan Timur	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	27.200.000	Sub Kegiatan Baru
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kalimantan Timur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	234.450.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kalimantan Timur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	81.760.000	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kab/Kota	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro Organisasi	100%	3.249.375.165	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kab/Kota	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro Organisasi	100%	1.176.984.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kalimantan Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	35.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	55.121.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kalimantan Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	300.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	281.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kalimantan Timur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	49.700.585	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	21.028.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24.980.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	31.980.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.839.694.580	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	708.700.000	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	79.155.000	Sub Kegiatan Baru

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kab/Kota	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Organisasi)	100%	449.264.492	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kab/Kota	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Organisasi)	100%	104.760.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kalimantan Timur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 Unit	449.264.492	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kalimantan Timur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	7 Unit	104.760.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kab/Kota	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		431.403.280	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kab/Kota	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Dokumen	335.923.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	416.403.280	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	330.923.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kab/Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	28.696.900	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kab/Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	70.556.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kalimantan Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	12 Unit	13.956.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kalimantan Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	14 Unit	32.406.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kalimantan Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	14.740.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kalimantan Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	38.150.000	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	BIRO UMUM				171.628.865.521	BIRO UMUM				185.393.468.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Umum	84%	171.628.865.521	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Umum	84%	185.393.468.000	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	556.298.000	Penambahan Kegiatan Baru
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	556.298.000	Penambahan Sub Kegiatan Baru
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan baik	100%	82.127.599.018	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan baik	100%	80.023.539.568	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	14 Dokumen	80.374.756.991	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	373 Orang/Bulan	77.827.745.568	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.752.842.027	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	12 Dokumen	2.195.794.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	615.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Biro Umum	100%	1.266.620.000	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inventarisasi Aset	1 Laporan	615.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	354.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	912.620.000	Penambahan Sub Kegiatan Baru
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100%	2.773.996.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Biro Umum	100%	2.250.007.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	358 Stel	286.400.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	494.950.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	2.220.016.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	1.187.477.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan ASN dan Non ASN	3 Laporan	267.580.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	225 Orang	567.580.000	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	14.709.994.402	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	24.872.815.863	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang diadakan	7 Paket	324.655.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	600.753.645	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Per Bulan	12 Laporan	600.478.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	645.103.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Porsi makanan dan Minuman yang diadakan	10614 Porsi	3.833.686.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500 Paket	7.889.512.000	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penggandaan Barang yang dicetak	5 Jenis	693.200.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	736.700.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Daerah	1500 orang/perjalanan atau 1500 O/T	8.443.332.541	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan & Luar Negeri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1000 Orang	13.743.625.363	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Arsip Setda yang dikelola	1 Laporan per tahun	449.240.961	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	730.341.415	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Aplikasi	3 Aplikasi	365.401.800	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	526.780.440	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	9.877.752.400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	9.821.797.030	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan Roda 4 yang diadakan	25 Unit	6.177.500.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit	5.375.940.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor serta rumah dinas yang diadakan	10 Jenis	3.700.252.400	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	150 Unit	4.445.857.030	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	22.953.320.392	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	26.715.690.869	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Materai dan beban jasa pengiriman surat	2100 lembar	65.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	82.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kalimantan Timur	Jasa Komunikasi, Listrik, dan Sumber Daya Air yang terbayarkan	12 Laporan	9.860.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.400.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.550.641.600	Penambahan Sub Kegiatan Baru
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Laporan jasa pelayanan umum	137500 m2	13.027.820.392	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.683.049.269	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kalimantan Timur	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	15.382.973.521	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kalimantan Timur	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	16.749.820.882	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang dipelihara dan diperpanjang izinnya	150 Unit	5.095.777.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150 Unit	7.411.670.050	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	1.714.667.800	Penambahan Sub Kegiatan Baru
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Gedung yang dipelihara	13 Unit	9.400.996.121	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	7.339.333.032	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Peralatan Perlengkapan Kerja yang dipelihara	150 unit	886.200.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 unit	284.150.000	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 Unit	10.128.818.788	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan baik	100%	11.186.418.788	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Daftar Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2 Laporan	10.128.818.788	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	250.252.396	
						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	187.600.000	Penambahan Sub Kegiatan Baru
						Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	870.000.000	Penambahan Sub Kegiatan Baru
						Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Dana Penunjang Operasional KDH WKDH	12 Laporan	9.878.566.392	Penambahan Sub Kegiatan Baru
	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	100%	13.059.411.000	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	100%	11.950.460.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Rumah Tangga Gubernur	1 Laporan	3.928.761.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	90 Paket	5.120.061.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Rumah Tangga wakil Gubernur	1 Laporan	5.015.148.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	90 Paket	4.923.145.000	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1 Laporan	4.115.502.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	100 Paket	1.907.254.000	
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN					10.313.251.000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN					16.245.166.230
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100%	10.313.251.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100%	16.245.166.230	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100%	253.920.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	342.548.288	
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kaltim	Jumlah dokumen administrasi keuangan ASN	12 Dokumen	253.920.000	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kaltim	Jumlah dokumen administrasi keuangan ASN	12 Dokumen	342.548.288	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Tersedianya Penujang Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	946.291.821	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Tersedianya Penujang Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.536.669.159	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kaltim	Jumlah Laporan penyediaan peralatan alat tulis kantor	150 Paket	228.725.350	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kaltim	Jumlah Laporan penyediaan peralatan alat tulis kantor	12 Laporan	25.944.589	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kaltim	Jumlah laporan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15 Paket	125.865.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kaltim	Jumlah laporan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Laporan	15.000.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kaltim	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	150 Laporan	476.653.471	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kaltim	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	O/T 160	1.353.635.570	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kaltim	Jumlah porsi makanan yang diadakan	10 Unit	115.048.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Kaltim	Jumlah porsi makanan yang diadakan	1000 Porsi	142.089.000	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Tersedianya Barang Milik daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	693.363.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah daerah	Kaltim	Tersedianya Barang Milik daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	185.292.900	
	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Kaltim	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 Unit	693.363.000	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Kaltim	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis	185.292.900	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim	Terpeliharanya Barang Milik daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	68.173.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim	Terpeliharanya Barang Milik daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	149.064.996	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kaltim	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraann dinas/operasional	5 Unit	40.703.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kaltim	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraann dinas/operasional	15 Unit	49.464.996	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kaltim	Jumlah laporan pemeliharaan peralatan kantor dan mesin lainnya	10 Unit	27.470.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kaltim	Jumlah laporan pemeliharaan peralatan kantor dan mesin lainnya	12 laporan	99.600.000	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kaltim	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.524.477.232	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.523.483.932	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kaltim	Jumlah Jasa Komunikasi, Listrik, dan Sumber Daya Air yang terbayarkan	12 Laporan	25.700.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kaltim	Jumlah Jasa Komunikasi, Listrik, dan Sumber Daya Air yang terbayarkan	12 Dokumen	24.707.100	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12 Laporan	1.498.776.832	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12 Laporan	1.498.776.832	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	553.681.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	616.358.000	

No	Rancangan Awal RKPД Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kaltim	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	451.026.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kaltim	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	609.850.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kaltim	Jumlah dokumen evaluasi kinerja lingkup Setda	2 Laporan	102.655.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kaltim	Jumlah dokumen evaluasi kinerja lingkup Setda	4 Dokumen	6.508.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Terlaksananya administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	100%	427.980.947	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Terlaksananya administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	100%	488.404.250	
	Pendidikan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kaltim	Jumlah Laporan hasil pendidikan dan pelatihan	20 Orang	113.008.947	Pendidikan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kaltim	Jumlah Laporan hasil pendidikan dan pelatihan	4 Dokumen	110.500.000	
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kaltim	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Setda	5 Dokumen	314.972.000	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kaltim	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Setda	2 Dokumen	377.904.250	
	Fasilitasi Keprotokolan	Kaltim	Persentase Tersedianya Fasilitas Keprotokolan Sekretariat Daerah	100%	723.714.000	Fasilitasi Keprotokolan	Kaltim	Persentase Tersedianya Fasilitas Keprotokolan Sekretariat Daerah	100%	2.391.937.025	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Kaltim	Jumlah dokumen koordinasi acara kegiatan Pemda	12 Laporan	281.220.000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Kaltim	Jumlah dokumen koordinasi acara kegiatan Pemda	4 Dokumen	966.591.615	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kaltim	Jumlah dokumen kunjungan Tamu yang terlayani	6 Laporan	308.550.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kaltim	Jumlah dokumen kunjungan Tamu yang terlayani	2 Dokumen	900.405.410	
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Kaltim	Jumlah dokumen administrasi keprotokolan	12 Laporan	133.944.000	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Kaltim	Jumlah dokumen administrasi keprotokolan	2 Dokumen	524.940.000	
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Kaltim	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	5.121.650.000	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Kaltim	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	9.011.407.680	
	Penyiapan Materi Pimpinan	Kaltim	Jumlah Dokumen Naskah Pidato dan Presentasi	12 Dokumen	300.153.000	Penyiapan Materi Pimpinan	Kaltim	Jumlah Dokumen Naskah Pidato dan Presentasi	12 Dokumen	496.858.310	

No	Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kaltim	Jumlah dokumen yang terpublikasi	6 Laporan	2.442.010.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kaltim	Jumlah dokumen yang terpublikasi	12 Dokumen	6.014.549.370	
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Kaltim	Jumlah dokumen penyediaan data yang terdokumentasi	12 Laporan	2.379.487.000	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Kaltim	Jumlah dokumen penyediaan data yang terdokumentasi	12 Dokumen	2.500.000.000	

Sumber: Ranwal RKPD Prov. Kaltim Tahun 2023 dan data Biro-Biro di Lingkup Setda Prov. Kaltim

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan terhadap program dan kegiatan masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jejaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan sesuai tugas dan fungsi SKPA.

Akan tetapi, pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, usulan tersebut merupakan masukan kegiatan dan sub kegiatan baru yang dirasa penting dan berasal dari Biro-Biro yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Usulan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	BIRO UMUM				
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Usulan Kegiatan baru TA 2023
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Usulan Sub Kegiatan TA 2023
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Usulan Sub Kegiatan TA 2023
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Usulan Sub Kegiatan TA 2023
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Usulan Sub Kegiatan TA 2023
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil	Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	Usulan Sub Kegiatan TA 2023
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	Usulan Sub Kegiatan TA 2023
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH	12 Laporan	Usulan Sub Kegiatan TA 2023
2	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Biro Adpim	Kaltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Biro adpim	2 Dokumen	Usulan Sub Kegiatan TA 2023
3	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	17 Laporan	Usulan Sub Kegiatan TA 2023

4 BIRO ORGANISASI					
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kalimantan Timur	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Usulan Sub Kegiatan TA 2023
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Usulan Sub Kegiatan TA 2023

Sumber: data Biro-Biro di Lingkup Setda Prov. Kaltim

Terdapat 4 (empat) Biro mengusulkan penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan yang diharapkan dapat terakomodir pada Tahun 2023. Warna hijau pada tabel di atas merupakan penambahan pada Kegiatan, warna biru merupakan penambahan pada Sub Kegiatan. Dan surat permohonan ketiga biro tersebut sebagaimana terdapat dalam lampiran.

Usulan penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana Nota Dinas Biro Umum yang ditujukan kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 24 Januari 2022 Nomor: 910/0858/B.Um.I disebutkan dalam rangka peningkatan pelayanan kerumahtanggaan Pimpinan dan Sekretariat Daerah.

Usulan penambahan Sub Kegiatan sebagaimana Nota Dinas Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Kaltim kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian tanggal 24 Januari 2022 Nomor: 050/154/Adpim-I adalah terdapatnya Sub Kegiatan yang belum terakomodir di Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut Biro Adpim mengusulkan penambahan Sub Kegiatan pada Biro Administrasi Pimpinan yang disesuaikan dengan hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk Rencana Kerja Tahun 2023.

Usulan penambahan Sub Kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana Nota Dinas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat yang ditujukan kepada Kepala Biro Adpim tanggal 28 Januari 2022 Nomor 050.14/0096-II/B.Kesra adalah dalam Tahun 2022 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim dalam mengalokasikan anggaran pegawai kontrak pada nomenklatur Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan dengan kode rekening 4.01.01.1.02.03.

Berdasarkan hasil asistensi RKA Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022, untuk alokasi anggaran pegawai kontrak pada nomenklatur Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan kode rekening 4.01.01.1.08.04. Berdasarkan hal ini maka diusulkan penambahan nomenklatur Sub Kegiatan Baru, yakni Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor kode rekening 4.01.01.1.08.04 pada Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Adapun usulan penambahan Sub Kegiatan pada Biro Organisasi sebagaimana Nota Dinas Kepala Biro Organisasi yang ditujukan kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan tanggal 17 Juni 2022 Nomor 050/456/B.Org-TL adalah penambahan Sub Kegiatan baru yang mana sub kegiatan tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 belum terakomodir di dalam sub kegiatan yang ada pada aplikasi SIPD sekarang ini.

Pengusulan ini didasarkan pada masih terdapatnya Sub-Sub Kegiatan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5899 Tahun 2021 yang dapat menunjang dalam pelaksanaan kegiatan Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim kedepannya. Berdasarkan hal ini maka diusulkan penambahan nomenklatur Sub Kegiatan Baru, yakni Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan kode rekening 4.01.01.1.05.02 dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan kode rekening 4.01.01.1.06.11 pada Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2023.

BAB III

Tujuan dan Sasaran

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional adalah analisa kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah, yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN.

Sesuai arahan RPJMN 2005-2025, Sasaran Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 adalah **“Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur Melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang Didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”**.

Dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, maka visi Presiden tahun 2020-2024 adalah:

“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermanfaat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Strategi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Arah Kebijakan Ekonomi Nasional pada tahun 2023 berdasarkan arahan Presiden yang dituangkan pada RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana di atas, pembangunan nasional diarahkan berfokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi.

Selain itu pula telah ditetapkan 7 agenda pembangunan untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan melalui peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah dengan tujuan akhir yakni peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik untuk melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara.

Pembangunan Ibukota Negara (IKN) dan Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya ke wilayah yang masuk administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara dipastikan akan berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat di Kalimantan Timur.

Secara umum, persoalan lingkungan, ekonomi, dan kependudukan merupakan yang paling besar mendapatkan pengaruh. Selain aspek sosial yang melibatkan masyarakat adat lokal yang juga berpotensi menimbulkan munculnya beberapa upaya yang adaptif dan bersifat masif. Jika diurutkan dari besarnya pemberian dampak, maka aspek lingkungan dan kependudukan merupakan dua persoalan teratas. Selanjutnya, secara implementatif kedua aspek ini akan mempengaruhi ekonomi wilayah dengan potensi imbas kepada sektor sosial-budaya lainnya.

Bagian paling menguntungkan dari pemindahan IKN adalah akan adanya penyeimbangan di berbagai sektor dan secara langsung akan mendukung desentralisasi atau otonomi daerah secara menyeluruh.

Pemindahan IKN juga merupakan tantangan yang sangat positif bagi Pemerintah Pusat dan sekaligus Pemerintah Daerah dalam membuat peta dan membentuk desain baru dari seluruh skema pengembangan yang akan dilaksanakan. Bagi Kalimantan Timur secara khusus, dan pulau Kalimantan secara umum, tantangan yang paling besar adalah upaya merebut seluruh peluang yang telah dimulai melalui upaya-upaya pengarusutamaan pembangunan ekonomi hijau.

Reformasi Struktural menuju Tatanan Normal Baru Pasca COVID-19 Pandemi COVID-19 merupakan bencana yang bersifat global dan mempengaruhi seluruh struktur juga secara global. Dengan demikian dapat dipastikan seluruh sektor yang terkait dengan kesejahteraan rakyat telah, sedang, dan akan terdampak. Sehingga, secara bertahap penurunan produktivitas di dalam struktur masyarakat akan mengarah pada kemunculan kerentanan social.

Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu wilayah yang memiliki dinamika tertentu terutama pada sektor ketenagakerjaan, perindustrian, dan perdagangan tentu saja merasakan dampak yang cukup besar dan luas. Hal-hal yang paling urgen untuk ditindaklanjuti adalah persoalan retribusi dan pajak, alternatif bagi tenaga kerja yang di-PHK, dan kesulitan dalam pasokan bahan baku industri. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sektor industri, ketenagakerjaan, dan perdagangan di atas mengimbau seluruh sektor lainnya.

Berkurangnya jumlah penduduk yang bekerja membuat distribusi pangan tidak bisa tersalurkan dengan baik. Selain itu, urgensi untuk bekerja dari rumah juga menghambat tetap berjalannya produktivitas di bidang pangan yang ditandai oleh banyaknya terjadi gagal panen. Selain sektor pangan, industri-industri kecil juga mendapatkan penurunan pendapatan sehingga melemahkan daya beli masyarakat dan menciptakan kelesuan daya saing.

Salah satu upaya strategis Pemerintah Pusat dalam meredam dampak Pandemi COVID-19 ini adalah dengan melakukan reformasi struktural. Diharapkan reformasi struktural mampu memperbaiki fondasi-fondasi ekonomi Indonesia sehingga dapat mengakselerasi ketertinggalan akibat dampak negatif pandemi.

Presiden Joko Widodo memprioritaskan lima hal yang harus menjadi area fokus bagi program reformasi struktural, yaitu: (a) pengembangan SDM, (b) pembangunan infrastruktur, (c) deregulasi, (d) debirokratisasi, dan (e) mentransformasikan ekonomi. Peluang yang sangat berpotensi muncul dari bencana pandemi COVID-19 ini adalah pada reformasi birokrasi secara regional.

Kunci utama dari terjadinya reformasi industri tahap baru ini bisa dimulai dari kesepakatan global masyarakat dunia mengenai perlawanan terhadap COVID-19. Secara mendasar adanya konsensus nasional dan bahkan internasional ini akan

memudahkan untuk melakukan reshaping aturan dan regulasi serta sistem pelayanan birokrasi, sehingga penanganan problem di seluruh sektor bisa dilakukan.

Berdasarkan visi dan misi Pembangunan Nasional yang mengacu pada RPJMN maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menentukan prioritas pembangunan daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Guna mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2018-2023, misi pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik.

Dalam periode 2018-2023, pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Bapak Isran Noor dan Bapak Hadi Mulyadi akan menjalankan 10 Agenda Pembangunan yaitu:

1. Atasi pengangguran, karena di Kalimantan Timur jumlah angkatan kerja, dengan jumlah lapangan pekerjaan masih belum seimbang;
2. Pembangunan infrastruktur perekonomian, terutama jalan, jembatan dan pelabuhan. Jalan trans Kalimantan perlu segera dituntaskan. Begitu pula pembangunan jalan kabupaten/kota;
3. Pelaksanaan komitmen untuk mengalokasikan biaya Pendidikan sebesar 20 persen (di luar gaji dan kesejahteraan guru), pencaangan wajib belajar 12 tahun serta pendidikan gratis;
4. Penanganan banjir yang melanda Kota Samarinda, Balikpapan dan kota-kota lainnya, terutama sepanjang Daerah Aliran Sungai Mahakam;

5. Pemberdayaan ekonomi rakyat semakin ditingkatkan, terutama memperhatikan pada sektor riil, sektor informal dan UKM. Begitu pula perlunya mengurangi keterbatasan akses permodalan;
6. Peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kesejahteraan PNS/TNI dan Polri;
7. Penyelesaian krisis energi, mengurangi ketimpangan antara ketersediaan tenaga listrik dengan kebutuhan tenaga listrik;
8. Kemandirian/kecukupan pangan dalam rangka ketahanan pangan;
9. Pembangunan Kawasan wilayah perbatasan, Kawasan pedalaman dan daerah terpencil. Satu hal yang perlu terobosan khusus, mengingat tingkat kemajuan yang dicapai pada saat ini relatif lambat;
10. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memperbaiki iklim investasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Misi ke-5 yang diampu oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik. Misi ini akan diuraikan lagi menjadi tujuan dan sasaran.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami serta disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continuously improve* (SMART-C)

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien		Nilai Akuntabilitas Kinerja	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor
			Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase
			Persentase rancangan produk Hukum yang diharmonisasi	Persentase
			Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	Persentase
		Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase
			Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	Persentase
			Indeks tata kelola pengadaan	Indeks
		Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal (B)	Persentase
			Indeks Kelembagaan	Indeks
2.	Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat	
		Meningkatnya kualitas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Indeks
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan	Indeks
			Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	Persentase

Sumber: P-RENSTRA Setda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Sekretariat Daerah melaksanakan 8 (delapan) program, 30 (tiga puluh) kegiatan dan 98 (sembilan puluh delapan) sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 6) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 9) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- h. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- i. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - 1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - 2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - 3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- j. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- k. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
 - 1) Penyiapan Materi Pimpinan
 - 2) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - 3) Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
- l. Fasilitasi Keprotokolan

- 1) Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
- 2) Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3) Pengelolaan Hubungan Keprotokolan

2. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

- a. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
 - 1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
 - 2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
 - 3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
 - 4) Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
- b. Fasilitasi Bantuan Hukum
 - 1) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
 - 2) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

3. Program Penataan Organisasi

- a. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - 1) Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
 - 2) Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
 - 3) Penataan Analisis Jabatan
- b. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
 - 1) Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - 2) Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
 - 3) Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
 - 4) Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
 - 5) Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

4. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

- a. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
 - 1) Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
 - 2) Fasilitasi Penataan Wilayah
- b. Pelaksanaan Otonomi Daerah
 - 1) Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
 - 2) Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
 - 3) Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
- c. Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - 1) Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
 - 2) Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
 - 3) Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

5. Program Kesejahteraan Rakyat

- a. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
 - 1) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
 - 2) Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
- b. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
 - 1) Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
 - 2) Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
 - 3) Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
- c. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan

6. Program Perekonomian dan Pembangunan

- a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
 - 1) Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
 - 2) Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
- b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - 3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
- c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi

- 3) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

7. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

- a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
 - 2) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
 - 3) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
- b. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
 - 2) Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - 3) Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah

8. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 1) Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
 - 2) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 3) Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
- b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - 1) Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
 - 2) Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - 3) Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
- c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - 1) Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
 - 2) Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 3) Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam P-Renstra 2019-2023, serta mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023.

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Penjabaran kegiatan yang terdapat di dalam program harus memiliki rincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dibutuhkan dalam uraian kebijakan tersebut. Program yang dirumuskan sebaiknya memenuhi kriteria yang merupakan penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana, bentuk penjabaran lebih rinci langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan serta mengikat/mengelompokkan kegiatan sejenis.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH									
	SEKRETARIAT DAERAH				Rp 7.173.269.000,00			Rp 6.408.363.728,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp 2.050.196.528,00			Rp 2.193.363.728,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp 5.696.000,00			Rp 6.200.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	Rp 5.696.000,00	APBD	2 Dokumen	Rp 6.200.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp 147.960.000,00	APBD		Rp 177.000.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	Rp 147.960.000,00	APBD	12 Dokumen	Rp 177.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp 12.150.000,00	APBD		Rp 13.400.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Orang	Rp 12.150.000,00	APBD	6 Orang	Rp 13.400.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 1.009.570.390,00	APBD		Rp 1.079.300.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp 82.000.000,00	APBD	12 Laporan	Rp 90.200.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	Rp 45.290.390,00	APBD	1 Paket	Rp 52.100.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 OT	Rp 882.280.000,00	APBD	90 OT	Rp 937.000.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp 200.214.410,00	APBD		Rp 230.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	Rp 200.214.410,00	APBD	12 Unit	Rp 230.000.000,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp 596.713.728,00	APBD		Rp 597.363.728,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350 Lembar	Rp 3.850.000,00	APBD	350 Lembar	Rp 4.500.000,00		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	Rp 592.863.728,00	APBD	12 laporan	Rp 592.863.728,00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp 77.892.000,00	APBD		Rp 90.100.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Unit	Rp 9.500.000,00	APBD	9 Unit	Rp 11.400.000,00		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	Rp 68.392.000,00	APBD	12 Unit	Rp 78.700.000,00		
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					Rp 5.123.072.472,00	APBD		Rp 4.215.000.000,00	
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan					Rp 1.890.252.472,00	APBD		Rp 1.210.000.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	Rp 1.180.324.472,00	APBD	3 Dokumen	Rp 715.000.000,00		
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	Rp 709.928.000,00	APBD	4 Dokumen	Rp 495.000.000,00		
	Pelaksanaan Otonomi Daerah					Rp 2.112.536.727,00	APBD		Rp 1.820.000.000,00	
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	Rp 450.033.000,00	APBD	3 Dokumen	Rp 495.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	Rp 1.092.458.727,00	APBD	4 Dokumen	Rp 715.000.000,00	
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	Rp 570.045.000,00	APBD	3 Laporan	Rp 610.000.000,00	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah				Rp 1.120.283.273,00	APBD		Rp 1.185.000.000,00	
	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	Rp 520.283.273,00	APBD	1 Laporan	Rp 520.000.000,00	
	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	Rp 250.000.000,00	APBD	1 Laporan	Rp 275.000.000,00	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	Rp 350.000.000,00	APBD	1 Laporan	Rp 390.000.000,00	
	BIRO HUKUM				Rp 5.555.666.000,00			Rp 5.596.912.400,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas Sekretariat Daerah	Kaltim	100%	Rp 1.555.666.000,00	APBD	100%	Rp 1.502.912.400,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	Kaltim	100%	Rp 5.540.000,00	APBD	100%	Rp 4.410.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	Kaltim	2	Rp 5.540.000,00	APBD	2	Rp 4.410.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	Kaltim	100%	Rp 103.920.000,00	APBD	100%	Rp 103.920.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan administrasi keuangan	Kaltim	12	Rp 103.920.000,00	APBD	12	Rp 103.920.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kaltim	100%	Rp 7.680.000,00	APBD	100%	Rp 7.680.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD	Kaltim	12	Rp 7.680.000,00	APBD	12	Rp 7.680.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Kaltim	100	Rp 72.000.000,00	APBD	100	Rp 50.000.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Kaltim	3	Rp 72.000.000,00	APBD	3	Rp 50.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Kaltim	100%	Rp 732.054.656,00	APBD	100%	Rp 642.887.551,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan pengadaan ATK	Kaltim	12	Rp 101.906.000,00	APBD	12	Rp 61.875.351,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	Kaltim	400	Rp 66.920.000,00	APBD	400	Rp 60.952.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan barang cetakan dan penggandaan	Kaltim	12	Rp 27.428.656,00	APBD	12	Rp 20.060.200,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	Kaltim	40	Rp 535.800.000,00	APBD	40	Rp 500.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	12	Rp 500.009.344,00	APBD	12	Rp 500.009.344,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	Kaltim	500	Rp 5.000.000,00	APBD	500	Rp 5.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan gaji non ASN	Kaltim	12	Rp 495.009.344,00	APBD	12	Rp 495.009.344,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kaltim	100%	Rp 25.550.000,00	APBD	100%	Rp 24.750.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah laporan pemeliharaan peralatan kantor	Kaltim	12	Rp 25.550.000,00	APBD	12	Rp 24.750.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim	100%	Rp 108.912.000,00	APBD	100%	Rp 169.255.505,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan pengadaan perlengkapan kantor	Kaltim	1	Rp 108.912.000,00	APBD	1	Rp 169.255.505,00	
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi, Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non litigasi dan HAM	Kaltim	100%	Rp 4.000.000.000,00	APBD	100%	Rp 4.094.000.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase rancangan Produk Hukum dan bantuan hukum yang difasilitasi	Kaltim	100%	Rp 2.600.000.000,00	APBD	100%	Rp 2.650.000.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah dokumen rancangan produk hukum pengaturan yang diharmonisasi	Kaltim	80	Rp 900.000.000,00	APBD	80	Rp 850.000.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah dokumen surat keputusan yg ditetapkan	Kaltim	600	Rp 300.000.000,00	APBD	600	Rp 400.000.000,00	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah dokumen produk hukum yang dipublikasikan	Kaltim	680	Rp 600.000.000,00	APBD	680	Rp 600.000.000,00	
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen fasilitasi dan evaluasi produk hukum kab/kota	Kaltim	300	Rp 800.000.000,00	APBD	300	Rp 800.000.000,00	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	Kaltim	100%	Rp 1.400.000.000,00	APBD	100%	Rp 1.444.000.000,00	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah dokumen penanganan perkara/sengketa hukum	Kaltim	10	Rp 900.000.000,00	APBD	10	Rp 900.000.000,00	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah laporan Non Litigasi dan HAM	Kaltim	2	Rp 500.000.000,00	APBD	2	Rp 544.000.000,00	
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT				Rp 57.629.985.000,00			Rp 63.268.880.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84%	Rp 2.762.112.264,00	APBD	85%	Rp 2.518.880.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 149.934.000,00	APBD	100%	Rp 151.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	Rp 26.724.000,00	APBD	2 Dokumen	Rp 26.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	Rp 52.116.000,00	APBD	2 Dokumen	Rp 50.000.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	Rp 22.178.000,00	APBD	2 Dokumen	Rp 25.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	Rp 48.916.000,00	APBD	3 Laporan	Rp 50.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92%	Rp	APBD	93%	Rp 293.000.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	Rp 259.262.000,00	APBD	12 Bulan	Rp 275.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	Rp 18.698.000,00	APBD	1 Laporan	Rp 18.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 31.260.000,00	APBD	100%	Rp 35.000.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Orang	Rp 31.260.000,00	APBD	4 Orang	Rp 35.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	Rp 1.415.893.000,00	APBD	12 Bulan	Rp 1.110.000.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 Paket	Rp 607.725.000,00	APBD	25 Paket	Rp 150.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	Rp 60.000.000,00	APBD	12 Paket	Rp 900.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp 748.168.000,00	APBD	12 Laporan	Rp 60.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan & Luar Negeri	12 Bulan	Rp 776.340.264,00	APBD	12 Bulan	Rp 814.880.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp 20.000.000,00	APBD	12 Laporan	Rp 20.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	Rp 44.880.000,00	APBD	12 Bulan	Rp 44.880.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Laporan	Rp 711.460.264,00		17 Laporan	Rp 750.000.000,00	Sub Kegiatan Baru
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Kategori Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	Rp 110.725.000,00	APBD	90%	Rp 115.000.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	Rp 89.705.000,00	APBD	10 Unit	Rp 90.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	Rp 21.020.000,00	APBD	20 Unit	Rp 25.000.000,00	
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyelesaian Bahan kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	Rp 54.867.872.736,00	APBD	90%	Rp 60.750.000.000,00	
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Penyelesaian Bahan kebijakan bidang bina mental spiritual	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 33.025.907.861,00	APBD	100%	Rp 38.500.000.000,00	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Unit	Rp 25.344.021.861,00	APBD	100 Unit	Rp 30.000.000.000,00	
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Lembaga	Rp 7.681.886.000,00	APBD	12 Lembaga	Rp 8.500.000.000,00	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Penyelesaian Bahan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 17.942.274.000,00	APBD	100%	Rp 18.300.000.000,00	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	Rp 1.366.242.000,00	APBD	13 Dokumen	Rp 1.500.000.000,00	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	Rp 749.910.000,00	APBD	12 Dokumen	Rp 800.000.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan							
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	Rp 15.826.122.000,00	APBD	13 Dokumen	Rp 16.000.000.000,00	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Penyelesaian Bahan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Non Pelayanan Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 3.899.690.875,00	APBD	100%	Rp 3.950.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	Rp 1.896.502.875,00	APBD	13 Dokumen	Rp 1.800.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Dokumen	Rp 1.332.084.000,00	APBD	20 Dokumen	Rp 1.400.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	Rp 671.104.000,00	APBD	12 Dokumen	Rp 750.000.000,00	
	BIRO PEREKONOMIAN				Rp 4.228.717.000,00	APBD		Rp 5.287.951.472,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 1.668.717.000,00			Rp 2.097.951.472,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 45.322.000,00		100%	Rp 50.807.300,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	4 dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 43.993.000,00		4 dokumen	Rp 48.392.300,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 10.860.000,00		4 laporan	Rp 11.946.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	95%	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 112.650.000,00		95%	Rp 131.175.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 112.650.000,00		12 Dokumen	Rp 131.175.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan	100%	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 13.440.000,00		1	Rp 14.784.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 13.440.000,00		1 laporan	Rp 14.784.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100%	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 30.900.000,00		1	Rp 33.313.988,40	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	24 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 1.200.000,00		24 Dokumen	Rp 1.320.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 29.700.000,00		25 orang	Rp 25.233.872,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 728.296.000,00		1	Rp 816.333.600,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	39 paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 39.000.000,00		39 paket	Rp 51.788.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1250 paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 30.000.000,00		1250 paket	Rp 33.300.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 18.016.000,00		12 paket	Rp 19.817.600,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	96 eksemplar	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 7.680.000,00		96 eksemplar	Rp 8.448.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 633.600.000,00		120 Laporan	Rp 855.360.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 51.164.000,00		1	Rp 138.415.520,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 51.164.000,00		13 unit	Rp 138.415.520,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 632.930.000,00		1	Rp 695.935.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 4.200.000,00		1 laporan	Rp 1.452.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 628.730.000,00		12 dokumen	Rp 697.102.680,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100%	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 54.015.000,00		1	Rp 67.098.200,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 35.765.000,00		1 unit	Rp 39.341.500,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 18.250.000,00		25 unit	Rp 20.075.000,00	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian	100%	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 2.560.000.000,00		1	Rp 3.190.000.000,00	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1 dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 640.000.000,00		1 dokumen	Rp 797.500.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 320.000.000,00		2 dokumen	Rp 398.750.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 320.000.000,00		1 dokumen	Rp 398.750.000,00	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1 dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 960.000.000,00		1 dokumen	Rp 1.196.250.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	3 dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 320.000.000,00		3 dokumen	Rp 398.750.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 320.000.000,00		2 dokumen	Rp 398.750.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 320.000.000,00		2 dokumen	Rp 398.750.000,00	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1 dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 960.000.000,00		1 dokumen	Rp 1.196.250.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 320.000.000,00		1 dokumen	Rp 398.750.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 320.000.000,00		1 dokumen	Rp 398.750.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 320.000.000,00		1 dokumen	Rp 398.750.000,00	
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				Rp 7.411.495.000,00			Rp 8.479.362.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan	Kaltim	84%	Rp 2.629.907.464,00	APBD	77,8	Rp 2.869.362.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan pada Biro Administrasi Pembangunan	Kaltim	90%	Rp 195.000.000,00	APBD	90	Rp 213.000.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	1 Dok	Rp 195.000.000,00	APBD	1	Rp 213.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Administrasi Pembangunan	Kaltim	85%	Rp 84.200.000,00	APBD	80	Rp 135.000.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kaltim	33 Paket	Rp 15.000.000,00	APBD	1	Rp 15.000.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kaltim	10 Orang	Rp 14.400.000,00	APBD	20	Rp 20.000.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kaltim	10 Orang	Rp 54.800.000,00	APBD	100	Rp 100.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Administrasi Pembangunan	Kaltim	2 Dokumen	Rp 816.231.180,00	APBD	90	Rp 865.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kaltim	10 Paket	Rp 6.781.800,00	APBD	2	Rp 15.000.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	15 Laporan	Rp 809.449.380,00	APBD	20	Rp 850.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	Kaltim	85%	Rp 175.351.900,00	APBD	85	Rp 200.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kaltim	20 Unit	Rp 175.351.900,00	APBD	20	Rp 200.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	85%	Rp 1.181.332.384,00	APBD		Rp 1.115.800.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	12 Laporan	Rp 2.000.000,00	APBD	4	Rp 15.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kaltim	12 Bulan	Rp 47.344.200,00	APBD	12	Rp 40.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	Kaltim	12 Laporan	Rp 1.131.988.184,00	APBD	12	Rp 1.060.800.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD dalam kondisi Baik	Kaltim	85%	Rp 177.792.000,00	APBD	85	Rp 340.562.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kaltim	1 Unit	Rp 17.000.000,00	APBD	1	Rp 40.562.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kaltim	3 Unit	Rp 121.482.000,00	APBD	2	Rp 250.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kaltim	20 Unit	Rp 39.310.000,00	APBD	20	Rp 50.000.000,00	
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan	Kaltim	100%	Rp 3.488.787.536,00	APBD	3	Rp 4.110.000.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan	Kaltim	80%	Rp 1.292.800.000,00			Rp 1.500.000.000,00	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	85%	Rp 3.488.787.536,00	APBD	90	Rp 4.110.000.000,00	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Kaltim	12 Laporan	Rp 528.234.000,00	APBD	1	Rp 610.000.000,00	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Kaltim	12 Laporan	Rp 456.500.000,00	APBD	2	Rp 500.000.000,00	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III	Kaltim	6 Laporan	Rp 2.504.053.536,00	APBD	2	Rp 3.000.000.000,00	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Meningkatnya hasil Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	80%	Rp 1.292.800.000,00	APBD	95	Rp 1.500.000.000,00	
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Kaltim	1 Dokumen	Rp 346.200.000,00	APBD	2	Rp 500.000.000,00	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	1 Dokumen	Rp 634.000.000,00	APBD	2	Rp 600.000.000,00	
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	1 Dokumen	Rp 312.600.000,00	APBD	2	Rp 400.000.000,00	
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA				Rp 7.563.981.000,00			Rp 7.557.107.708,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pengadaan Barang & Jasa	Kaltim	84	Rp 2.362.838.100,00	APBD	85	Rp 3.302.107.708,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya laporan keuangan yang akuntabel	Kaltim	90	Rp 134.278.000,00	APBD	90	Rp 134.278.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Kaltim	1	Rp 134.278.000,00	APBD	1	Rp 134.278.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas pegawai	Kaltim	80	Rp 217.600.000,00	APBD	80	Rp 514.680.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kaltim	1	Rp 56.800.000,00	APBD	1	Rp 31.500.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kaltim	20	Rp 85.800.000,00	APBD	20	Rp 420.000.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kaltim	5	Rp 75.000.000,00	APBD	100	Rp 63.180.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Administarsi Umum	Kaltim	90	Rp 565.061.500,00	APBD	90	Rp 566.460.500,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kaltim	1	Rp 140.890.000,00	APBD	1	Rp 176.988.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kaltim	2	Rp 55.799.500,00	APBD	2	Rp 16.902.500,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	20	Rp 368.372.000,00	APBD	20	Rp 372.570.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	meningkatnya pelayanan kantor	Kaltim	85	Rp 243.300.000,00	APBD	85	Rp 851.251.651,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kaltim	68	Rp 243.300.000,00	APBD	20	Rp 851.251.651,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan Administarsi Umum	Kaltim	85	Rp 1.141.399.600,00	APBD		Rp 1.131.521.557,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	4	Rp 5.250.000,00	APBD	4	Rp 5.250.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kaltim	12	Rp 82.767.200,00	APBD	12	Rp 77.013.800,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	Kaltim	12	Rp 1.053.382.400,00	APBD	12	Rp 1.049.257.757,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Kaltim	85	Rp 61.199.000,00	APBD	85	Rp 103.916.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kaltim	1	Rp 14.000.000,00	APBD	1	Rp 38.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kaltim	1	Rp 13.499.000,00	APBD	2	Rp 32.216.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kaltim	22	Rp 33.700.000,00	APBD	20	Rp 33.700.000,00	
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Kaltim	3	Rp 5.201.142.900,00	APBD	3	Rp 4.255.000.000,00	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa	Kaltim	88	Rp 1.462.430.000,00	APBD	90	Rp 1.347.256.600,00	
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	1	Rp 356.640.000,00	APBD	1	Rp 354.634.600,00	
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	2	Rp 725.990.000,00	APBD	2	Rp 607.830.000,00	
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	2	Rp 379.800.000,00	APBD	2	Rp 384.792.000,00	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase layanan Pengadaan secara elektronik	Kaltim	95	Rp 1.604.340.400,00	APBD	95	Rp 1.388.528.400,00	
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Kaltim	2	Rp 808.640.400,00	APBD	2	Rp 700.040.400,00	
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	2	Rp 312.600.000,00	APBD	2	Rp 330.300.000,00	
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	2	Rp 483.100.000,00	APBD	2	Rp 358.188.000,00	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	87,5	Rp 2.134.372.500,00	APBD	87,5	Rp 1.519.215.000,00	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	200	Rp 776.140.000,00	APBD	200	Rp 421.440.000,00	
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	1	Rp 677.215.000,00	APBD	1	Rp 629.815.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	1	Rp 681.017.500,00	APBD	1	Rp 467.960.000,00	
	BIRO ORGANISASI				Rp 6.472.183.000,00			Rp 11.337.007.220,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			84%	Rp 1.917.183.000,00		84%	Rp 4.562.670.655,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 110.000.000,00		100%	Rp 216.990.310,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp 110.000.000,00		1 Dokumen	Rp 216.990.310,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 10.000.000,00		100%	Rp 41.400.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	Rp 10.000.000,00		1 Laporan	Rp 41.400.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 108.960.000,00		100%	Rp 261.650.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	Rp 27.200.000,00		1 Paket	Rp 27.200.000,00	Usulan Sub Kegiatan baru TA 2023
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Orang	Rp 81.760.000,00		7 Orang	Rp 234.450.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro Organisasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 1.176.984.000,00		100%	Rp 3.330.530.165,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	Rp 55.121.000,00		1 Paket	Rp 37.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	Rp 281.000.000,00		2 Paket	Rp 300.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	Rp 21.028.000,00		1 Paket	Rp 49.700.585,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	Rp 31.980.000,00		1 Laporan	Rp 24.980.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	Rp 708.700.000,00		1 Laporan	Rp 2.839.694.580,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	Rp 79.155.000,00		2 Dokumen	Rp 79.155.000,00	Usulan Sub Kegiatan baru TA 2023
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 104.760.000,00		100%	Rp 250.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Unit	Rp 104.760.000,00		7 Unit	Rp 250.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Organisasi)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 335.923.000,00		100%	Rp 433.403.280,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	Rp 5.000.000,00		1 Laporan	Rp 17.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	Rp 330.923.000,00		1 Laporan	Rp 416.403.280,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Organisasi)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 70.556.000,00		100%	Rp 28.696.900,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Unit	Rp 32.406.000,00		14 Unit	Rp 13.956.900,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41 Unit	Rp 38.150.000,00		41 Unit	Rp 14.740.000,00	
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81%	Rp 4.555.000.000,00		81%	Rp 6.774.336.565,00	
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaan Organisasinya sesuai ketentuan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 1.605.000.000,00		100%	Rp 2.567.851.565,00	
		Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96%			96%		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp 750.000.000,00		1 Dokumen	Rp 1.145.703.125,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp 425.000.000,00		1 Dokumen	Rp 631.548.440,00	
	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp 430.000.000,00		1 Dokumen	Rp 790.600.000,00	
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan sesuai aturan / Ketentuan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 2.950.000.000,00		100%	Rp 4.206.485.000,00	
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp 1.000.000.000,00		1 Dokumen	Rp 1.320.000.000,00	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp 900.000.000,00		1 Dokumen	Rp 1.201.825.000,00	
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	Rp 250.000.000,00		1 Laporan	Rp 300.000.000,00	
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp 300.000.000,00		1 Dokumen	Rp 500.000.000,00	
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp 500.000.000,00		1 Dokumen	Rp 884.660.000,00	
BIRO UMUM									
	Program Administrasi Umum			84%	Rp 171.628.865.521,00		84%	Rp 203.932.814.800,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			84%			84%		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua	100%	Rp 556.298.000,00		100%	Rp 611.927.800,00	Usulan Kegiatan baru TA 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			Kecamatan, Semua Kelurahan						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	Rp 556.298.000,00		2 Dokumen	Rp 611.927.800,00	Usulan Sub Kegiatan baru TA 2023
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 80.023.539.568,00		100%	Rp 88.025.893.524,80	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	373 Orang/Bulan	Rp 77.827.745.568,00		373 Orang/Bulan	Rp 85.610.520.124,80	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	Rp 2.195.794.000,00		12 Dokumen	Rp 2.415.373.400,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Biro Umum	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 1.266.620.000,00		100%	Rp 1.393.282.000,00	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua	1 Laporan	Rp 354.000.000,00		1 Laporan	Rp 389.400.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			Kecamatan, Semua Kelurahan						
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp 912.620.000,00		12 Laporan	Rp 1.003.882.000,00	Usulan Sub Kegiatan baru TA 2023
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Biro Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 2.250.007.000,00		100%	Rp 2.475.007.700,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	Rp 494.950.000,00		4 Paket	Rp 544.445.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	Rp 1.187.477.000,00		314 Dokumen	Rp 1.306.224.700,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	225 Orang	Rp 567.580.000,00		225 Orang	Rp 624.338.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 24.872.815.863,00		100%	Rp 27.360.097.449,30	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Paket	Rp 600.753.645,00		7 Paket	Rp 660.829.009,50	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Paket	Rp 645.103.000,00		13 Paket	Rp 709.613.300,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Paket	Rp 7.889.512.000,00		50 Paket	Rp 8.678.463.200,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Paket	Rp 736.700.000,00		14 Paket	Rp 810.370.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan & Luar Negeri	1000 Orang	Rp 13.743.625.363,00		1000 Orang	Rp 15.117.987.899,30	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	Rp 730.341.415,00		1 Dokumen	Rp 803.375.556,50	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua	4 Dokumen	Rp 526.780.440,00		5 Dokumen	Rp 579.458.484,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			Kecamatan, Semua Kelurahan						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 9.821.797.030,00		100%	Rp 10.803.976.733,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	Rp 5.375.940.000,00		19 Unit	Rp 5.913.534.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Unit	Rp 4.445.857.030,00		300 Unit	Rp 4.890.442.733,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 26.715.690.869,00		100%	Rp 29.387.259.955,90	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp 82.000.000,00		12 Laporan	Rp 90.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp 9.400.000.000,00		12 Laporan	Rp 10.340.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	Rp 2.550.641.600,00		2 Laporan	Rp 2.805.705.760,00	Usulan Sub Kegiatan baru TA 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan ; Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp 14.683.049.269,00		12 Laporan	Rp 16.151.354.195,90	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 16.749.820.882,00		100%	Rp 18.424.802.970,20	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi Kalimantan Timur	150 Unit	Rp 7.411.670.050,00		150 Unit	Rp 8.152.837.055,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100 Unit	Rp 1.714.667.800,00		100 Unit	Rp 1.886.134.580,00	Usulan Sub Kegiatan baru TA 2023
	Pemeliharaan/ Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Banungan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Kalimantan Timur	13 Unit	Rp 7.339.333.032,00		13 Unit	Rp 8.073.266.335,20	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banungan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Kalimantan Timur	150 unit	Rp 284.150.000,00		150 unit	Rp 312.565.000,00	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan baik	Samarinda	100%	Rp 11.186.418.788,00		100%	Rp 12.305.060.666,80	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Samarinda	2 Orang/Bulan	Rp 250.252.396,00		2 Orang/Bulan	Rp 275.277.635,60	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		4 Paket	Rp 187.600.000,00		4 Paket	Rp 206.360.000,00	Usulan Sub Kegiatan baru TA 2023
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		8 Orang	Rp 870.000.000,00		8 Orang	Rp 957.000.000,00	Usulan Sub Kegiatan baru TA 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH		12 Laporan	Rp 9.878.566.392,00		12 Laporan	Rp 10.866.423.031,20	Usulan Sub Kegiatan baru TA 2023
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 11.950.460.000,00		100%	Rp 13.145.506.000,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Paket	Rp 5.120.061.000,00		90 Paket	Rp 5.632.067.100,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Paket	Rp 4.923.145.000,00		90 Paket	Rp 5.415.459.500,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Paket	Rp 1.907.254.000,00		100 Paket	Rp 2.097.979.400,00	
					Rp			Rp	
	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN				Rp 13.793.261.000,00			Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			85%	Rp 13.793.261.000,00		85%	Rp 16.567.619.930,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 158.520.000,00		100%	Rp 342.548.288,00	
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	Rp 158.520.000,00		12 Dokumen	Rp 342.548.288,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 1.088.313.704,00		100%	Rp 1.536.669.159,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Paket	Rp 129.248.050,00		1 Laporan	Rp 25.944.589,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Paket	Rp 26.304.274,00		100%	Rp 15.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Laporan	Rp 809.449.380,00		1 Paket	Rp 1.353.635.570,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Paket	Rp 123.312.000,00		7 Orang	Rp 142.089.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 107.200.000,00		100%	Rp 185.292.900,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	Rp 107.200.000,00		1 Paket	Rp 185.292.900,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 148.219.000,00		2 Paket	Rp 149.064.996,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	Rp 49.419.000,00		1 Paket	Rp 49.464.996,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	Rp 98.800.000,00		1 Laporan	Rp 99.600.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 816.358.000,00		1 Laporan	Rp 938.811.700,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	Rp 724.658.000,00		8 Dokumen	Rp 833.356.700,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	Rp 91.700.000,00		4 Dokumen	Rp 105.455.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 588.404.000,00		7 Unit	Rp 488.404.250,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	Rp 170.000.000,00		100%	Rp 110.500.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	Rp 418.404.000,00		1 Laporan	Rp 377.904.250,00	
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 6.830.660.000,00		1 Laporan	Rp 9.011.407.680,00	
	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang disiapkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	Rp 580.680.000,00		100%	Rp 496.858.310,00	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	Rp 3.500.000.000,00		14 Unit	Rp 6.014.549.370,00	
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp 2.749.980.000,00		41 Unit	Rp 2.500.000.000,00	
	Fasilitasi Keprotokolan	Tersedianya Fasilitas Keprotokolan Sekretariat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 1.974.416.570,00		81%	Rp 2.391.937.025,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp 1.035.380.000,00		100%	Rp 966.591.615,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	Rp 686.028.000,00		96%	Rp 900.405.410,00	
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp 253.008.570,00		1 Dokumen	Rp 524.940.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 1.546.121.032,00		1 Dokumen	Rp 1.523.483.932,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp 1.498.776.832,00		1 Dokumen	Rp 1.498.776.832,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	Rp 47.344.200,00		100%	Rp 24.707.100,00	

Sumber: kompilasi data Biro-Biro di Lingkup Setda Prov. Kaltim

BAB V

Penutup

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan atau dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode satu tahun yang sifatnya operasional, yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023. Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, diharapkan komitmen sebagai kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Perencanaan yang baik adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan ketentuan dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya.

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan pada tahun 2023, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mendukung pencapaian sasaran tersebut. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Samarinda, Juli 2022

Lampiran

REKAPITULASI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT PROVINSI KALTIM TAHUN 2019,2020 dan 2021

NO	INSTANSI	Evaluasi Tahun 2019 Terhadap SAKIP 2018		Evaluasi Tahun 2020 Terhadap SAKIP 2019		Evaluasi Tahun 2021 Terhadap SAKIP 2020		Kenaikan / Penurunan Th. 2021 Terhadap Th. 2020	
		HASIL EVALUASI	KATEGORI/ INTERPRETASI	HASIL EVALUASI	KATEGORI/ INTERPRETASI	HASIL EVALUASI	KATEGORI/ INTERPRETASI	Nilai	Persen
1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	79,45	BB/Sangat Baik	75,34	BB/Sangat Baik	76,17	BB/Sangat Baik	0,83	101,10%
2	Inspektorat Wilayah	78,84	BB/Sangat Baik	79,15	BB/Sangat Baik	79,15	BB/Sangat Baik	0,00	100,00%
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	77,70	BB/Sangat Baik	79,43	BB/Sangat Baik	78,19	BB/Sangat Baik	-1,24	98,44%
4	Badan Kepegawaian Daerah	77,28	BB/Sangat Baik	79,36	BB/Sangat Baik	76,09	BB/Sangat Baik	-3,27	95,88%
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM);	74,79	BB/Sangat Baik	70,79	BB/Sangat Baik	70,06	BB/Sangat Baik	-0,73	98,97%
6	RSUD Dr. Kanujoso Djati W. Balikpapan	73,55	BB/Sangat Baik	75,98	BB/Sangat Baik	75,85	BB/Sangat Baik	-0,13	99,83%
7	Dinas Kehutanan	72,86	BB/Sangat Baik	71,00	BB/Sangat Baik	70,58	BB/Sangat Baik	-0,42	99,41%
8	Sekretariat DPRD	70,59	BB/Sangat Baik	71,04	BB/Sangat Baik	70,32	BB/Sangat Baik	-0,72	98,98%
9	Badan Pendapatan Daerah	69,31	B/Baik	74,98	BB/Sangat Baik	72,95	BB/Sangat Baik	-2,03	97,29%
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	69,05	B/Baik	74,79	BB/Sangat Baik	75,60	BB/Sangat Baik	0,81	101,08%
11	Dinas Sosial	68,77	B/Baik	70,39	BB/Sangat Baik	70,99	BB/Sangat Baik	0,60	100,85%
12	RSUD A.W. Sjachranie Samarinda	68,04	B/Baik	70,68	BB/Sangat Baik	74,10	BB/Sangat Baik	3,42	104,84%
13	Dinas Kesehatan	67,92	B/Baik	70,06	BB/Sangat Baik	70,33	BB/Sangat Baik	0,27	100,38%
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	67,82	B/Baik	65,78	B/Baik	63,82	B/Baik	-1,96	97,02%
15	Dinas Perhubungan	67,22	B/Baik	72,32	BB/Sangat Baik	71,28	BB/Sangat Baik	-1,04	98,56%
16	Badan Penghubung	66,52	B/Baik	67,63	B/Baik	71,07	BB/Sangat Baik	3,44	105,09%
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	66,43	B/Baik	68,35	B/Baik	70,09	BB/Sangat Baik	1,74	102,55%
18	Sekretariat Daerah	65,54	B/Baik	67,23	B/Baik	59,14	CC/Cukup	-8,09	87,97%
19	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura	64,11	B/Baik	63,48	B/Baik	62,57	B/Baik	-0,91	98,56%
20	RSJD Alma Husada Mahakam	63,79	B/Baik	75,27	BB/Sangat Baik	75,62	BB/Sangat Baik	0,35	100,46%
21	Dinas Pariwisata	63,78	B/Baik	65,71	B/Baik	64,95	B/Baik	-0,76	98,84%
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	62,95	B/Baik	56,86	CC/Cukup	61,84	B/Baik	4,98	108,76%
23	Dinas Perkebunan	62,74	B/Baik	69,93	B/Baik	72,43	BB/Sangat Baik	2,50	103,58%
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	62,66	B/Baik	64,07	B/Baik	66,04	B/Baik	1,97	103,07%
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62,53	B/Baik	60,01	B/Baik	62,78	B/Baik	2,77	104,62%
26	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	60,34	B/Baik	63,84	B/Baik	63,84	B/Baik	0,00	100,00%
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	60,24	B/Baik	62,38	B/Baik	64,07	B/Baik	1,69	102,70%
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	59,37	CC/Cukup	60,32	B/Baik	62,11	B/Baik	1,79	102,97%
29	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	59,19	CC/Cukup	56,77	CC/Cukup	59,26	CC/Cukup	2,49	104,39%
30	Dinas Lingkungan Hidup	58,14	CC/Cukup	62,23	B/Baik	65,93	B/Baik	3,70	105,95%
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	57,75	CC/Cukup	57,19	CC/Cukup	57,40	CC/Cukup	0,21	100,37%
32	Dinas Komunikasi dan Informatika	56,83	CC/Cukup	55,15	CC/Cukup	57,29	CC/Cukup	2,14	103,88%
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	56,31	CC/Cukup	54,12	CC/Cukup	51,11	CC/Cukup	-3,01	94,45%
34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	56,17	CC/Cukup	54,02	CC/Cukup	50,35	CC/Cukup	-3,67	93,21%
35	Satuan Polisi Pamong Praja	54,48	CC/Cukup	62,73	B/Baik	57,12	CC/Cukup	-5,61	91,06%
36	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat	54,29	CC/Cukup	56,37	CC/Cukup	57,91	CC/Cukup	1,55	102,74%
37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42,68	C/Kurang	50,82	CC/Cukup	51,09	CC/Cukup	0,27	100,53%



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GAJAH MADA, TELEPON : (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 - 742111

Website : <http://kaltimprov.go.id>

SAMARINDA 75121

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalimantan Timur
Dari : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalimantan Timur
Tanggal : 28 Januari 2022
Nomor : 050.14/0096 -II/B.Kesra
Hal : Usulan Nomenklatur Sub Kegiatan Baru pada Renja Sekretariat Daerah 2023

Sehubungan dengan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam tahun 2022, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Timur dalam mengalokasikan anggaran pegawai kontrak pada nomenklatur sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan dengan kode rekening 4.01.01.1.02.03.
2. Berdasarkan hasil asistensi RKA Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022, untuk alokasi anggaran pegawai kontrak pada nomenklatur sub kegiatan tersebut kurang tepat seharusnya menggunakan nomenklatur sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan kode rekening 4.01.01.1.08.04..
3. Berdasarkan hal tersebut, kami mengusulkan melalui Biro Administrasi pimpinan untuk penambahan nomenklatur sub kegiatan baru, yakni Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan kode rekening 4.01.01.1.08.04 pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat,

Drs. Andi Muhammad Ishak, Apt, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680814 199403 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur
Telpon : (0541) 733333 Fax. (0541) 737762 – 742111
Website : <http://kaltim.go.id>

TELAAHAN STAF

Kepada : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda
Prov. Kaltim
Dari : Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
Tanggal : 24 Januari 2022
Nomor : 050 / 154 / Adpim-I
Perihal : **Usulan Penambahan Sub. Kegiatan**

Memperhatikan program, kegiatan dan Sub. Kegiatan pada Biro Hubungan Masyarakat terdapat Sub. Kegiatan yang belum terakomodir di Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021.

Berkaitan hal tersebut dengan ini diusulkan penambahan Sub. Kegiatan pada Biro Administrasi Pimpinan yang disesuaikan dengan hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk Rencana Kerja Tahun 2023 adalah :

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH
03.00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG USULAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
4.01.01.1.01	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
4.01.01.1.....	Penyusunan Dokumen Perencanaan Biro Administrasi Pimpinan

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian,

Setyo / proses 2


Inni Indarpuri, S.Hut, M.Si.
Pembina Tingkat I
Nip. 197008051992032016



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GAJAH MADA, TELEPON : (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 - 742111

Website : <http://kaltimprov.go.id>

SAMARINDA 75121

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Prov. Kaltim
Dari : Plh. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kaltim
Tanggal : 24 Januari 2022
Nomor : 910 / 0858 / B.Um.I
Hal : **Usulan Penambahan Kegiatan dan Sub. Kegiatan**

Dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Sekretariat Daerah, Perlu di dukung Perencanaan dan Penganggaran yang mengcover Pelaksanaan kegiatan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan usulan Penambahan Kegiatan dan Sub. Kegiatan pada Usulan Renja Tahun 2023 yang telah di sesuaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, adapun usulan terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Pih. KEPALA BIRO UMUM



HANA IRIANA, S.E., M.M.

PEMBINATINGKAT I

NIP. 19681016 199703 2 004

Matrik Usulan Penambahan Kegiatan dan Sub. Kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH
03.00	BIRO UMUM
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
4.01.01.1.01	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.01.01.1.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4.01.01.1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01.01.1.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.01.01.1.11	<i>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>
4.01.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.01.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GAJAH MADA, TELEPON : (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 - 742111

Website : <http://kaltimprov.go.id>

SAMARINDA 75121

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Prov. Kaltim
Dari : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 050/456/B.Org-TL
Tanggal : 17 Juni 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lembar
Hal : Permohonan pengusulan penambahan Sub Kegiatan

Bersama ini disampaikan permohonan pengusulan penambahan Sub Kegiatan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di aplikasi SIPD, dimana sub kegiatan baru ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 belum terakomodir didalam sub kegiatan yang ada pada aplikasi SIPD sekarang ini.

Adapun pengusulan ini didasarkan pada masih terdapatnya Sub-Sub Kegiatan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5899 Tahun 2021 yang dapat menunjang dalam pelaksanaan kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur kedepannya, khususnya di tahun 2023 (table usulan terlampir), untuk itu agar dapat dimasukkan di dalam dokumen Renstra Perubahan 2019-2023 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur,

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Biro Organisasi,

Iwan Setiawan, S.Sos.,M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 196809021988021002

Tembusan :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

**TABEL USULAN SUB KEGIATAN BARU BIRO ORGANISASI SETDA PROV. KALTIM
TAHUN ANGGARAN 2023**

SEMULA			MENJADI		
KODE REKENING	SUB KEGIATAN	PAGU	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	PAGU
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 211.115.000,00	4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 104.760.000,00
			4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 27.200.000,00
			4.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 79.155.000,00
					-

MS



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 – 742111
Home Page : <http://kaltimprov.go.id>
SAMARINDA 75121

Samarinda, 25 Maret 2022

Kepada

Nomor : 005/2187/Adpim-I

Yth. (DAFTAR TERLAMPIR)

Lamp. : 2 (dua)

di-

Sifat : Penting

SAMARINDA

Hal : Undangan Forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Renja Setda Prov. Kaltim Tahun 2023

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 050/1390/B.PPEPD-Bapp/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) menjadi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai bagian proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Setda Prov. Kaltim Tahun 2023, maka akan dilaksanakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dengan tema "Sinergitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur" yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 Maret 2022

Waktu : (Jadwal terlampir)

Tempat : Hotel Grand Jatra (Lt. 8)

Mall Super Block, Jl. Jenderal Sudirman No.47,

Gn. Bahagia, Kota Balikpapan

Untuk konfirmasi kesediaan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Eduardo Heyko (0853-9080-9320).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Pj. Sekretaris Daerah,

SEKRETARIAT DAERAH
R. Riza Indra Rjadi, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19641028 199003 1 009

LAMPIRAN UNDANGAN NOMOR: 005/2187/Adpim-I:

1. Inspektur Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov. Kaltim;
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekda Prov. Kaltim;
4. Asisten Administrasi Umum Sekda Prov. Kaltim;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim;
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim;
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kaltim;
10. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kaltim;
11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim;
12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kaltim;
13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim;
14. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kaltim;
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim;
16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim;
17. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim;
18. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim;
19. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kaltim;
20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim;
21. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim;
22. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim;
23. Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim;
24. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim;
25. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim;
26. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim;
27. Kepala Dinas Sosial Prov. Kaltim;
28. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim;
29. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim;
30. Kepala Dinas Pariwisata Prov. Kaltim;
31. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Prov. Kaltim;
32. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim;
33. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim;
34. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Prov. Kaltim;
35. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Prov. Kaltim;

36. Kepala Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam Prov. Kaltim;
37. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Kaltim;
38. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim;
39. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim;
40. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kaltim;
41. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltim;
42. Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Kaltim;
43. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kaltim;
44. Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim;
45. Kepala Biro Umum Setda Prov. Kaltim;
46. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kaltim;
47. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kaltim;
48. Dirut Perusda Bara Kaltim Sejahtera Prov. Kaltim;
49. Dirut Perusda PT. Migas Mandiri Pratama Prov. Kaltim;
50. Dirut Perusda Perkebunan Prov. Kaltim;
51. Dirut Perusda Sylva Kaltim Sejahtera Prov. Kaltim;
52. Dirut Perusda PT. Ketenagalistrikan Prov. Kaltim;
53. Dirut Perusda Jamkrida Kaltim;
54. Dirut Bank Kaltimtara;
55. Dirut Perusda Melati Bhakti Satya.

JADWAL KEGIATAN
FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
RENJA SETDA PROV. KALTIM TAHUN 2023
Balikpapan, 28 Maret 2022

HARI/TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
Senin, 28 Maret 2022	08.30 - 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
	09.00 - 09.30	Pembukaan:	
		1. Mendengarkan Lagu Indonesia Raya	Panitia
		2. Pembacaan Doa	Panitia
		3. Laporan Ketua Panitia	Karo Adpim
		4. Sambutan Sekaligus Pembukaan Forum	Pj. Sekda
		5. Penyerahan <i>Reward</i> untuk Biro yang terbaik dalam aspek Perencanaan dan Pelaporan	Pj. Sekda
	09.30 - 09.45	<i>Coffee Break</i>	Panitia
	09.45 - 10.15	1. Materi 1	Pj. Sekda
10.15 - 10.45	2. Materi 2	Kepala Bappeda	
10.45 - 12.45	Diskusi dan tanya jawab	Peserta/Panitia	
12.45 - 13.00	Penandatanganan Berita Acara & Penutupan	Peserta/Panitia	

BERITA ACARA

HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

dengan tema:

"Sinergitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur"

Nomor : 060/2239/Adpim-I

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun 2022, telah dilaksanakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan tema "Sinergitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur" yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan Materi oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan, Inni Indarpuri, S.Hut., M.Si., mewakili Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Sinergitas Program Lintas Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
- b. Pemaparan Materi oleh Staf Bagian Pemerintahan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Ali Mudzakkir, mewakili Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tentang Proses dan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan.
- c. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum terhadap materi yang disampaikan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan, maka pada:

Hari, tanggal : Senin, 28 Maret 2022

Pukul : 09.00 s/d selesai

Tempat : Grand Jatra Hotel Balikpapan

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan tema "Sinergitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur" :

MENYEPAKATI

- KESATU** : Menyepakati program dan kegiatan prioritas serta indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah;
- KEDUA** : Menyepakati Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II Berita Acara ini;

- KETIGA : Menyetakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III Berita Acara ini;
- KEEMPAT : Menyetakati Berita Acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I, II, III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan tema "Sinergitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur"; dan
- KELIMA : Berita Acara ini beserta lampiran dijadikan sebagai bahan penyempurnaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, tanggal 28 Maret 2022

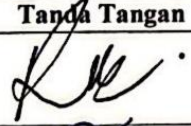




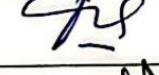
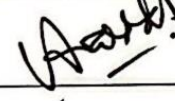

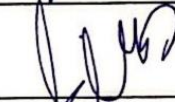

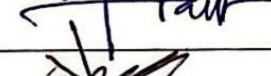



Rimpinan Sidang
Pi. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



Ir. Riza Indra Riadi, M.Si.
Kenduta Utama Madya
NIP. 19641028 199003 1 009

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan tema "Sinergitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur".

No	Nama	Lembaga / Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Riza Indra Riadi, M.Si	Sekretariat Daerah Prov. Kaltim	Pj. Sekretaris Daerah	
2	H. M. Syafranuddin	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kaltim	Kepala Biro	
3	Andi M. Ishak	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kaltim	Kepala Biro	
4	Iwan Setiawan	Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim	Kepala Biro	
5	Anik Suhartatik	Biro Perekonomian Setda Prov. Kaltim	Kepala Bagian	
6	Evian Agus S.	Biro Hukum Setda Prov. Kaltim	Kepala Bagian	
7	Awaluddin	Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltim	Kepala Sub Bagian	
8	Ifa Ahmadi	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kaltim	Kepala Sub Bagian	
9	Umi Wahyuni A.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim	Kepala Sub Bagian	
10	Awang Ferdian K.	Biro Umum Setda Prov. Kaltim	Staf	
11	Arih F. F. Sembiring	Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	Kepala Dinas	
12	Gazali Rachman	Inspektorat Wilayah Kaltim	Inspektur Pembantu	
13	Ir. Surono	Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	Sekretaris	
14	Haryati Rachman	RSUD Abdul Wahab Sjahranie	Kepala Bagian	

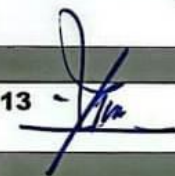


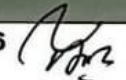
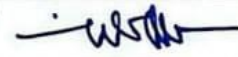
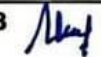
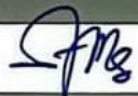



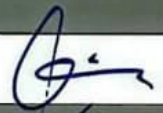




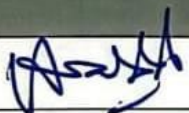
LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 DENGAN TEMA "SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR"







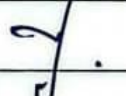
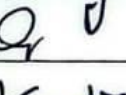

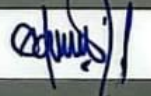




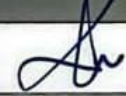

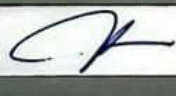
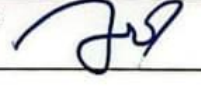
NOMOR : 060/2239/Adpim-I
TANGGAL : 28 MARET 2022



DAFTAR HADIR : Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah RENJA Setda Prov. Kaltim Tahun 2023
HARI/TANGGAL : Senin, 28 Maret 2022
PUKUL : 09.00 WITA - Selesai
TEMPAT : Balikpapan

NO	NAMA	INSTANSI KERJA	JABATAN	NOMOR HP/EMAIL	TANDA TANGAN
a	b	c	d	e	f
1	Riza Indra Riadi		PI. SETDA		1
2	H. M. Syarifuddin	Biro Adpim	Karo		2
3	Inni Indarvini	- - -	Kabag		3
4	Supiatmala	Biro Adpim	Kasubag		4
5	Astuti Darma	- - -	Kasub. TU		5
6	Herkiel Anwar	Biro Adpim	Kasubag		6
7	Iwan Setiawan	Biro Organisasi	Karo		7
8	Evisn Agus. S	Biro Hukum	Kabag	081250000818	8
9	Yoliana	- - -	Kasub TU		9
10	Fenny	- - -	Staff		10
11	Umi Wahyuni . A	BPOD	Kasub TU		11
12	Rizqul HW	BPOD	Staff		12

NO	NAMA	INSTANSI KERJA	JABATAN	NOMOR HP/EMAIL	TANDA TANGAN
a	b	c	d	e	f
13	Juanda	Kesbangpol	Kasub. Umum		13 
14	R. Rizki A	Kesbangpol	staf		14 
15	Huzi Farida	Disperindagstap & UKM	staf perencanaan	085248664849	15 
16	Jawar	—	—	082422210445	16 
17	M. Fauz Mudayat	Biro Umum	staf	085386960011	17 
18	FIRMAN	—	STAF	0852 5154 1707	18 
19	Anik Subartatik	Biro Ekonomi	Kabag KR		19 
20	Nanik Purwantiningsih	—	Kasubbag TU		20 
21	Athfal	—	staf TU		21 
22	Anai M. Ishale	B. Kesra	Kepala	085247011237	22 
23	WAKOM	Balitbangku	Kasubbag Kes		23 
24	Ela. s	—	staf		24 
25	Wahyuni M.	—	staf		25 
26	Haryati Dachman	RSUD AUS	Kasub perencanaan		26 
27	Siti Warahun HS	RSUD AUS	Kasubbag Evtlap		27 
28	AWALUDDIN	BIRO ADONAN	KSB. TU	08125365190	28 

NO	NAMA	INSTANSI KERJA	JABATAN	NOMOR HP/EMAIL	TANDA TANGAN	
a	b	c	d	e	f	
29	Kur-perdian	B. umum	staf		29	
30	Wahyu Dwi A	B. Umum	staf			30 
31	Gosoli-p	Inspektoral			31	
32	ROHMAL AMAR	B Adpin	staf			32 
33	MARYUDI	Dishub			33	
34	Payan.s	Resek Selu				34
35	Ety Kusuma	Ps kanyasa			35	
36	AFF-Sambiring	Dishub	Kadris			36 
37	Edwin Aquaranta B.	Disturb	Driver Kadris		37	
38	Ali Mubakkir	Bapped.	staf.			38 
39	DENY. WARDHANI	UPTD I PU			39	
40	SURONO	Disbu	Selubri			40 
41	Arni	~	staf		41	
42	M. Fachro	~	u			42 
43	IFO AHMADI	Biro PBJ	Kabing PCDM		43	
44	Amad B	~	staf			44 

NO	NAMA	INSTANSI KERJA	JABATAN	NOMOR HP/EMAIL	TANDA TANGAN	
a	b	c	d	e	f	
45	Khairina Z.M.	B. Adpim	staf	085753379575	45	
46	Dita Shaprina	Biro Adpim	Staff	0821-1069-0619	46	
47	Eduardo H.	Biro Adpim	staf		47	
48	Arwinda D.	Biro Adpim	staf	08525476555	48	
49	M.Haekel F.P	'	staf	08525050 6857	49	
50	TADRISAH	STAF SEKOR	STAF	0052-5000-6960	50	
51	DODI HIDAYAT	STAF SEKOR	— —		51	
52	VIKRA AFIRINA	B. Adpim	staf		52	
53	ANBI IKHANDY	Ar //	staf		53	
54	Winda H.A.	— —	— —		54	
55	INDRI WAHYUNI	B. ADPIM	STAF		55	
56	Herlino	"	"		56	
57	Nelilyawati	— —	— —		57	
58	Husnul Khotimah	— —	— —		58	
59	Harris Y	— —	staf		59	
60	Wahyu S.	— —	— —		60	

LAMPIRAN II : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 DENGAN TEMA "SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR"

NOMOR : 060/ /Adpim-I

TANGGAL : 28 MARET 2022

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
BIRO UMUM									
	Sekretariat Daerah			84%	Rp171.628.865.521		84%	Rp188.791.752.073	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			84%	Rp171.628.865.521		84%	Rp188.791.752.073	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	Rp 500.000.000		100%	Rp 550.000.000	Usulan Kegiatan baru TA 2023
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	Rp 500.000.000		2 Dokumen	Rp 550.000.000	Usulan Sub Kegiatan baru TA 2023
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 82.088.655.674		100%	Rp 90.297.521.241	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	352 Orang/Bulan	Rp 80.457.301.674		352 Orang/Bulan	Rp 88.503.031.841	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	Rp 1.631.354.000		12 Dokumen	Rp 1.794.489.400	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Biro Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 1.127.526.000		100%	Rp 1.240.278.600	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	111 Laporan	Rp 526.450.000		111 Laporan	Rp 579.095.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	Rp 601.076.000		12 Laporan	Rp 661.183.600	Usulan Sub Kegiatan baru TA 2023
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Biro Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 2.070.016.000		100%	Rp 2.277.017.600	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	Rp 500.000.000		4 Paket	Rp 550.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	314 Dokumen	Rp 1.220.016.000		314 Dokumen	Rp 1.342.017.600	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	225 Orang	Rp 350.000.000		225 Orang	Rp 385.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 18.135.610.017		100%	Rp 19.949.171.019	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Paket	Rp 350.000.000		7 Paket	Rp 385.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Paket	Rp 614.358.000		13 Paket	Rp 675.793.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Paket	Rp 2.500.000.000		50 Paket	Rp 2.750.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Paket	Rp 693.200.000		14 Paket	Rp 762.520.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan & Luar Negeri	1000 Orang	Rp 12.978.052.017		1000 Orang	Rp 14.275.857.219	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp 600.000.000		1 Dokumen	Rp 660.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	Rp 400.000.000		5 Dokumen	Rp 440.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 7.500.000.000		100%	Rp 8.250.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	19 Unit	Rp 5.000.000.000		19 Unit	Rp 5.500.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Unit	Rp 2.500.000.000		300 Unit	Rp 2.750.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 20.973.865.521		100%	Rp 23.071.252.073	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp 80.000.000		12 Laporan	Rp 88.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	12 Laporan	Rp 8.628.865.521		12 Laporan	Rp 9.491.752.073	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Laporan	Rp 765.000.000		2 Laporan	Rp 841.500.000	Usulan Sub Kegiatan baru TA 2023
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	12 Laporan	Rp 11.500.000.000		12 Laporan	Rp 12.650.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kalimantan Timur	100%	Rp 14.046.773.521		100%	Rp 15.451.450.873	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi Kalimantan Timur	150 Unit	Rp 5.095.777.400		150 Unit	Rp 5.605.355.140	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100 Unit	Rp 1.000.000.000		100 Unit	Rp 1.100.000.000	Usulan Sub Kegiatan baru TA 2023
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Banugnan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Kalimantan Timur	13 Unit	Rp 7.400.996.121		13 Unit	Rp 8.141.095.733	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banungan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Kalimantan Timur	150 unit	Rp 550.000.000		150 unit	Rp 605.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan baik	Samarinda	100%	Rp 11.186.418.788		100%	Rp 12.305.060.667	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Samarinda	2 Orang/Bulan	Rp 250.252.396		2 Orang/Bulan	Rp 275.277.636	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		4 Paket	Rp 187.600.000		4 Paket	Rp 206.360.000	Usulan Sub Kegiatan baru TA 2023
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		8 Orang	Rp 870.000.000		8 Orang	Rp 957.000.000	Usulan Sub Kegiatan baru TA 2023
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH		12 Laporan	Rp 9.878.566.392		12 Laporan	Rp 10.866.423.031	Usulan Sub Kegiatan baru TA 2023
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 14.000.000.000		100%	Rp 15.400.000.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Paket	Rp 4.500.000.000		90 Paket	Rp 4.950.000.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Paket	Rp 4.500.000.000		90 Paket	Rp 4.950.000.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Paket	Rp 5.000.000.000		100 Paket	Rp 5.500.000.000	
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sekretariat Daerah								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan	Kaltim	83%			83%		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kaltim	100%	Rp 677.993.800		100%	Rp 677.993.800	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kaltim	2 Dokumen	Rp 670.835.000		2 Dokumen	Rp 670.835.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Biro Adpim	Jumlah Dokumen Perencanaan Biro adpim	Kaltim	2 dokumen			2 dokumen		Usulan Sub kegiatan baru di tahun 2023
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja lingkup Setda	Kaltim	4 Dokumen	Rp 7.158.800		4 Dokumen	Rp 7.158.800	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan baik	Kaltim	100%	Rp 376.803.116		100%	Rp 376.803.116	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan ASN	Kaltim	12 Dokumen	Rp 376.803.116		12 Dokumen	Rp 376.803.116	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Kaltim	100%	Rp 537.244.675		100%	Rp 537.244.675	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan hasil pendidikan dan pelatihan	Kaltim	4 Laporan	Rp 121.550.000		4 Laporan	Rp 121.550.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Setda	Kaltim	2 Dokumen	Rp 415.694.675		2 Dokumen	Rp 415.694.675	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	100%	Rp 1.575.850.521		100%	Rp 1.575.850.521	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan peralatan Alat tulis kantor	Kaltim	12 Laporan	Rp 28.539.047		12 Laporan	Rp 28.539.047	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Kaltim	12 Laporan	Rp 16.500.000		12 Laporan	Rp 16.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	Kaltim	160 O/T	Rp 1.374.513.574		160 O/T	Rp 1.374.513.574	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang diadakan	Kaltim	1000 Porsi	Rp 156.297.900		1000 Porsi	Rp 156.297.900	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim	100%	Rp 203.822.190		100%	Rp 203.822.190	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Kaltim	5 Jenis	Rp 203.822.190		5 Jenis	Rp 203.822.190	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	100%	Rp 163.971.495		100%	Rp 163.971.495	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya (STNK) dan dipelihara	Kaltim	15 Unit	Rp 54.411.495		15 Unit	Rp 54.411.495	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	Kaltim	12 laporan	Rp 109.560.000		12 laporan	Rp 109.560.000	
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Kaltim	100%	Rp 9.802.548.448		100%	Rp 9.802.548.448	
	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah dokumen naskah pidato dan presentasi	Kaltim	12 Dokumen	Rp 546.544.141		12 Dokumen	Rp 546.544.141	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah dokumen yang terpublikasi	Kaltim	12 Dokumen	Rp 8.671.288.307		12 Dokumen	Rp 8.671.288.307	
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah dokumen penyediaan data yang terdokumentasi	Kaltim	12 Dokumen	Rp 584.716.000		12 Dokumen	Rp 584.716.000	
	Fasilitasi Keprotokolan	Tersedianya Fasilitas Keprotokolan Sekretariat Daerah	Kaltim	100%	Rp 2.638.412.727		100%	Rp 2.638.412.727	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah dokumen koordinasi acara kegiatan Pemda	Kaltim	4 Dokumen	Rp 1.063.250.776		4 Dokumen	Rp 1.063.250.776	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dokumen kunjungan tamu yang terlayani	Kaltim	2 Dokumen	Rp 990.445.951		2 Dokumen	Rp 990.445.951	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah dokumen administrasi keprotokolan	Kaltim	2 Dokumen	Rp 584.716.000		2 Dokumen	Rp 584.716.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	100%	Rp 1.675.832.325		100%	Rp 1.675.832.325	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	Kaltim	12 Dokumen	Rp 1.648.654.515		12 Dokumen	Rp 1.648.654.515	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Listrik, dan Sumber Daya Air yang terbayarkan	Kaltim	12 Laporan	Rp 27.177.810		12 Laporan	Rp 27.177.810	
BIRO HUKUM									
4	1					Rp 6.000.000.000		Rp 6.356.090.000	
4	1	1				Rp 1.505.500.000	APBD	Rp 1.506.090.000	
4	1	1	1.01			Rp 4.410.000	APBD	Rp 5.000.000	
4	1	1	1.01	1		Rp 4.410.000	APBD	Rp 5.000.000	
4	1	1	1.02			Rp 103.920.000	APBD	Rp 103.920.000	
4	1	1	1.02	3		Rp 103.920.000	APBD	Rp 103.920.000	
4	1	1	1.03			Rp 7.680.000	APBD	Rp 7.680.000	
4	1	1	1.03	5		Rp 7.680.000	APBD	Rp 7.680.000	
4	01	001	1.05			Rp 72.000.000	APBD	Rp 72.000.000	
4	01	001	1.05	009		Rp 72.000.000	APBD	Rp 72.000.000	

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah		100%	Rp 664.721.551	APBD	100%	Rp 664.721.551	
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan pengadaan ATK		12	Rp 83.709.351	APBD	12	Rp 83.709.351	
4	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan		701	Rp 20.060.200	APBD	701	Rp 20.060.200	
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan barang cetakan dan penggandaan		12	Rp 60.952.000	APBD	12	Rp 60.952.000	
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi		40	Rp 500.000.000	APBD	40	Rp 500.000.000	
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	Rp 458.762.944	APBD	12	Rp 458.762.944	
4	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan		300	Rp 5.000.000	APBD	300	Rp 5.000.000	
4	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan gaji non ASN		12	Rp 453.762.944	APBD	12	Rp 453.762.944	
4	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		100%	Rp 24.750.000	APBD	100%	Rp 24.750.000	
4	1	1	1.09	5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah laporan pemeliharaan peralatan kantor		12	Rp 24.750.000	APBD	12	Rp 24.750.000	
4	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	Rp 169.255.505	APBD	100%	Rp 169.255.505	
4	1	1	1.07	5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan pengadaan perlengkapan kantor		1	Rp 169.255.505	APBD	1	Rp 169.255.505	
4	1	5			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi, Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non litigasi dan HAM		100%	Rp 4.494.500.000	APBD	100%	Rp 4.850.000.000	
4	1	5	1.01	1	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase rancangan Produk Hukum dan bantuan hukum yang difasilitasi		100%	Rp 2.850.000.000	APBD	100%	Rp 3.100.000.000	
4	1	5	1.01	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah dokumen rancangan produk hukum pengaturan yang diharmonisasi		80	Rp 900.000.000	APBD	80	Rp 1.000.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
4	1	5	1.01	3	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah dokumen surat keputusan yg ditetapkan		600	Rp 400.000.000	APBD	600	Rp 450.000.000	
4	1	5	1.01	4	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah dokumen produk hukum yang dipublikasikan		680	Rp 600.000.000	APBD	680	Rp 700.000.000	
4	1	5	1.01		Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen fasilitasi dan evaluasi produk hukum kab/kota		300	Rp 950.000.000	APBD	300	Rp 950.000.000	
4	1	5	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan		100%	Rp 1.644.500.000	APBD	100%	Rp 1.750.000.000	
4	1	5	1.02	1	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah dokumen penanganan perkara/sengketa hukum		10	Rp 1.000.000.000	APBD	10	Rp 1.100.000.000	
4	1	5	1.02	2	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah laporan Non Litigasi dan HAM		2	Rp 644.500.000	APBD	2	Rp 650.000.000	
BIRO ORGANISASI													
Sekretariat Daerah													
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas Sekretariat Daerah	KALIMANTAN TIMUR	83%	Rp 4.593.145.280	APBD	83%	Rp 4.593.145.280	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan		100%	Rp 633.393.590		100%	Rp 633.393.590	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	Rp 216.990.310		1 Dokumen	Rp 216.990.310	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan		100%	Rp 41.400.000		100%	Rp 41.400.000	
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	Rp 41.400.000		1 Laporan	Rp 41.400.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah		100%	Rp 520.952.500		100%	Rp 520.952.500	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		7 Orang	Rp 234.450.000		7 Orang	Rp 234.450.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah		100%	Rp 2.229.375.165		100%	Rp 2.229.375.165	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1 Paket	Rp 15.000.000		1 Paket	Rp 15.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	Rp 300.000.000		1 Paket	Rp 300.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	Rp 49.700.585		1 Paket	Rp 49.700.585	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan	Rp 24.980.000		1 Laporan	Rp 24.980.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	Rp 1.839.694.580		1 Laporan	Rp 1.839.694.580	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	Rp 250.000.000		100%	Rp 250.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit	Rp 250.000.000		10 Unit	Rp 250.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 889.327.125		100%	Rp 889.327.125	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	Rp 5.000.000		1 Laporan	Rp 5.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	Rp 416.403.280		1 Laporan	Rp 416.403.280	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik		100%	Rp 28.696.900		100%	Rp 28.696.900	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		12 Unit	Rp 13.956.900		12 Unit	Rp 13.956.900	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		20 Unit	Rp 14.740.000		20 Unit	Rp 14.740.000	
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK)		81%	Rp 2.533.052.500		81%	Rp 2.533.052.500	
		Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)		97%	Rp 2.520.336.500		97%	Rp 2.520.336.500	
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		89%	Rp 1.493.206.000		89%	Rp 1.493.206.000	
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)		96%	Rp 6.252.325.000		96%	Rp 6.252.325.000	
		Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaan Organisasinya sesuai ketentuan		100%	Rp 2.291.215.000		100%	Rp 2.291.215.000	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi		1 Dokumen	Rp 1.007.824.000		1 Dokumen	Rp 1.007.824.000	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	Rp 492.791.000		1 Dokumen	Rp 492.791.000	
	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan		1 Dokumen	Rp 790.600.000		1 Dokumen	Rp 790.600.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan sesuai aturan / Ketentuan		100%	Rp 3.961.110.000		100%	Rp 3.961.110.000	
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	Rp 1.201.825.000		1 Dokumen	Rp 1.201.825.000	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		1 Dokumen	Rp 1.201.825.000		10 Kab/Kota	Rp 1.201.825.000	
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja		1 Laporan	Rp 150.000.000		37 PD	Rp 150.000.000	
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan		1 Dokumen	Rp 472.800.000		1 Dokumen	Rp 472.800.000	
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik		1 Dokumen	Rp 884.660.000		1 Dokumen	Rp 884.660.000	
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH									
	Sekretariat Daerah				Rp 5.781.206.753	APBD		Rp 6.359.327.428	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100	Rp 1.996.594.528	APBD	100	Rp 2.196.253.981	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	Rp 5.725.500	APBD	100	Rp 6.298.050	
	Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Do. Perencanaan Perangkat Daerah		2	Rp 5.725.500	APBD	2	Rp 6.298.050	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	Rp 153.780.000	APBD	100	Rp 169.158.000	
	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		12	Rp 153.780.000	APBD	12	Rp 169.158.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	Rp 13.365.000	APBD	100	Rp 14.701.500	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		6	Rp 13.365.000	APBD	6	Rp 14.701.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	Rp 942.208.850	APBD	100	Rp 1.036.429.735	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor		12	Rp 82.524.200	APBD	12	Rp 82.524.200	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		12	Rp 45.244.650	APBD	12	Rp 45.244.650	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		90	Rp 814.440.000	APBD	90	Rp 814.440.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	Rp 199.685.090	APBD	100	Rp 219.653.599	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		12	Rp 199.685.090	APBD	12	Rp 199.685.090	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	Rp 603.500.188	APBD	100	Rp 663.850.206	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		350	Rp 3.850.000	APBD	350	Rp 3.850.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12	Rp 599.650.188	APBD	12	Rp 3.850.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	Rp 78.329.900	APBD	100	Rp 86.162.890	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		9	Rp 9.900.000	APBD	9	Rp 9.900.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		12	Rp 68.429.900	APBD	12	Rp 68.900.000	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			80	Rp 3.784.612.225	APBD	80	Rp 4.163.073.447	
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Tapal Batas Wilayah Kab/Kota yang disepakati		90	Rp 1.100.000.000	APBD	90	Rp 1.210.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum		3	Rp 650.000.000	APBD	3	Rp 650.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah laporan fasilitasi penataan wilayah		4	Rp 450.000.000	APBD	4	Rp 450.000.000	
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi di bidang pelaksanaan otonomi daerah		85	Rp 1.600.000.000	APBD	85	Rp 1.760.000.000	
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah laporan fasilitasi pejabat negara		3	Rp 450.000.000	APBD	3	Rp 450.000.000	
	Pengembangan otonomi dan penataan urusan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan		4	Rp 650.000.000	APBD	4	Rp 650.000.000	
	Evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah		3	Rp 500.000.000	APBD	3	Rp 500.000.000	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Yang ditindaklanjuti		100	Rp 1.084.612.225	APBD	100	Rp 1.193.073.447	
	Fasilitasi kerjasama antar pemerintah	Jumlah laporan kerjasama antar pemerintah		1	Rp 484.612.225	APBD	1	Rp 484.612.225	
	Fasilitasi kerjasama badan usaha/swasta	Jumlah laporan kerjasama antar badan usaha/swasta		1	Rp 250.000.000	APBD	1	Rp 250.000.000	
	Evaluasi pelaksanaan kerjasama	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan kerjasama		1	Rp 350.000.000	APBD	1	Rp 350.000.000	
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT									
	Sekretariat Daerah				Rp 43.144.459.713			Rp 48.210.000.000	
04:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84%	Rp 2.403.392.301	APBD	85%	Rp 2.551.000.000	
04.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 116.000.000	APBD	100%	Rp 116.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
04.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	Rp 26.000.000	APBD	2 Dokumen	Rp 26.000.000	
04.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	Rp 25.000.000	APBD	2 Dokumen	Rp 25.000.000	
04.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	Rp 25.000.000	APBD	2 Dokumen	Rp 25.000.000	
04.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	Rp 40.000.000	APBD	3 Laporan	Rp 40.000.000	
04.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92%	Rp 335.000.000	APBD	93%	Rp 355.000.000	
04.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Verifikasi Keuangan dan Daftar Honor Non PNS	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	Rp 320.000.000	APBD	12 Bulan	Rp 340.000.000	
04.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	Rp 15.000.000	APBD	1 Laporan	Rp 15.000.000	
04.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 30.000.000	APBD	100%	Rp 35.000.000	
04.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Orang	Rp 30.000.000	APBD	4 Orang	Rp 35.000.000	
04.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	Rp 1.010.000.000	APBD	12 Bulan	Rp 1.110.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
04.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp 150.000.000	APBD	12 Laporan	Rp 150.000.000	
04.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan barang cetakan dan penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp 800.000.000	APBD	12 Laporan	Rp 900.000.000	
04.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp 60.000.000	APBD	12 Laporan	Rp 60.000.000	
04.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan & Luar Negeri	12 Bulan	Rp 771.392.301	APBD	12 Bulan	Rp 785.000.000	
04.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat atau dokumen yang dikirim	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Dokumen	Rp 20.000.000	APBD	1000 Dokumen	Rp 20.000.000	
04.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Komunikasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	Rp 15.000.000	APBD	12 Bulan	Rp 15.000.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Laporan	Rp 736.392.301	APBD	17 Laporan	Rp 750.000.000	Sub Kegiatan Baru
04.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Kategori Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	Rp 141.000.000	APBD	90%	Rp 150.000.000	
04.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas dalam Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	Rp 120.000.000	APBD	10 Unit	Rp 125.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
04.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	Rp 21.000.000	APBD	20 Unit	Rp 25.000.000	
04:01:04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	Rp 40.741.067.412	APBD	90%	Rp 45.650.000.000	
04.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Prosentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 33.941.067.412	APBD	100%	Rp 38.500.000.000	
04.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Sarana dan Prasarana Spiritual	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	Rp 25.941.067.412	APBD	12 Dokumen	Rp 30.000.000.000	
04.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Bina Mental Spiritual	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	Rp 8.000.000.000	APBD	12 Dokumen	Rp 8.500.000.000	
04.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Prosentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 3.600.000.000	APBD	100%	Rp 3.700.000.000	
04.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	Rp 2.000.000.000	APBD	12 Dokumen	Rp 2.000.000.000	
04.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	Rp 800.000.000	APBD	12 Dokumen	Rp 850.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
04.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	Rp 800.000.000	APBD	12 Dokumen	Rp 850.000.000	
04.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Prosentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 3.200.000.000	APBD	100%	Rp 3.450.000.000	
04.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	Rp 1.200.000.000	APBD	13 Dokumen	Rp 1.300.000.000	
04.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Dokumen	Rp 1.300.000.000	APBD	20 Dokumen	Rp 1.400.000.000	
04.01.04.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	Rp 700.000.000	APBD	12 Dokumen	Rp 750.000.000	
BIRO PEREKONOMIAN									
	Sekretariat Daerah		Kaltim dan Luar Daerah		Rp 4.806.955.884	APBD		Rp 5.287.651.472	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan	Kaltim dan Luar Daerah		Rp 1.906.955.884			Rp 2.097.651.472	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Samarinda	100%	Rp 54.853.000		100%	Rp 60.338.300	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	Samarinda	4 dokumen	Rp 43.993.000		4 dokumen	Rp 48.392.300	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	4 laporan	Rp 10.860.000		4 laporan	Rp 11.946.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	Samarinda	92%	Rp 119.250.000		92%	Rp 131.175.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	12 Dokumen	Rp 119.250.000		12 Dokumen	Rp 131.175.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan	Samarinda	100%	Rp 13.440.000		100%	Rp 14.784.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	1 laporan	Rp 13.440.000		1 laporan	Rp 14.784.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Samarinda	100%	Rp 24.139.884		100%	Rp 26.553.872	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda	24 Dokumen	Rp 1.200.000		24 Dokumen	Rp 1.320.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Samarinda	14 orang	Rp 22.939.884		14 orang	Rp 25.233.872	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Samarinda	100%	Rp 880.376.000		100%	Rp 986.413.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	10 paket	Rp 47.080.000		10 paket	Rp 51.788.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Samarinda	600 paket	Rp 30.000.000		600 paket	Rp 30.300.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	12 paket	Rp 18.016.000		12 paket	Rp 19.817.600	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Samarinda	12 Dokumen	Rp 7.680.000		12 Dokumen	Rp 8.448.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim dan Luar Daerah	120 Laporan	Rp 777.600.000		120 Laporan	Rp 855.360.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	100%	Rp 635.549.680		100%	Rp 698.554.680	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	120 Laporan	Rp 1.320.000		120 Laporan	Rp 1.452.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 dokumen	Rp 634.229.680		12 dokumen	Rp 697.102.680	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	100%	Rp 125.332.320		100%	Rp 138.415.520	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Samarinda	1 unit	Rp 125.332.320		1 unit	Rp 138.415.520	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	Samarinda	100%	Rp 54.015.000		100%	Rp 67.098.200	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	1 unit	Rp 35.765.000		1 unit	Rp 39.341.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Samarinda	12 unit	Rp 18.250.000		12 unit	Rp 20.075.000	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian	Kaltim dan Luar Daerah	100%	Rp 2.900.000.000		100%	Rp 2.901.825.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Kaltim dan Luar Daerah	1 dokumen	Rp 725.000.000		1 dokumen	Rp 726.825.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Kaltim dan Luar Daerah	2 dokumen	Rp 362.500.000		2 dokumen	Rp 398.750.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Kaltim dan Luar Daerah	1 dokumen	Rp 362.500.000		1 dokumen	Rp 398.750.000	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Kaltim dan Luar Daerah	1 dokumen	Rp 1.087.500.000		1 dokumen	Rp 1.123.750.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kaltim dan Luar Daerah	3 dokumen	Rp 362.500.000		3 dokumen	Rp 398.750.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kaltim dan Luar Daerah	2 dokumen	Rp 362.500.000		2 dokumen	Rp 398.750.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kaltim dan Luar Daerah	2 dokumen	Rp 362.500.000		2 dokumen	Rp 398.750.000	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Kaltim dan Luar Daerah	1 dokumen	Rp 1.087.500.000		1 dokumen	Rp 1.123.750.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Kaltim dan Luar Daerah	1 dokumen	Rp 362.500.000		1 dokumen	Rp 398.750.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Kaltim dan Luar Daerah	1 dokumen	Rp 362.500.000		1 dokumen	Rp 398.750.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Kaltim dan Luar Daerah	1 dokumen	Rp 362.500.000		1 dokumen	Rp 398.750.000	
4.01.0.00.0.00.03.0009	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
	Sekretariat Daerah				Rp 7.557.107.708			Rp 7.557.107.708				
4.01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase kualitas Pemerintahan Daerah	Kaltim		Rp 3.302.107.708	APBD		Rp 3.302.107.708	
4.01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya laporan keuangan yang akuntabel	Kaltim		Rp 134.278.000	APBD		Rp 134.278.000	
4.01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	1 dokumen	Rp 134.278.000	APBD		Rp 134.278.000	
4.01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas pegawai	Kaltim		Rp 514.680.000	APBD		Rp 514.680.000	
4.01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kaltim	1 paket	Rp 31.500.000	APBD	1	Rp 31.500.000	
4.01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kaltim	20 orang	Rp 420.000.000	APBD		Rp 420.000.000	
4.01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kaltim	100 orang	Rp 63.180.000	APBD		Rp 63.180.000	
4.01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Administarsi Umum	Kaltim		Rp 566.460.500	APBD		Rp 566.460.500	
4.01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kaltim	1 paket	Rp 176.988.000	APBD		Rp 176.988.000	
4.01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kaltim	2 paket	Rp 16.902.500	APBD		Rp 16.902.500	
4.01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	20 laporan	Rp 372.570.000	APBD		Rp 372.570.000	
4.01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	meningkatnya pelayanan kantor	Kaltim		Rp 851.251.651	APBD		Rp 851.251.651	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4.01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kaltim	20 unit	Rp 851.251.651	APBD	Rp 851.251.651	
4.01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan Administarsi Umum	Kaltim		Rp 1.131.521.557	APBD	Rp 1.131.521.557	
4.01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	4 laporan	Rp 5.250.000	APBD	Rp 5.250.000	
4.01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kaltim	12 laporan	Rp 77.013.800	APBD	Rp 77.013.800	
4.01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	Kaltim	12 laporan	Rp 1.049.257.757	APBD	Rp 1.049.257.757	
4.01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Kaltim		Rp 103.916.000	APBD	Rp 103.916.000	
4.01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kaltim	1 unit	Rp 38.000.000	APBD	Rp 38.000.000	
4.01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kaltim	2 unit	Rp 32.216.000	APBD	Rp 32.216.000	
4.01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kaltim	20 unit	Rp 33.700.000	APBD	Rp 33.700.000	
4.01	1.02		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Kaltim		Rp 4.255.000.000	APBD	PKP-PB Pro Aktif	Rp 4.255.000.000
4.01	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa	Kaltim		Rp 1.347.256.600	APBD	90	Rp 1.347.256.600
4.01	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	1 Laporan	Rp 354.634.600	APBD	1	Rp 354.634.600
4.01	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	2 Laporan	Rp 607.830.000	APBD	2	Rp 607.830.000
4.01	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	2 Laporan	Rp 384.792.000	APBD	2	Rp 384.792.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4.01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase layanan Pengadaan secara elektronik	Kaltim		Rp 1.388.528.400	APBD	95	Rp 1.388.528.400	
4.01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Kaltim	2 Laporan	Rp 700.040.400	APBD	2	Rp 700.040.400	
4.01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	2 Laporan	Rp 330.300.000	APBD	2	Rp 330.300.000	
4.01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	3 Laporan	Rp 358.188.000	APBD	3	Rp 358.188.000	
4.01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim		Rp 1.519.215.000	APBD	87,5	Rp 1.519.215.000	
4.01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	200 orang	Rp 421.440.000	APBD	200	Rp 421.440.000	
4.01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	1 dokumen	Rp 629.815.000	APBD	1	Rp 629.815.000	
4.01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	1 dokumen	Rp 467.960.000	APBD	1	Rp 467.960.000	
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
4.01.0.00.0.00.03.0008			Sekretariat Daerah			Kaltim dan Luar Daerah		Rp 6.638.493.395	APBD		Rp 7.302.342.735	
4.01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan	Kaltim dan Luar Daerah	84%	Rp 2.722.197.247	APBD	84%	Rp 2.994.416.972	
4.01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja (Biro Administrasi Pembangunan)	Kaltim dan Luar Daerah	2 Dokumen	Rp 4.000.000	APBD	2 Dokumen	Rp 4.400.000	
4.01	01	1.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kaltim dan Luar Daerah	2 Dokumen	Rp 4.000.000	APBD	2 Dok	Rp 4.400.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4.01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan	Kaltim dan Luar Daerah	1 Dokumen	Rp 213.000.000	APBD	1 Dok	Rp 234.300.000	
4.01	1.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim dan Luar Daerah	1 Dokumen	Rp 213.000.000	APBD	1 Dok	Rp 234.300.000	
4.01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Biro Administrasi Pembangunan	Kaltim dan Luar Daerah	100%	Rp 124.204.200	APBD	100%	Rp 136.624.620	
4.01	1.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kaltim	33 Paket	Rp 15.000.000	APBD	33 Paket	Rp 16.500.000	
4.01	1.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kaltim dan Luar Daerah	10 Orang	Rp 89.204.200	APBD	10 Orang	Rp 98.124.620	
4.01	1.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kaltim dan Luar Daerah	10 Orang	Rp 20.000.000	APBD	10 Orang	Rp 22.000.000	
4.01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum	Kaltim	3 Dokumen	Rp 1.007.353.247	APBD	3 Dokumen	Rp 1.108.088.572	
4.01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kaltim	12 Laporan	Rp 194.334.867	APBD	12 Laporan	Rp 213.768.354	
4.01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kaltim	10 Paket	Rp 5.000.000	APBD	10 Paket	Rp 5.500.000	
4.01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim dan Luar Daerah	15 Laporan	Rp 808.018.380	APBD	15 Laporan	Rp 888.820.218	
4.01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	Kaltim	85%	Rp 50.000.000	APBD	85%	Rp 55.000.000	
4.01	1.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kaltim	20 Unit	Rp 50.000.000	APBD	20 Unit	Rp 55.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
4.01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan kantor	Kaltim	85%	Rp 1.111.595.800	APBD	85%	Rp 1.222.755.380		
4.01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	12 Laporan	Rp 13.000.000	APBD	12 Laporan	Rp 14.300.000	
4.01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kaltim	12 Bulan	Rp 37.795.800	APBD	12 Bulan	Rp 41.575.380	
4.01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	Kaltim	12 Laporan	Rp 1.060.800.000	APBD	12 Laporan	Rp 1.166.880.000	
4.01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	Kaltim	85%	Rp 212.044.000	APBD	85%	Rp 233.248.400	
4.01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kaltim	1 Unit	Rp 40.562.000	APBD	1 Unit	Rp 44.618.200	
4.01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kaltim	3 Unit	Rp 121.482.000	APBD	3 Unit	Rp 133.630.200	
4.01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kaltim	30 Unit	Rp 50.000.000	APBD	30 Unit	Rp 55.000.000	
4.01	08		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	Kaltim dan Luar Daerah	100%	Rp 1.174.888.844	APBD	100%	Rp 1.292.377.728	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju 2024		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan	Kaltim dan Luar Daerah	80%	Rp 2.741.407.304	APBD	80%	Rp 3.015.548.034	
4.01	08 1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	3 Dokumen	Rp 2.741.407.304	APBD	90	Rp 3.015.548.034	
4.01	08 1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Kaltim	12 Laporan	Rp 510.000.000	APBD	1	Rp 561.000.000	
4.01	08 1.01	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	12 Laporan	Rp 400.000.000	APBD	2	Rp 440.000.000	
4.01	08 1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Kaltim	6 Laporan	Rp 1.831.407.304	APBD	2	Rp 2.014.548.034	
4.01	08 1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	3 Dokumen	Rp 1.174.888.844	APBD	95	Rp 1.292.377.728	
4.01	08 1.02	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Kaltim	4 Dokumen	Rp 350.000.000	APBD	2	Rp 385.000.000	
4.01	08 1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	12 Laporan	Rp 500.000.000	APBD	2	Rp 550.000.000	
4.01	08 1.02	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Kaltim	1 Dokumen	Rp 324.888.844	APBD	3	Rp 357.377.728	

LAMPIRAN III : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 DENGAN TEMA "SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR"

NOMOR : 060/2239/Adpim-I

TANGGAL : 28 MARET 2022

Usulan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	BIRO UMUM				
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Usulan Kegiatan baru TA 2023
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Usulan Sub Kegiatan TA 2023
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Usulan Sub Kegiatan TA 2023
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Usulan Sub Kegiatan TA 2023
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Usulan Sub Kegiatan TA 2023
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil	Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	Usulan Sub Kegiatan TA 2023
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	Usulan Sub Kegiatan TA 2023
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH	12 Laporan	Usulan Sub Kegiatan TA 2023
2	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Biro Adpim	Kaltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Biro adpim	2 Dokumen	Usulan Sub Kegiatan TA 2023
3	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	17 Laporan	Usulan Sub Kegiatan TA 2023